

711
Hov
p 21

PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

TESIS

Disusun Dalam Rangka Memenuhi Persyaratan
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota

Oleh:

FENTI NOVITA
L4D OO1 200



**PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
2003**

UPT-PUSTAKA INDRIP

**PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG
TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR**

Tesis diajukan kepada
Program Studi Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Dionegoro

Oleh:

FENTI NOVITA
L4D001200

Diajukan pada Sidang Ujian Tesis
Tanggal 25 Maret 2003

Dinyatakan Lulus
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Magister Teknik

Semarang, 25 Maret 2003

Pembimbing Pendamping

Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP

Pembimbing Utama

Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

Mengetahui

Ketua Program Studi

Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota
Program Pascasarjana Universitas Diponegoro

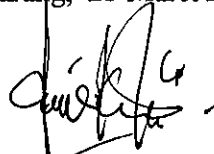


Prof. Dr. Ir. Sugiono Soetomo, DEA

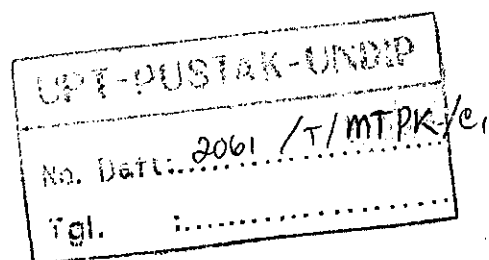
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam Tesis ini tidak Terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi. Sepanjang pengetahuan saya, juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui dalam naskah ini dan disebutkan dalam Daftar Pustaka.

Semarang, 25 Maret 2003



FENTI NOVITA
NIM L4D001200



ALLAH MENINGGIKAN DERAJAT ORANG -ORANG
YANG BERIMAN DI ANTARA KAMU DAN
ORANG-ORANG YANG DIBERI ILMU PENGETAHUAN
BEBERAPA DERAJAT
(AL MUJADALAH : 11)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji dan syukur kupanjatkan pada-Mu Illahi Rabbi, karena perkenan dan ridho-Mu jualah penyusunan tesis ini dapat diselesaikan.

Dokumen tesis ini disusun sebagai syarat meraih gelar Magister pada Program Studi Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota. Dukungan dari berbagai pihak sangat berarti bagi terselesaikannya tulisan ini, oleh karena itu penulis mengucapkan terima kasih pada:

1. Prof. Dr. Ir. Sugiono Setomo, DEA selaku Ketua Program Pasca Sarjana Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota sekaligus sebagai pembimbing utama yang telah banyak memberikan sumbangan pemikiran
2. Ir. Jawoto Sih Setyono, MDP selaku pebimbing pendamping atas waktu, masukan, dan kesabarannya membimbing penulis menyelesaikan tulisan ini
3. Semua rekan-rekan MPPWK I atas persahabatannya
4. Terutama orang-orang rumah tercinta, orang tua, saudara-saudara, dan suami tercinta, yang meskipun jauh, selalu mendoakanku

Semarang, Maret 2003

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	hal i
LEMBAR PENGESAHAN.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan dan Sasaran.....	10
1.3.1 Tujuan.....	10
1.3.2 Sasaran.....	10
1.4 Manfaat Studi.....	10
1.5 Ruang Lingkup Studi.....	11
1.5.1 Ruang Lingkup Materi.....	11
1.5.2 Ruang Lingkup Wilayah.....	11
1.6 Kerangka Pemikiran.....	14
1.7 Metodologi Penelitian.....	17
1.7.1 Pendekatan Studi.....	17
1.7.2 Kerangka Analisis.....	17
1.7.3 Data.....	18
1.7.3.1 Data Primer.....	18
1.7.3.2 Data Sekunder.....	23
1.7.4 Teknik Analisis.....	23
1.7.4.1 Analisis Kuantitatif.....	23
1.7.4.2 Analisis Kualitatif.....	36
1.8 Sistematika Penulisan.....	37
BAB II PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR DALAM PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN.....	39
2.1 Perkembangan Kota.....	39
2.2 Kawasan Pesisir.....	41
2.2.1 Definisi dan Deliniasi Kawasan Pesisir.....	41
2.2.2 Potensi Kawasan Pesisir.....	43
2.2.3 Aktivitas Ekonomi Kawasan Pesisir.....	45
2.2.4 Permasalahan Kawasan Pesisir.....	45
2.3 Pembangunan Kota yang Berkelanjutan.....	49

2.4 Peran Kawasan Pesisir dalam Perkembangan Kota.....	52
2.5 Kesimpulan.....	56
BAB III PERKEMBANGAN KOTA DAN KAWASAN PESISIR BANDAR LAMPUNG.....	61
3.1 Kondisi Umum Kota Bandar Lampung.....	61
3.1.1 Kedudukan Geografis.....	61
3.1.2 Kondisi Fisik Dasar.....	65
3.1.3 Kondisi Sosial Kependudukan.....	66
3.1.4 Kondisi Perekonomian.....	68
3.1.5 Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung.....	72
3.2 Kondisi Umum Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung.....	76
3.2.1 Kedudukan Geografis.....	76
3.2.2 Kondisi Fisik Dasar.....	76
3.2.3 Kondisi Sosial Kependudukan.....	78
3.2.4 Kondisi Perekonomian.....	79
3.2.5 Kondisi Tata Ruang	80
BAB IV ANALISIS PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR.....	97
4.1 Identifikasi Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung.....	97
4.1.1 Aspek Fisik	97
4.1.2 Aspek Geografis.....	98
4.1.3 Aspek Sosial.....	100
4.1.4 Aspek Ekonomi.....	100
4.2 Identifikasi Perkembangan Kawasan Pesisir.....	111
4.2.1 Aspek Fisik dan geografis.....	111
4.2.2 Aspek Sosial.....	113
4.2.3 Aspek Ekonomi.....	114
4.2.4 Aspek Tata Ruang.....	116
4.3 Analisis Kondisi Lingkungan Kawasan Pesisir	119
4.4 Analisis Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung Terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir.....	121
4.5.1 Analisis Kuantitatif.....	121
4.5.2 Analisis Kualitatif.....	125
BAB V KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	
5.1 Kesimpulan.....	133
5.2 Rekomendasi.....	135
DAFTAR PUSTAKA.....	137
LAMPIRAN.....	140

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	: Variabel Penurunan Kualitas Lingkungan Kawasan Pesisir.....	22
TABEL I.2	: Data Sekunder.....	24
TABEL I.3	: Pengukuran Variabel Dampak Prospek Kota Bandar Lampung terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir.....	34
TABEL III.1	: Luas Lahan Kosong di Kota Bandar Lampung.....	66
TABEL III.2	: Jumlah Penduduk Kota Bandar Lampung.....	67
TABEL III.3	: Nilai PDRB Kota Bandar Lampung dan Propinsi Lampung.....	68
TABEL III.4	: Nilai Ekspor Barang dan Jasa Propinsi Lampung.....	71
TABEL III.5	: Jumlah Penduduk Pesisir Kota Bandar Lampung.....	78
TABEL III.6	: Jumlah Industri di Kawasan Pesisir dan Kota Bandar Lampung.....	79
TABEL III.7	: Jumlah Tenaga Kerja Sektor Industri di kawasan Pesisir dan Kota Bandar Lampung.....	80
TABEL III.8	: Volume Ekspor Melalui Pelabuhan Panjang.....	84
TABEL III.9	: Luas Pekarangan di Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung.....	84
TABEL III.10	: Tabel Nilai Konsentrasi Parameter Kualitas Air di Perairan Teluk Lampung.....	91
TABEL III.11	: Persepsi Masyarakat Pesisir Kota Bandar Lampung terhadap Kondisi Lingkungannya.....	92
TABEL IV.1	: Hasil Perhitungan LQ Kota Bandar Lampung Tahun 2001.....	101
TABEL IV.2	: Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW).....	102
TABEL IV.3	: Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP).....	103
TABEL IV.4	: Komponen Pergeseran / Pertumbuhan Pangsa Pasar (KPK).....	104
TABEL IV.5	: Pergeseran Netto Kota Bandar Lampung Tahun 1993-2001.....	105
TABEL IV.6	: Perubahan PDRB Kota Bandar Lampung.....	105
TABEL IV.7	: Nilai Absolut Pertumbuhan Ekonomi Kota (PEK).....	106
TABEL IV.8	: Nilai PDRB Kota Bandar Lampung Tahun 1993-2001.....	109
TABEL IV.9	: Penentuan Skala Komponen Variabel X.....	122

TABEL IV.10 : Perhitungan Variabel X (Prospek Kota Bandar Lampung).....	122
TABEL IV.11 : Penentuan Skala Komponen Variabel Y.....	122
TABEL IV.12 : Penentuan Skala Komponen Variabel Y.....	123

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 1.1	: Peta Wilayah Administratif Kota Bandar Lampung.....	13
GAMBAR 1.2	: Kerangka Pemikiran.....	16
GAMBAR 1.3	: Kerangka Analisis.....	19
GAMBAR 1.4	: Diagram Penentuan Sektor Unggulan.....	29
GAMBAR 3.1	: Peta Letak Geografis Kota Bandar Lampung.....	62
GAMBAR 3.2	: Peta Kedudukan Geografis Kota Bandar Lampung.....	64
GAMBAR 3.3	: Peta Propinsi Lampung.....	70
GAMBAR 3.4	: Peta Jaringan Jalan Kota Bandar Lampung.....	74
GAMBAR 3.5	: Peta Arah Penggunaan Lahan Kota Bandar Lampung.....	75
GAMBAR 3.6	: Peta Letak Geografis Pesisir Kota Bandar Lampung.....	77
GAMBAR 3.7	: Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung (di BWK Panjang).....	81
GAMBAR 3.8	: Peta Rencana Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung (di BWK Teluk Betung).....	82
GAMBAR 3.9	: Peta Kondisi Eksisting Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung (di BWK Panjang).....	85
GAMBAR 3.10	: Peta Kondisi Eksisting Tata Ruang Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung (di BWK Teluk Betung).....	86
GAMBAR 3.11	: Foto Kondisi Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung.....	87
GAMBAR 3.12	: Peta Isu Pesisir Kota Bandar Lampung:.....	90
GAMBAR 4.1	: Diagram Sektor Unggulan Kota Bandar Lampung.....	104
GAMBAR 4.2	: Bentuk Hubungan Linier Antara Variabel X dan Y.....	124

DAFTAR LAMPIRAN

LAMPIRAN A: Lembar Angket.....	140
LAMPIRAN B: Perhitungan Analisis Regresi.....	142
LAMPIRAN C: Tabel Nilai F	145
LAMPIRAN D: Tabel Nilai r <i>Product Moment</i>	146

ABSTRAK

Letak geografis yang berada di ujung Pulau Sumatra telah menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional ditunjang oleh sumber daya yang memadai dan prospek yang dimiliki Propinsi Lampung.

Dengan perannya sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka keberadaan kawasan pesisir bagi Kota Bandar Lampung sangat penting. Selain sebagai kawasan kerja pelabuhan, penggunaan lahan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung juga diarahkan untuk memenuhi peran-peran yang mendukung fungsi pelabuhan seperti menyediakan sarana pelayanan ekspor impor dan sarana pergudangan. Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini menjadi bagian dari perkembangan kota yang pesat di tandai dengan ramainya aktifitas di sepanjang wilayah pesisir tersebut, dari permukiman yang padat, wisata pantai, hingga sektor industri. Namun sejauh ini, masih merupakan suatu pertanyaan apakah peningkatan aktivitas di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tersebut tidak akan berpengaruh negatif terhadap fungsi ekologis kawasan tersebut dan dengan adanya potensi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung, apakah akan berpengaruh lebih buruk lagi di masa mendatang?

Dari analisis yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung saat ini dan prospeknya dimasa mendatang sangat dipengaruhi oleh peran dan fungsinya sebagai simpul koleksi barang dan jasa sebagaimana teori Central Place dan Urban Base, yaitu suatu kota berkembang karena fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa untuk daerah sekitarnya dan daerah di luar batas-batas kota tersebut. Pelabuhan Panjang yang berperan dalam mendukung fungsi dan peran Kota Bandar Lampung, tiap tahunnya mengalami peningkatan volume ekspor sehingga secara langsung akan meningkatkan pendapatan Kota Bandar Lampung sekaligus menimbulkan perkembangan industri-industri yang menyediakan bahan mentah dan jasa-jasa untuk industri-industri yang memproduksi barang ekspor. Hal tersebut tentu akan mendorong perkembangan kota lebih lanjut.

Adanya perkembangan kota akibat peran fungsional tersebut menyebabkan munculnya perubahan baik ekonomi, sosial-budaya, maupun fisik di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sebagai suatu kawasan yang berperan penting dalam perekonomian kota. Secara sosial dan ekonomi, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tidak lagi bercirikan ekonomi pesisir melainkan telah berfungsi sebagai kawasan pembangunan dan industri. Perubahan fungsi kawasan tersebut diikuti dengan perubahannya secara fisik seperti ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, penggunaan ruang yang sedikit menjadi terglomerasi secara luas, serta adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan seperti banjir, rusaknya habitat pesisir, dan sebagainya.

Perkembangan Kota Bandar Lampung secara signifikan diikuti oleh perkembangan kawasan pesisirnya. Semakin baik prospek perkembangan Kota Bandar Lampung maka semakin ramai aktifitas masyarakat di kawasan pesisirnya sehingga potensi penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir juga semakin besar bila tidak ada upaya-upaya pengendaliannya.

Dengan perkembangan dan tren yang ada saat ini, rencana tata ruang untuk kawasan pesisir yang ada perlu direvisi seperti relokasi beberapa fungsi disamping konsistensi dalam implementasi fungsi-fungsi konservasi sehingga tren pembangunan yang ada saat ini di kawasan tersebut dapat dikendalikan dan diarahkan tanpa menghilangkan fungsi dan perannya dalam perekonomian wilayah setempat.

ABSTRACT

Being located in the end of Sumatra Island, Bandar Lampung City has a strategic position, especially as a gate between Java Island and Sumatra Island. Bandar Lampung City has potential to be one of national service and goods distribution centres which is supported by sufficient resource and prospect belongs to The Province of Lampung.

With its role as a goods collection and distribution centre, the existence of coast area for Bandar Lampung City is very important. In addition to be a port work area, the using of land in the coast area of Bandar Lampung City is also directed to fulfill the roles that support the function of the port, such as provides a means of export-import service and warehousing means. The coast area of Bandar Lampung City becomes a part of city development nowadays, it is signed by the activities along the coast area such as the dense civilization, beach recreation, and industry activities. However, this is still a question, does the increasing of activity in coast area of Bandar Lampung City give negative effect to the function of that area's ecology and does Bandar Lampung City's prospect give worse effect in the future?

Based on the analysis which has been done, it can be concluded that the development of Bandar Lampung City at this time and its prospect in the future is highly influenced by its role and function as the centre of service and goods distribution in the same manner as Central Place and Urban Base Theory, that is a city can develop because of its function in providing service and goods for the area around it and the area in the city's boundaries. The Panjang Port which has a role in supporting the function and the role of Bandar Lampung City, experiences the increasing of export volume, so that it will increase the income of Bandar Lampung City directly and cause the development of industries which provide a raw material and services for industries which produce export goods. It will motivate the development of the city further.

Since there is a development of city as the result of its functional role, it causes the changes in economic, social culture, and physical in the coast area of Bandar Lampung City as an area which has important role in the economy of the city. Socially and economically, the coast area of Bandar Lampung City has no characteristic of coast economic anymore, but it has function as the area of development and industry. The change of the area's function is followed by its change physically, such as the availability of wide area become limited, the using of few space become glomerated widely, and there is the indications of environment quality decreasing, such as a flood, the habitat of the coast is damaged, etc.

The development of Bandar Lampung City is followed by its coast area development significantly. The better development of Bandar Lampung City, the more crowded of people activity in its coast area will occur, so that the potential of environment quality decreasing in coast area is getting bigger if there is no prevention efforts.

With the development and trend which exist nowadays, the coast area land use planning need revision such as relocation some function besides implementation the conservation function consistly so that the trend of development in that area can be controlled and directed without ommiting its function and role in the economy of local area.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Bandar Lampung lebih dari satu dasawarsa terakhir telah menjadi sebuah kota yang berkembang dengan pesat. Hal ini ditandai oleh pertumbuhan ekonomi maupun pertumbuhan fisik dengan berbagai aspek perkotaannya. Dengan luas wilayah 192 km², Kota Bandar Lampung dihuni oleh 743.109 penduduk pada tahun 2000 yang terdiri dari berbagai suku bangsa dengan tingkat pertumbuhan sebesar 3,11% per tahun. Pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung juga menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat terutama sebelum terjadinya krisis tahun 1997, yaitu mendekati rata-rata 7%, lebih tinggi dari target pertumbuhan per tahun yang ditetapkan sebesar 6%. Sebagai wilayah perkotaan, perekonomian Kota Bandar Lampung telah dicirikan oleh kegiatan ekonomi berbasis sekunder dan tersier. Sektor tersier telah menunjukkan kontribusi yang signifikan, yaitu mencapai 75% dalam pembentukan PDRB yang antara lain diberikan oleh subsektor perdagangan besar dan eceran serta jasa keuangan sebesar 31%. Pada Pelita V, konsistensi pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi antara lain terjadi pada sektor industri pengolahan dengan rata-rata pertumbuhan 16,73%, dan sektor perdagangan/restoran dan perhotelan sebesar 24,11% (Bappeda,1997).

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Propinsi Lampung. Kota ini berada di Teluk Lampung di bagian selatan Propinsi Lampung. Lokasi ini menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional ditunjang oleh sumber daya yang memadai dan prospek yang dimiliki Propinsi Lampung. Sebagai daerah unggulan di luar Jawa, Propinsi Lampung

siap mendorong Kota Bandar Lampung menjadi pusat pertumbuhan penting terutama di Sumatra Bagian Selatan (Sumbagsel). Posisi Kota Bandar Lampung yang strategis semakin diperkuat dengan adanya rencana pembangunan jembatan penghubung Merak – Bakauheni. Kecenderungan yang terjadi juga menunjukkan adanya proses relokasi kegiatan ekonomi dari Pulau Jawa bagian barat ke Propinsi Lampung bahkan kebijaksanaan beberapa sektor telah menetapkan Lampung sebagai basis produksi nasional dengan menjadikannya sebagai produsen unggulan untuk komoditi gula, daging segar, kopi, lada, udang, serta industri manufaktur dan kimia hasil relokasi dari Jabotabek dan Jawa Barat bagian barat (Bappeda, 1997).

Kota Bandar Lampung memiliki prospek perkembangan ekonomi ditinjau dari potensi yang dimilikinya, seperti lokasi yang strategis, pemandangan alam yang indah, keanekaragaman suku bangsa, dan dukungan wilayah sekitarnya. Namun, hal yang perlu digarisbawahi adalah bagaimana memanfaatkan potensi tersebut menjadi peluang yang bermanfaat bagi kegiatan dan pengembangan kota. Sebab, pada sisi yang lain, Kota Bandar Lampung dihadapkan pada tiga isu utama secara fisik yang membatasi perkembangannya, yaitu *pertama*, perbukitan dengan ketinggian dan kelerengan yang tidak sesuai bagi aktifitas budidaya perkotaan, *kedua*, bencana banjir yang bersifat rutin di beberapa kawasan di Kota Bandar Lampung, *ketiga*, pelestarian ekosistem pantai di Teluk Lampung. Meskipun memiliki wilayah yang cukup luas, Kota Bandar Lampung memiliki perbukitan yang tersebar di seluruh bagian kota, beberapa wilayah aliran sungai, serta kawasan pesisir sehingga diperlukan batasan tertentu bagi perkembangan kegiatan perkotaan. Dari kajian yang telah dilakukan, diketahui bahwa hanya $\pm 40\%$ wilayah Kota Bandar Lampung yang layak secara lingkungan untuk dimanfaatkan bagi aktifitas perkotaan (Bappeda, 1997). Oleh karena tidak seluruh lahan yang tersedia dapat

dimanfaatkan sebagai kawasan budidaya, maka diperlukan suatu arahan pemanfaatan ruang agar fungsi perlindungan lingkungan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Paradigma perkembangan kota yang mengarah pada perluasan wilayah karena dampak pertumbuhan penduduk yang tinggi tanpa disadari menyebabkan perkembangan tersebut bergerak ke arah kawasan pesisir. Hal tersebut semakin didukung oleh kondisi topografis kawasan pesisir yang relatif datar sehingga menjadikan kawasan ini sebagai kawasan yang ideal untuk dikembangkan menjadi wilayah perkotaan dengan segala macam aktifitas di dalamnya seperti permukiman, perdagangan, industri, pariwisata, dan lain-lain.

Kawasan pesisir merupakan kawasan yang penting dan sangat diminati oleh manusia sebagai tempat tinggal, mencari nafkah, serta untuk menikmati sumber daya alam dan buatan. Potensi pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok : (1) sumber daya terbarukan (*renewable resources*), (2) sumber daya tak terbarukan (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) (Dahuri, 2001).

Definisi kawasan pesisir adalah: “wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sedangkan wilayah laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut serta perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat” (Bengen, 2000:3). Sedangkan menurut Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir (2001), pengertian dari kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Menurut Supriharyono (2000), terdapat hubungan antar sektor di kawasan pesisir. Sebagai contoh adalah pengembangan lahan pesisir untuk tambak akan berhubungan dengan pengembangan industri lainnya yang mendukung seperti industri makanan hewan dan industri kimia. Adanya fasilitas pelabuhan akan merangsang pertumbuhan wilayah perkotaan. Sedangkan di sektor pariwisata, hotel-hotel membutuhkan struktur barang dan jasa, prasarana jalan, listrik, suplai air dan sebagainya.

Meskipun pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budi daya tambak, penambangan terumbu karang, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem pesisir seperti penurunan daya dukung lingkungan, penurunan mutu lingkungan pesisir pesisir, Penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir, serta Perusakan dan pencemaran lingkungan (Sugandhy, 1999 : 21-30).

Kota Bandar Lampung memiliki garis pantai sepanjang 18 Km dan 12 kelurahan yang terletak di pesisir (desa pantai) yang berada di 3 kecamatan di mana kawasan pesisir tersebut saat ini menjadi bagian dari perkembangan Kota Bandar Lampung yang pesat. Secara garis besar, Kota Bandar Lampung memiliki konsep pengembangan ruang kota dengan pola konsentrik dan pola menyebar mengikuti arah jalan. Pengembangan fisik lebih ditekankan pada arah utara, timur, dan barat. Sedangkan kawasan pantai (pesisir) di bagian selatan kota ditangani secara khusus dalam pengembangannya dengan konsep reklamasi pantai. Penanganan tata ruangnya diharapkan terintegrasi dengan pola tata ruang yang sudah ada (RUTRK, 1995).

Dalam Rencana Tata Ruang Kota (RTRK), kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terbagi ke dalam dua Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu BWK Panjang dan BWK Teluk Betung dengan arahan penggunaan lahan di masing-masing BWK sebagai berikut (RDTRK, 1996):

- Kawasan pesisir di BWK Teluk Betung: ruang terbuka/hutan, jasa penunjang kawasan pendidikan dan perkantoran, perdagangan dan pemukiman.
- Kawasan pesisir di BWK Panjang: daerah konservasi, permukiman, industri dan pergudangan, rekreasi dan olahraga, kawasan kerja/kepentingan pelabuhan, perdagangan dan jasa.

Saat ini kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung sebagian besar dijadikan lahan pemukiman. Selain itu, terdapat tidak kurang dari 15 pabrik industri, berbagai perusahaan, perkantoran, lokasi pergudangan, tempat hiburan, beberapa wisata pantai, serta Pelabuhan Panjang yang berperan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antar pulau. Aktifitas-aktifitas di sepanjang pesisir tersebut menjadi faktor penarik sehingga kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung menjadi ramai (PKSPL-IPB, 2002).

Dengan perannya sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka keberadaan kawasan pesisir bagi Kota Bandar Lampung sangat penting. Dengan kecenderungan peningkatan volume bongkar muat sebesar 4% per tahun di Pelabuhan Panjang, maka telah direncanakan perluasan kawasan pelabuhan oleh PT Pelindo II. Untuk saat ini dan waktu yang akan datang Pelabuhan Panjang menjadi tumpuan perkembangan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penggunaan lahan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, diantaranya diarahkan untuk memenuhi peran-peran yang mendukung fungsi Pelabuhan Panjang, seperti menyediakan sarana pelayanan ekspor impor dan sarana pergudangan (Bappeda, 1997).

Namun demikian, tidak seluruh rencana yang tertuang dalam RTRK terimplementasi sesuai yang diharapkan. Sebagai contoh adalah rencana reklamasi pantai. Di pesisir Kota Bandar Lampung telah dilakukan reklamasi pantai sejak tahun 1983 yang awalnya dimaksudkan untuk mendukung sistem pengembangan Kota Pantai (*Water Front City*) seluas 450 ha. Namun, kenyataannya saat ini kegiatan reklamasi terhenti dan proses reklamasi yang telah dilakukan tidak dilaksanakan sebagaimana rencana semula, tidak ada lahan bebas sepanjang pantai yang telah ditimbun. Menurut rencana semula, sepanjang pantai dengan lebar 60 m harus bebas, berupa jalan 20 m, sempadan pantai 30 m, dan batas jalan dengan bangunan 10 m. Selain itu, semua bangunan harus menghadap ke pantai sehingga setiap masyarakat dapat menikmati keindahan pantai dan laut tanpa harus membayar ke penimbun pantai (PKSPL-IPB, 2002).

Selain itu, masih terdapat beberapa permasalahan lain yang menyangkut kawasan pesisir Kota Bandar Lampung (PKSPL-IPB, 2002), diantaranya adalah:

1. Langkanya air tawar di daerah pemukiman pantai di Teluk Betung dan Panjang terutama di pemukiman yang berada di sempadan pantai.
2. Pembuangan sampah dan limbah padat dari pantai Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan secara terpadu sehingga menimbulkan pencemaran limbah padat berbau busuk di kawasan pesisir
3. Keinginan pengusaha industri untuk menjaga kualitas limbah cair yang dibuang ke perairan umumnya masih rendah dan mekanisme kontrol masih belum terintegrasi secara terpadu. Sistem ganti rugi akibat pencemaran tidak efisien secara ekologis, ekonomi atau sosial.
4. Pola bangunan yang membelakangi pantai menjadikan suasana lingkungan pantai menjadi kotor.

5. Pola pengembangan wisata pantai belum berwawasan lingkungan dan tidak tersedia fasilitas pendukung sehingga terlihat tidak profesional.
6. Berhentinya program *Water Front City 2000* berakibat pada perubahan situasi, yaitu nelayan kembali ke tempatnya semula diluar perencanaan semula dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dari pemerintah.
7. Sanitasi pemukiman pesisir belum memadai karena pemahaman masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih rendah sehingga masih banyak masyarakat yang menggunakan pantai sebagai WC umum.
8. Reklamasi pantai tanpa studi amdal/izin formal dan tanpa perencanaan tepat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir seperti terjadinya banjir dan perubahan arus perairan laut secara lokal.
9. Kurangnya partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan sumber daya pesisir merupakan akibat proses pengambilan keputusan pemanfaatan sumber daya pesisir yang tidak terkoordinasi.
10. Belum adanya tata ruang kawasan pesisir yang secara detil dapat menjadi acuan untuk menentukan peruntukan pemanfaatannya.

Untuk mengarahkan perkembangannya dimasa mendatang, sebuah kota yang memiliki prospek perkembangan memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan, yang mampu menampung perkembangan kota dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan kota dan masyarakatnya. Dengan adanya gagasan pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) yang dirumuskan oleh WCED (*World Commission on Environment and Development*) yang dibentuk oleh PBB pada tahun 1987 dan juga penetapannya sebagai kebijakan nasional oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tahun yang sama maka visi pembangunan yang

berkelanjutan diharapkan menjadi bagian yang terpadu dari seluruh aktivitas pembangunan yang dilangsungkan sehingga proses dan hasil pembangunan tersebut tetap dapat dilangsungkan dan dinikmati oleh generasi mendatang. Pembangunan berkelanjutan yang memiliki pengertian pembangunan yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat masa kini tanpa mengabaikan kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka merupakan suatu proses perubahan dimana pemanfaatan sumber daya, arah investasi, orientasi pembangunan dan perubahan kelembagaan selalu dalam keseimbangan dan secara sinergis saling memperkuat potensi masa kini maupun masa mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi manusia (Salim, 1997).

Menurut Dahuri (2001), pembangunan berkelanjutan yang merupakan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya, memiliki dimensi ekologis, sosial-ekonomi dan budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan. Dari dimensi ekologis, agar pembangunan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, bahwa setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Selain itu, perlu juga informasi tentang tata guna lahan pesisir yang ada saat ini.

Dalam jangka waktu panjang, pembangunan dan perkembangan Kota Bandar Lampung harus terjamin sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sekaligus terjamin tidak akan timbulnya dampak terhadap lingkungan sekitar. Keberlanjutan pembangunan Kota Bandar Lampung perlu diupayakan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses transformasi lahan kota, penggunaan sumber daya alam, penambahan unsur-unsur

baru dalam media lingkungan, serta dinamika populasi tidak menurunkan dan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan secara struktural.

Dengan demikian, Kota Bandar Lampung perlu diidentifikasi sejauh mana perkembangannya ditinjau dari sudut pandang ekonomi dan bagaimana dampak yang ditimbulkannya terhadap perkembangan kawasan pesisirnya saat ini dan dimasa mendatang sehingga terdapat arahan bagi pembangunan kota yang berkelanjutan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi Kota Bandar Lampung menyangkut kawasan pesisirnya, antara lain:

- Pembuangan sampah dan limbah padat menimbulkan pencemaran kawasan pesisir
- Langkanya air tawar di beberapa tempat di kawasan pesisir
- Pola bangunan yang membelakangi pantai menjadikan suasana lingkungan pantai menjadi kotor.
- Sanitasi pemukiman pesisir belum memadai
- Reklamasi pantai tanpa perencanaan tepat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir seperti terjadinya banjir

Dari isu-isu di atas dapat dirumuskan suatu masalah yaitu apakah perkembangan Kota Bandar Lampung khususnya dalam aspek ekonomi akan berpengaruh buruk terhadap kawasan pesisirnya dimasa mendatang? Sebab, saat ini pun kawasan tersebut telah mengalami berbagai masalah lingkungan. Untuk itu, diperlukan suatu penelitian untuk mengetahui sejauh mana perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perkembangan kawasan pesisir saat ini dan dimasa mendatang sehingga terdapat arahan bagi pembangunan kota yang berkelanjutan.

Dengan demikian, studi ini akan diarahkan pada suatu *research question* berkaitan dengan latar belakang dan permasalahan yang ada, yaitu: **“Sejauh mana**

perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan bagaimana pengaruhnya terhadap perkembangan kawasan pesisir?”

1.3 Tujuan dan Sasaran

1.3.1 Tujuan

Studi ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung terhadap perkembangan kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung.

1.3.2 Sasaran

Untuk mencapai tujuan studi di atas, sasaran yang akan dicapai adalah:

1. Mengidentifikasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan potensi yang dimiliki dan kecenderungan perkembangan yang terjadi dilihat dari aspek fisik, geografis, sosial dan ekonomi.
2. Mengidentifikasi perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dilihat dari aspek fisik dan geografis, sosial, ekonomi, dan tata ruang kawasan
3. Menganalisis kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dengan melihat kualitas lingkungan yang ada saat ini
4. Menganalisis pengaruh perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung terhadap perkembangan kawasan pesisir

1.4 Manfaat Studi

Adapun manfaat dari studi ini adalah sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Bandar Lampung dalam mengarahkan perkembangan Kota Bandar Lampung untuk menjadi Kota yang Berkelanjutan sebagaimana visi Kota Bandar Lampung tahun 2020.

1.5 Ruang Lingkup

1.5.1 Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup materi dalam studi ini meliputi:

1. Kawasan pesisir, yaitu bagian dari suatu wilayah yang secara administratif masuk dalam lingkup kota tetapi memiliki kekhasan pesisir terutama dikaitkan dengan kondisi fisik geografis yang didefinisikan sebagai wilayah peralihan antara laut dan daratan, ke arah darat mencakup daerah yang masih terkena pengaruh percikan air laut atau pasang surut, dan kerarah laut meliputi daerah paparan benua (*continental shelf*).
2. Perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung yang dimaksud adalah perkembangan ekonomi yang akan diidentifikasi melalui potensi ekonomi yang dimiliki dan kecenderungan yang terjadi dilihat dari aspek fisik, geografis, sosial serta ekonomi.
3. Perkembangan kawasan pesisir yang dimaksud adalah perkembangan kawasan pesisir di wilayah perkotaan sebagaimana teori perkembangan kota. Dalam studi ini perkembangan kawasan pesisir dipengaruhi oleh faktor penduduk, sosial, dan ekonomi dari ruang lingkup wilayah kota yang lebih luas, yaitu Kota Bandar Lampung.

1.5.2 Ruang Lingkup wilayah

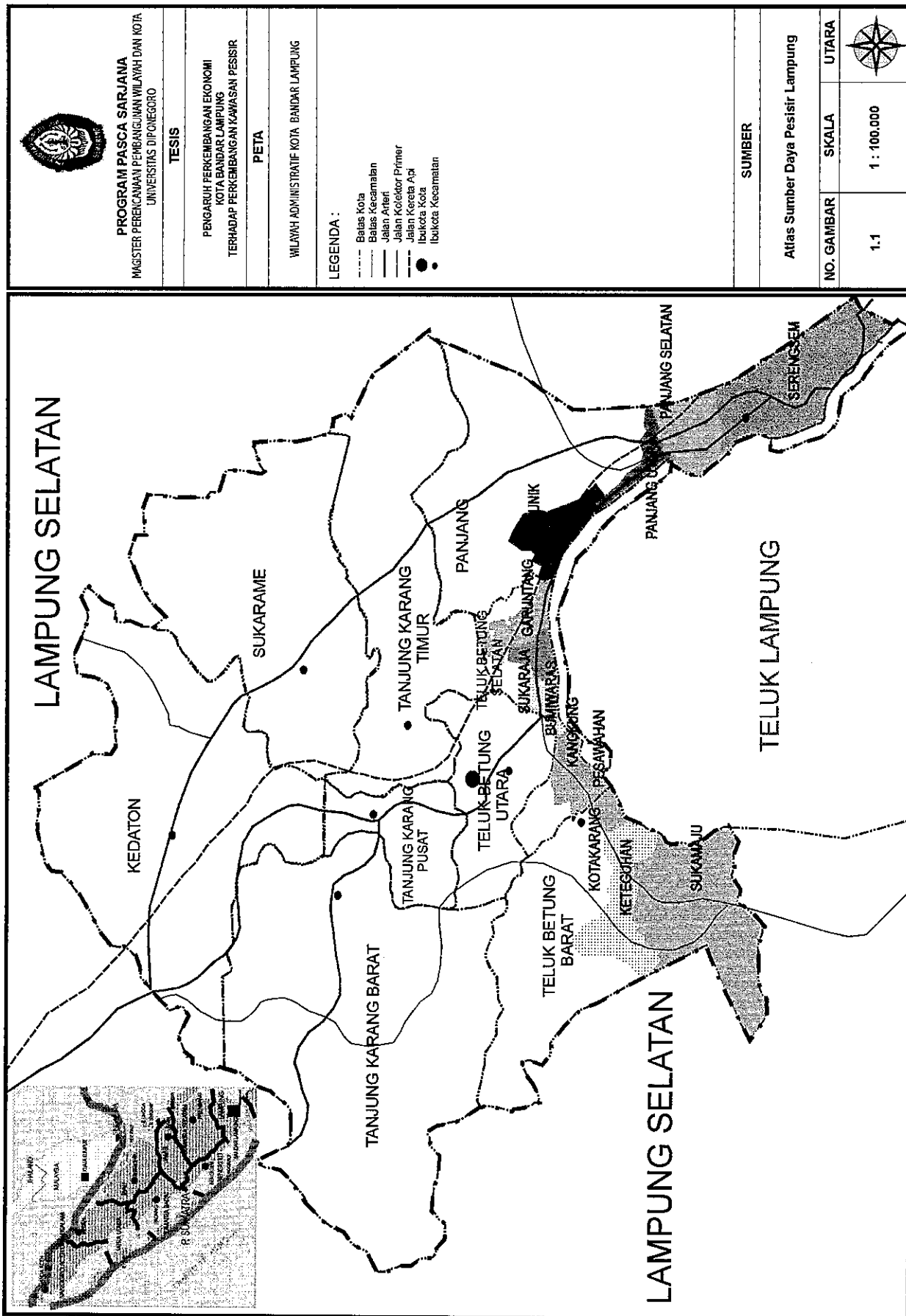
Berdasarkan ketentuan mengenai batas kawasan pesisir yang ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and Planning* atau Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan), ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu kawasan pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Sedangkan batas ke arah darat mencakup batas administratif seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah,

Departemen Dalam Negeri) yang termasuk dalam kawasan pesisir MREP. Dari 84 kelurahan yang terdapat di Kota Bandar Lampung, 12 diantaranya ditetapkan sebagai desa pantai yang berada dalam 3 kecamatan (PKSPL-IPB, 2002).

Berdasarkan ketetapan tersebut, maka secara mikro, ruang lingkup wilayah yang dijadikan objek dalam studi ini adalah kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang secara administratif terletak pada 12 kelurahan/desa pantai, yaitu kelurahan yang menghadap dan langsung berbatasan dengan Teluk Lampung yang tersebar dalam 3 kecamatan, yakni:

1. Kelurahan Srengsem (Kecamatan Panjang)
2. Kelurahan Panjang Selatan (Kecamatan Panjang)
3. Kelurahan Panjang Utara (Kecamatan Panjang)
4. Kelurahan Way Lunik (Kecamatan Panjang)
5. Kelurahan Garuntang (Kecamatan Teluk Betung Selatan)
6. Kelurahan Sukaraja (Kecamatan Teluk Betung Selatan)
7. Kelurahan Bumi Waras (Kecamatan Teluk Betung Selatan)
8. Kelurahan Kangkung (Kecamatan Teluk Betung Selatan)
9. Kelurahan Pesawahan (Kecamatan Teluk Betung Selatan)
10. Kelurahan Kota Karang (Kecamatan Teluk Betung Barat)
11. Kelurahan Keteguhan (Kecamatan Teluk Betung Barat)
12. Kelurahan Sukamaju (Kecamatan Teluk Betung Barat)

Sedangkan secara makro, ruang lingkup wilayah yang diambil dalam studi ini adalah wilayah administratif Kota Bandar Lampung. Sehingga yang dijadikan unit analisis studi adalah kota dan kawasan.



1.6 Kerangka Pemikiran

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Propinsi Lampung. Kota ini berada di Teluk Lampung di bagian selatan Propinsi Lampung. Lokasi ini menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional ditunjang oleh sumber daya yang memadai dan prospek yang dimiliki Propinsi Lampung.

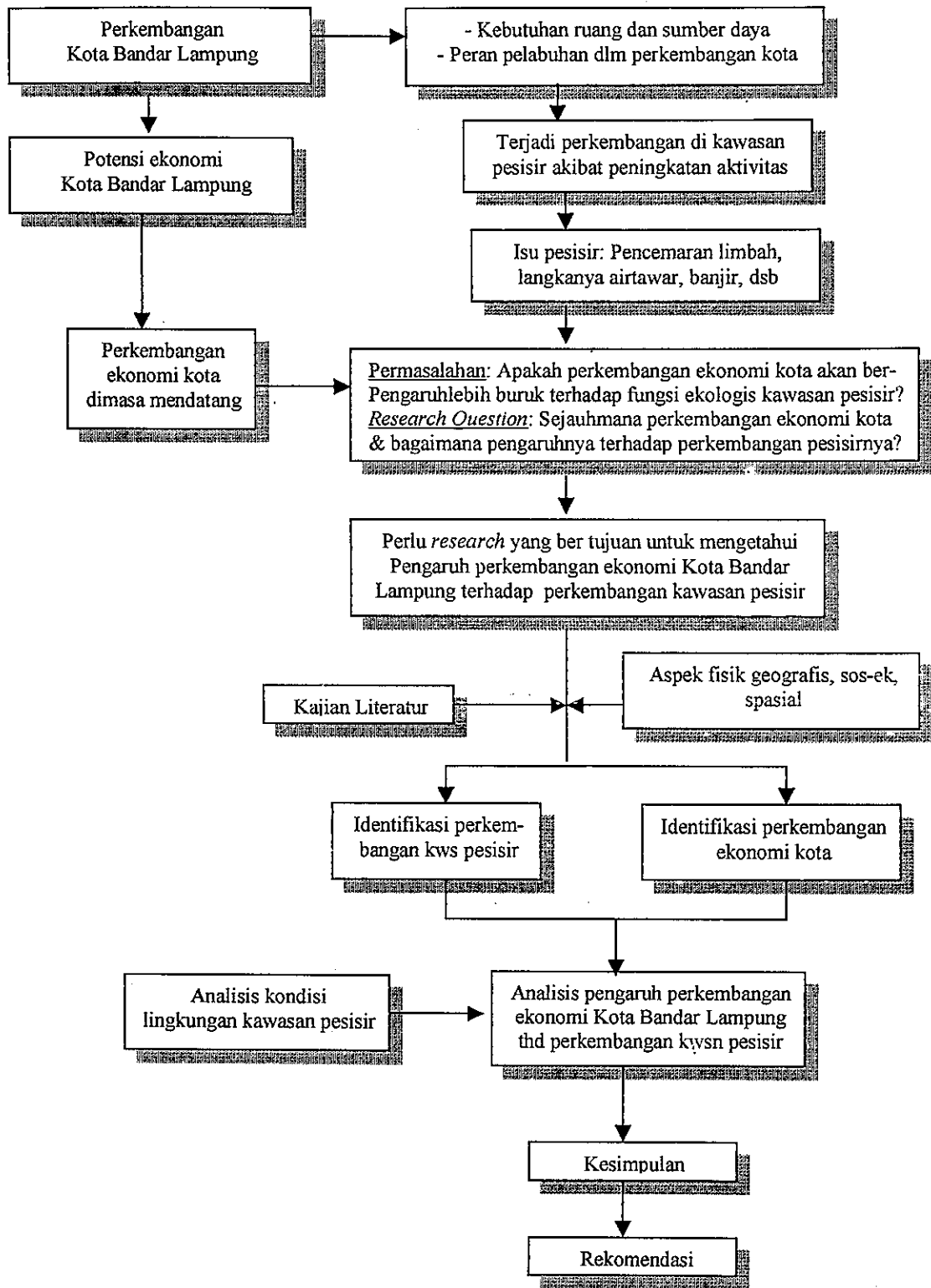
Perkembangan Kota Bandar Lampung yang pesat berakibat pada peningkatan jumlah penduduk dan aktifitasnya, sehingga kebutuhan akan sumber daya dan ruang turut meningkat. Sehingga, tanpa disadari, perkembangan kota mulai bergerak ke arah kawasan pesisir. Selain itu, dengan perannya saat ini sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka keberadaan kawasan pesisir bagi Kota Bandar Lampung sangat penting. Untuk saat ini dan waktu yang akan datang Pelabuhan Panjang menjadi tumpuan perkembangan Kota Bandar Lampung. Dengan demikian, penggunaan lahan di kawasan pelabuhan dan sekitarnya, beberapa diantaranya diarahkan untuk memenuhi peran-peran yang mendukung fungsi Pelabuhan Panjang, seperti menyediakan sarana pelayanan ekspor impor, menyediakan sarana pergudangan.

Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini menjadi bagian dari perkembangan kota yang pesat ditandai dengan ramainya aktifitas di sepanjang wilayah pesisir tersebut, dari permukiman yang padat, wisata pantai, hingga sektor industri. Namun sejauh ini, masih merupakan suatu pertanyaan apakah peningkatan aktivitas di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tersebut akan mengganggu fungsi ekologis kawasan dan dengan adanya potensi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung, apakah akan berdampak lebih buruk dimasa mendatang?

Untuk mengarahkan perkembangannya dimasa mendatang, sebuah kota yang memiliki prospek perkembangan yang pesat memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan, yang mampu menampung perkembangan kota dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan kota dan masyarakatnya. Dalam jangka waktu panjang, pembangunan dan perkembangan Kota Bandar Lampung harus terjamin sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai sekaligus terjamin tidak akan timbulnya dampak terhadap lingkungan sekitar. Keberlanjutan pembangunan Kota Bandar Lampung perlu diupayakan sehingga dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh proses transformasi lahan kota, penggunaan sumber daya alam, penambahan unsur-unsur baru dalam media lingkungan, serta dinamika populasi tidak menurunkan dan mengakibatkan degradasi kualitas lingkungan secara struktural.

Dengan demikian, Kota Bandar Lampung perlu diidentifikasi sejauh mana perkembangan ekonominya dan bagaimana pengaruh yang ditimbulkannya terhadap perkembangan kawasan pesisirnya dimasa mendatang sehingga terdapat arahan bagi pembangunan kota yang berkelanjutan.

Untuk itu diperlukan analisis-analisis untuk mengetahui perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan bagaimana pengaruhnya terhadap kawasan pesisir kota tersebut dengan terlebih dahulu mengidentifikasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan potensi ekonomi yang dimiliki dan kecenderungan perkembangan yang terjadi dilihat dari aspek fisik, geografis, sosial, dan ekonomi, mengidentifikasi perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dilihat dari aspek fisik dan geografis, sosial, ekonomi, serta tata ruang kawasan, serta menganalisis kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dengan melihat kualitas lingkungan yang ada saat ini.



GAMBAR 1.2
KERANGKA PEMIKIRAN

1.7 Metodologi Penelitian

1.7.1 Pendekatan Studi

Pendekatan yang dilakukan dalam studi ini adalah pendekatan ekonomi-lingkungan disamping pendekatan secara deskriptif. Pendekatan secara deskriptif diartikan sebagai suatu prosedur penelitian untuk mengangkat fakta, keadaan, variabel, dan fenomena-fenomena yang terjadi saat sekarang (ketika penelitian berlangsung) dan menyajikan apa adanya (Subana dan Sudrajat, 2001).

1.7.2 Kerangka Analisis

Beberapa analisis yang akan dilakukan dalam upaya menjawab permasalahan yang diangkat dalam studi ini adalah:

1. Analisis perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dalam kaitannya dengan potensi ekonomi yang dimiliki dan kecenderungan perkembangan yang terjadi dilihat dari aspek fisik, geografis, sosial, dan ekonomi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

2. Analisis perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung

Analisis ini bertujuan untuk mengidentifikasi perkembangan kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung ditinjau dari faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan suatu kota, yaitu faktor fisik dan geografis, sosial kependudukan, dan sosial ekonomi. Analisis dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif.

3. Analisis kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung. Analisis ini bertujuan untuk mengetahui kondisi lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dengan melihat kualitas lingkungan yang ada. Analisis dilakukan secara

deskriptif kualitatif berdasarkan data primer yang diperoleh dari kuisisioner yang disebarkan pada responden.

5. Analisis pengaruh perkembangan Kota Bandar Lampung terhadap perkembangan kawasan pesisir. Analisis dilakukan dengan metode regresi linear sederhana dengan variabel-variabel berupa komponen terukur dari faktor-faktor yang mempengaruhi maupun menjadi indikasi perkembangan kota dan perkembangan kawasan pesisir sebagai wujud fisik perkembangan ekonomi selama periode 9 tahun terakhir yang secara lengkap dapat dilihat pada uraian berikutnya. Kerangka analisis studi selengkapny dapat dilihat pada Gambar 1.3.

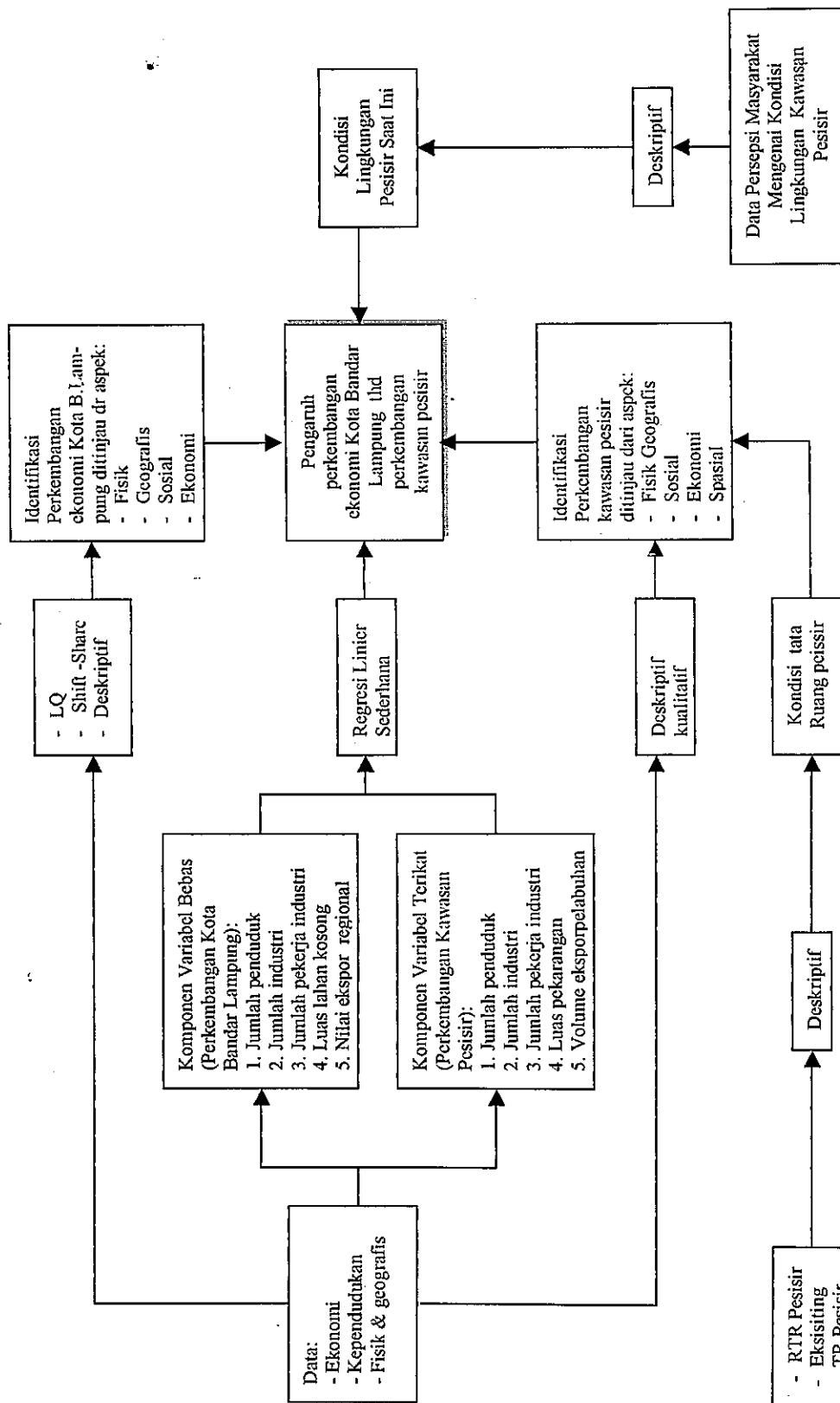
1.7.3 Data

1.7.3.1 Data Primer

Dalam studi ini data primer diperoleh dari kuisisioner dan observasi (pengamatan). Penggunaan metode kuisisioner dimaksudkan untuk menghimpun informasi atau keterangan mengenai hal-hal yang diketahui responden menurut apa yang ia alami atau ia ketahui. Sedangkan observasi yang dilakukan adalah observasi langsung, yaitu cara pengumpulan data berdasarkan pengamatan yang menggunakan mata atau telinga secara langsung tanpa melalui alat bantu yang terstandar (Subana dan Sudrajad, 2001). Beberapa hal yang berkaitan dengan pengumpulan data primer adalah sebagai berikut:

1. Teknik sampling

Sampling yang digunakan dalam studi ini adalah jenis sampling acak (random) sederhana, yaitu cara pengambilan sampel yang besarnya n dari suatu populasi terbatas yang besarnya N sedemikian sehingga tiap unit sampel memiliki peluang yang sama untuk dipilih (Subana dan Sudrajad, 2001). Sedangkan yang menjadi populasi dalam studi ini adalah masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung.



GAMBAR 1.3
KERANGKA ANALISIS

2. Penentuan besar sampel

Untuk menentukan besarnya ukuran sampel cara random sederhana digunakan rumus kekeliruan untuk pendekatan proporsi populasi dengan asumsi populasi tidak terbatas atau besar, yaitu:

$$n = \frac{Z^2 \cdot p (1-p)}{J^2} \quad (1), \text{ dimana:}$$

n = Ukuran populasi

p = Perbandingan antara subjek yang menjadi objek dengan seluruh subjek. Bila p tidak diketahui maka nilai $p = 0,5$

J = Setengah jarak kekeliruan terhadap rata-rata hitung yang dapat divariansi

Z = Derajat konfidensi terpilih = distribusi t

Dengan mengambil derajat kepercayaan 95% dan kekeliruan 5% untuk perbandingan populasi yang sebenarnya dari seluruh masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung, maka perhitungan besarnya sampel adalah:

$p = 0,5$; $j = 5\%$; $Z = 95\% = 1,96$ maka:

$$n = \frac{(1,96)^2 (0,5) (1 - 0,5)}{(0,05)^2} = 192,08$$

Dengan demikian besar sampel yang akan digunakan dalam studi ini adalah 192 sampel dengan pembagian per kelurahan sebagai berikut:

1. Kelurahan Srengsem (Kecamatan Panjang) : 16 sampel
2. Kelurahan Panjang Selatan (Kecamatan Panjang) : 16 sampel
3. Kelurahan Panjang Utara (Kecamatan Panjang) : 16 sampel
4. Kelurahan Way Lunik (Kecamatan Panjang) : 16 sampel
5. Kelurahan Garuntang (Kecamatan Teluk Betung Selatan) : 16 sampel
6. Kelurahan Sukaraja (Kecamatan Teluk Betung Selatan) : 16 sampel

7. Kelurahan Bumi Waras (Kecamatan Teluk Betung Selatan) : 16 sampel
8. Kelurahan Kangkung (Kecamatan Teluk Betung Selatan) : 16 sampel
9. Kelurahan Pesawahan (Kecamatan Teluk Betung Selatan): 16 sampel
10. Kelurahan Kota Karang (Kecamatan Teluk Betung Barat) : 16 sampel
11. Kelurahan Keteguhan (Kecamatan Teluk Betung Barat) : 16 sampel
12. Kelurahan Sukamaju (Kecamatan Teluk Betung Barat) : 16 sampel

Jumlah sampel yang sama pada tiap-tiap kelurahan pesisir didasarkan pada pertimbangan bahwa sampel yang diambil adalah masyarakat yang bertempat tinggal di sepanjang pantai namun terdapat kesulitan dalam menentukan presentasi jumlah masyarakat yang benar-benar tinggal di sempadan pantai tersebut.

3. Penentuan variabel

Berdasarkan kajian literatur yang telah dilakukan (dibahas di dalam BAB II) diketahui variabel-variabel yang mengindikasikan penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir yaitu:

- Perusakan dan pencemaran lingkungan
- Penurunan daya dukung lingkungan wilayah pesisir
- Penurunan mutu lingkungan wilayah pesisir
- Penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir

Lebih lanjut, variabel-variabel tersebut akan dijabarkan dalam sub-sub variabel yang selengkapnya dapat dilihat pada Tabel I.1. Hasil pengumpulan data akan di tabelkan dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mempertajam analisis akhir studi ini.

TABEL I.1
VARIABEL PENURUNAN KUALITAS LINGKUNGAN KAWASAN PESISIR

NO	VARIABEL	KOMPONEN VARIABEL	PENGUKURAN VARIABEL
1	Penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir	Keberadaan populasi bakau	<ul style="list-style-type: none"> • Banyak • Sedikit • Hampir tidak ada • Tidak ada lagi
		Keberadaan terumbu karang	
		Keberadaan padang lamun (rumpun laut)	
2	Perusakan dan pencemaran lingkungan	<u>Pencemaran air:</u> Kemudahan mendapatkan air	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat susah mendapatkannya • Susah mendapatkannya • Mudah mendapatkannya • Sangat Mudah mendapatkannya
		Warna air	<ul style="list-style-type: none"> • Agak coklat • Kuning • Agak kuning • Jernih
		Bau air	<ul style="list-style-type: none"> • Berbau tanpa dicium langsung • Berbau kalau dicium langsung • Agak berbau kalau dicium langsung • Tidak berbau
		Rasa air	<ul style="list-style-type: none"> • Asin • Payau • Agak payau • Tawar
		Kekeruhan air	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat keruh • Agak keruh • Bening • Sangat bening
		<u>Pencemaran Udara:</u> Debu di udara	<ul style="list-style-type: none"> • Debu selalu ada dan mengganggu • Debu selalu ada tapi tidak mengganggu • Ada sedikit debu • Tidak terlihat adanya debu
		Bau	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat tidak enak • Tidak enak • Bau tapi tidak mengganggu • Tidak berbau
		Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat bising • Bising • Tidak bising • Senyap/sepi
		3	Penurunan mutu lingkungan wilayah pesisir

		Kondisi permukiman	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat buruk • Buruk • Sedang • Baik
4	Penurunan daya dukung lingkungan wilayah pesisir	Frekuensi banjir	<ul style="list-style-type: none"> • Sangat sering • Sering • Jarang • Tidak pernah

1.7.3.2 Data Sekunder

Untuk mendapatkan data sekunder digunakan teknik dokumentasi, yaitu suatu teknik untuk mendapatkan data dengan cara mengumpulkan, mempelajari, dan mencatat dokumen-dokumen yang ada mengenai perencanaan, peraturan, dan lain sebagainya berkaitan dengan masalah yang diteliti sebagai bahan analisis. Jenis data sekunder dapat dilihat pada Tabel I.2.

1.7.4 Teknik Analisis

1.7.4.1 Analisis Kuantitatif

Data-data kuantitatif dalam bentuk angka dianalisis menggunakan analisis perhitungan agar hasil olahan data tersebut dapat menghasilkan suatu temuan atau informasi yang diinginkan. Hasil akhir dari analisis ini perlu diperkuat dengan interpretasi dan deskripsi secara kualitatif. Beberapa analisis kuantitatif yang dilakukan adalah:

1. Analisis *Location Quotient*

Dasar pemikiran teknik ini adalah teori *economic base* yaitu perekonomian sektor basis/andalan dan perekonomian sektor nonbasis. Analisis ini digunakan untuk menentukan sektor-sektor basis ekonomi yang layak untuk dikembangkan di suatu wilayah/kota. Permintaan dari luar wilayah/kota akan mempengaruhi sektor basis dan nonbasis. Sektor basis yang ada di suatu daerah akan memberikan kontribusi berupa peningkatan pendapatan daerah. Dengan demikian sektor basis merupakan penggerak

TABEL I.2
DATA SEKUNDER

Wilayah Studi	Kelompok Data	Kebutuhan Data	Unit Kajian	Tahun	Sumber	Tujuan Penggunaan
Bandar Lampung	Fisik dan Geografis	<ul style="list-style-type: none"> Letak Bandar Lampung dalam skala nasional Letak Bandar Lampung dalam skala regional Kondisi alam Luaslahan kosong (diperuntukan/tidak diusahakan) 	Kota	Terbaru	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	Analisis prospek Kota
		<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Laju pertumbuhan penduduk Kepadatan penduduk 		Terbaru	<ul style="list-style-type: none"> Bappeda 	Analisis prospek Kota dan Analisis dampak prospek kota thd perkembangan kawasan pesisir
Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung	Fisik dan geografis	<ul style="list-style-type: none"> Letak geografis pesisir Bandar Lampung Kondisi alam RTRK kawasan pesisir Luas pekarangan 	Kawasan	Terbaru	Bappeda /BPN	Analisis perkembangan kawasan pesisir
				1993 - 2001	BPS	<ul style="list-style-type: none"> Analisis perkembangan kawasan pesisir
				1993 - 2001	BPS	<ul style="list-style-type: none"> Analisis perkembangan kawasan pesisir
Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung	Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Nilai PDRB Propinsi Lampung atas harga konstan Nilai PDRB Kota Bandar Lampung atas harga konstan Jumlah industri Jumlah tenaga kerja di sektor industri Nilai ekspor barang dan jasa Propinsi Lampung 	Kota	1993 - 2001	<ul style="list-style-type: none"> BPS 	Analisis prospek Kota Bandar Lampung
				1993 - 2001	<ul style="list-style-type: none"> BPS 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis dampak prospek kota thd perkembangan kawasan pesisir
				1993 - 2001	<ul style="list-style-type: none"> Deperindag Deperindag BPS 	<ul style="list-style-type: none"> Analisis dampak prospek kota thd perkembangan kawasan pesisir

								Analisis perkembangan kawasan pesisir dan Analisis dampak prospek kota thd perkembangan kawasan pesisir
Kependudukan	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah penduduk Kepadatan penduduk 	Kelurahan	1993 - 2001	Kelurahan/ kecamatan				Analisis perkembangan kawasan pesisir dan Analisis dampak prospek kotathdperkembangan kawasan pesisir
Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah industri Jumlah tenaga kerja di sektor industri Volume ekspor melalui pelabuhan 	Kelurahan	1993 - 2001	Kelurahan				

utama, dimana setiap perubahan yang terjadi akan memberikan efek menyebar terhadap sistem perekonomian wilayah.

Satuan yang digunakan sebagai ukuran untuk menghitung koefisien LQ dapat berupa satuan jumlah pekerja, hasil produksi, atau satuan lainnya. Dalam studi ini digunakan satuan hasil produksi berupa data PDRB untuk menghitung LQ. Persamaan matematisnya adalah (Budiharsono, 2001):

$$LQ = \frac{S_i / S}{N_i / N} \quad (2)$$

Keterangan:

- Si = jumlah produksi sektor ekonomi (i) di Kota Bandar Lampung
- S = jumlah produksi sektor ekonomi di Kota Bandar Lampung
- Ni = jumlah produksi sektor ekonomi (i) di Lampung
- N = jumlah produksi sektor ekonomi Lampung

Penafsiran dari analisis LQ adalah sebagai berikut:

- $LQ > 1$, menyatakan Kota Bandar Lampung memiliki potensi ekspor dalam subsektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi tinggi dari tingkat Propinsi Lampung
- $LQ < 1$, menyatakan Kota Bandar Lampung tidak memiliki potensi ekspor dalam subsektor tersebut (kecenderungan impor) dan tingkat spesialisasinya lebih rendah dari tingkat
- $LQ = 1$, menyatakan Kota Bandar Lampung mencukupi dalam subsektor tersebut dan memiliki tingkat spesialisasi yang sama dengan Propinsi Lampung

2. Analisis *Shift and Share*

Metode ini digunakan untuk mengetahui kinerja perekonomian daerah, pergeseran struktur, posisi relatif sektor-sektor ekonomi dan indentifikasi sektor unggulan yang terdapat dalam wilayah / daerah yang dihitung berdasarkan data PDRB maupun tenaga kerja dalam dua satuan waktu (Budiharsono, 2001).

Secara garis besar analisis ini dibagi dalam tiga bagian kelompok besar, yaitu Komponen Pertumbuhan Wilayah (KPW), Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) dan Komponen Pergeseran atau Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK).

a. Komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW).

KPW adalah suatu komponen yang berfungsi untuk mengukur kinerja ekonomi pada perekonomian acuan, dalam studi ini yang menjadi wilayah acuan adalah Propinsi Lampung. Hal ini berarti bahwa Kota Bandar Lampung tumbuh karena dipengaruhi oleh kebijakan Propinsi Lampung secara umum. Untuk menghitung Komponen Pertumbuhan Wilayah ini digunakan Formula sebagai berikut:

$$KPW = \left(\frac{Y^*}{Y} - 1 \right) \quad (3)$$

Keterangan :

- KPW = Komponen Pertumbuhan Wilayah
 Y* = Indikator ekonomi Propinsi Lampung akhir tahun kajian.
 Y = Indikator ekonomi Propinsi Lampung awal tahun kajian.

Indikator ekonomi yang digunakan dalam formula ini merupakan jumlah total nilai PDRB dari setiap sektor perekonomian yang berada dalam daerah hitung.

b. Komponen Pertumbuhan Proporsinal (KPP).

Komponen ini merupakan suatu komponen yang digunakan untuk mengukur perbedaan sektor ekonomi acuan, yaitu Propinsi Lampung, dengan pertumbuhan agregat. Jika hasil dari perhitungan ini bernilai positif, maka berarti sektor tersebut berkembang dalam perekonomian Propinsi Lampung. Sebaliknya jika negatif maka sektor tersebut dianggap mempunyai kinerja yang menurun.

Untuk menghitung Komponen Pertumbuhan Proporsional digunakan Formula sebagai berikut:

$$KPP = \left(\frac{Y_i'}{Y_i} - \frac{Y^*}{Y} \right) \quad (4)$$

Keterangan :

- Y_i' = Indikator ekonomi Propinsi Lampung sektor i akhir tahun kajian
- Y_i = Indikator ekonomi Propinsi Lampung sektor i awal tahun kajian
- Y^* = Indikator ekonomi Propinsi Lampung akhir tahun kajian.
- Y = Indikator ekonomi Propinsi Lampung awal tahun kajian.

c. Komponen Pergeseran /Pertumbuhan Pangsa Wilayah (KPK).

Komponen pergeseran / pertumbuhan pangsa pasar adalah suatu komponen yang digunakan untuk mengukur kinerja sektor-sektor lokal terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian yang berada pada daerah acuan. Dalam hal ini, sektor-sektor lokal adalah sektor-sektor yang terdapat di Kota Bandar Lampung terhadap sektor-sektor yang sama pada perekonomian di Propinsi Lampung. Apabila komponen ini memiliki nilai positif, maka dapat diambil kesimpulan bahwa daya saing sektor lokal Kota Bandar Lampung meningkat dibandingkan dengan sektor yang sama pada ekonomi Propinsi Lampung. Sedangkan apabila bertanda negatif maka akan terjadi sebaliknya.

Untuk menghitung Komponen Pergeseran/ Pertumbuhan Pangsa Pasar (KPK) maka digunakan formula sebagai berikut :

$$KPK = \left(\frac{y_i'}{y_i} - \frac{Y_i^*}{Y_i} \right) \quad (5)$$

Keterangan :

- Y_i' = Indikator ekonomi Propinsi Lampung sektor i akhir tahun kajian
- Y_i = Indikator Propinsi Lampung ekonomi Propinsi Lampung sektor i awal tahun kajian
- y_i^* = Indikator ekonomi Kota Bandar Lampung sektor i akhir tahun kajian
- y = Indikator ekonomi Kota Bandar Lampung sektor i awal tahun kajian

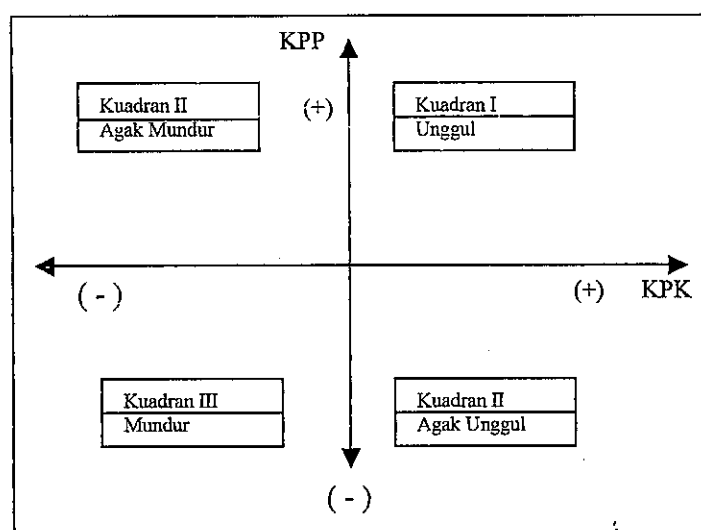
Pertumbuhan Ekonomi Kota (PEK) adalah merupakan penjumlahan dari komponen-komponen Pertumbuhan Wilayah Acuan (KPW), Komponen Pertumbuhan

Proporsional dan Komponen Pergeseran / Pertumbuhan Pangsa Pasar, yang di formulasikan sebagai berikut:

$$PEK = KPW + KPP + KPK \quad (6)$$

Pergeseran Netto (PN) dihitung dengan menjumlahkan Komponen Pertumbuhan Proporsional (KPP) dengan Komponen Pertumbuhan / Pergeseran Pangsa Pasar (KPK).

Setelah meninjau pertumbuhan kinerja ekonomi, daya saing, dan maju atau kurang majunya sektor-sektor, maka dilakukan pula identifikasi sektor-sektor strategis yang memiliki keunggulan guna dikembangkan lebih lanjut. Untuk melihat sektor-sektor yang memiliki keunggulan, maka dapat dilihat diagram pada Gambar 1.4 yang didapat berdasarkan penempatan nilai KPK dan KPP dari tiap sektor.



GAMBAR 1.4
DIAGRAM PENENTUAN SEKTOR UNGGULAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Sumber: Budiharsono, 2001

3. Analisis Regresi Linear Sederhana

Analisis regresi adalah suatu teknik statistik parametrik yang dapat digunakan untuk (1) melakukan peramalan atau prediksi besarnya variasi yang terjadi pada variabel Y

berdasarkan variabel X, (2) menentukan bentuk hubungan antara variabel X dengan variabel Y, (3) menentukan arah dan besarnya koefisien korelasi antara variabel X dengan variabel Y.

Dalam analisis regresi, data yang digunakan pada variabel X dan Y harus berbentuk data interval atau rasio. Sebagai alat prediksi, dalam analisis regresi akan ditemukan suatu persamaan untuk menentukan besarnya variasi yang terjadi pada variabel Y (kriterium) berdasarkan data yang terdapat pada variabel X (prediktor).

Bentuk hubungan analisis regresi yang diharapkan dalam studi ini adalah bentuk hubungan linear yang ditandai oleh adanya kesamaan perubahan variasi baik berupa penurunan maupun kenaikan yang terjadi pada kriterium dan prediktor. Artinya, peningkatan variasi pada kriterium diikuti secara konsisten oleh peningkatan pada prediktor, demikian juga penurunannya (Subana dan Sudrajad, 2001).

Bila ditinjau dari jumlah variabel bebas (prediktor X) yang digunakan dalam penelitian, analisis regresi linear yang digunakan dalam studi ini adalah analisis regresi linear sederhana yaitu hanya memiliki satu prediktor.

Analisis regresi linear sederhana dirumuskan dalam persamaan:

$$Y = a + Bx \quad (7)$$

Dengan :

$$a = \frac{\sum Y \cdot \sum X^2 - \sum X \cdot \sum XY}{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

$$b = \frac{N \cdot \sum XY - \sum X \cdot \sum Y}{N \cdot \sum X^2 - (\sum X)^2}$$

Untuk menguji/mengetahui status linear tidaknya suatu distribusi data penelitian dilakukan langkah-langkah sebagai berikut (Subana dan Sudrajad, 2001):

- Membuat pengelompokan prediktor (variabel X) yang memiliki nilai yang sama dengan tetap memperhatikan pasangan kriteriumnya (variabel Y)
- Mempersiapkan tabel kerja sebagaimana contoh berikut:

X	K	N _i	X ²	Y	Y ²	XY
4	1	1	16	4	16	16
5	2	2	25	4	16	20
5			25	5	25	25
6	3	2	36	6	36	36
6			36	5	25	30
7	4	3	49	6	36	42
7			49	7	49	49
7			49	6	36	42
dst	dst	dst	dst	dst	dst	dst
Jumlah						

- Menghitung kuadrat total (Jk_t), regresi a (Jk_a), regresi b (Jk_b), residu (Jk_{res}), galat/kesalahan (Jk_g), ketidakcocokan (Jk_{tc}) dengan rumus masing-masing:

$$a. Jk_t = \sum Y^2 \quad (8)$$

$$b. Jk_a = \frac{(\sum Y^2)}{N} \quad (9)$$

$$c. Jk_b = b. (\sum XY - \frac{\sum X. \sum Y}{N}) \quad (10)$$

$$d. Jk_{res} = Jk_t - Jk_a - Jk_b \quad (11)$$

$$e. Jk_g = \sum (Y - \frac{Y^2}{n_i}) \quad (12)$$

$$f. Jk_{tc} = Jk_{res} - Jk_g \quad (13)$$

- Menghitung derajat kebebasan galat (db_g) dan ketidakcocokan (db_{tc})

$$a. db_g = N - K \quad (14)$$

$$b. db_{tc} = K - 2 \quad (15)$$

- Menghitung jumlah rata-rata kuadrat ketidakcocokan (Rk_{tc}) dan galat (Rk_g)

$$a. Rk_{tc} = \frac{Jk_{tc}}{db_{tc}} \quad (16)$$

$$b. Rk_g = \frac{Jk_g}{db_g} \quad (17)$$

- Menghitung rasio F, $F = \frac{Rk_{tc}}{Rk_g} \quad (18)$

- Membandingkan harga F empirik (hasil perhitungan) dengan F teoritik yang terdapat dalam tabel. Jika F empirik lebih kecil daripada F teoritik, berarti distribusi data yang diteliti memiliki bentuk yang linear sedangkan jika F empirik lebih besar dari F teoritik maka distribusi data yang diteliti tidak berbentuk linear.

Analisis regresi linear sederhana yang dilakukan dalam studi adalah analisis pengaruh perkembangan Kota Bandar Lampung terhadap perkembangan kawasan pesisir. Dalam analisis ini perkembangan Kota Bandar Lampung merupakan variabel bebas (variabel X) dan perkembangan kawasan pesisir merupakan variabel terikat (variabel Y). Masing-masing variabel tersebut dibentuk oleh komponen-komponen terukur berupa faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan kota sebagai wujud fisik perkembangan ekonomi kota selama 9 tahun terakhir, yaitu:

- Variabel X: Perkembangan Kota Bandar Lampung, terdiri dari komponen:
 - Jumlah penduduk
 - Jumlah industri
 - Jumlah pekerja di sektor industri
 - Luas lahan kosong (diperuntukan & tidak diusahakan)
 - Volume ekspor regional (Propinsi Lampung)

- Variabel Y : Perkembangan kawasan pesisir, terdiri dari komponen:
 - Jumlah penduduk
 - Jumlah industri
 - Jumlah pekerja di sektor industri
 - Luas pekarangan
 - Volume ekspor melalui pelabuhan

Alasan digunakannya tahun kajian selama 9 tahun yang dimulai dari tahun 1993 karena berdasarkan harga konstan tahun 1993 yang menjadi acuan nilai PDRB yang dipakai. Sedangkan akhir tahun kajian digunakan tahun 2001 karena data-data tahun 2002 belum tersedia.

Data sekunder yang akan dianalisis sebelumnya diskalakan dan dibobotkan lebih dahulu. Variabel yang diteliti merupakan variabel komposit dimana skor subjek tidak hanya berasal dari satu sumber saja melainkan ditentukan oleh gabungan dari beberapa skor. Dalam hal ini, setiap komponen dari variabel yang diteliti akan memberikan bobot tersendiri, yang mungkin tidak sama besarnya dalam menentukan skor subjek (nilai variabel). Bobot relatif suatu komponen ditentukan besarnya oleh banyaknya sumbangan komponen tersebut dalam menentukan skor akhir. Besarnya bobot relatif tersebut dapat ditentukan oleh banyaknya aitem suatu komponen atau ditentukan oleh konsep dan teori yang mendasari penyusunan pengukuran variabel bersangkutan. Dalam analisis yang akan dilakukan, bobot tiap komponen dianggap sama karena secara teori tidak ada penjelasan mengenai komponen mana yang lebih mempengaruhi atau mengindikasikan perkembangan kota. Sedangkan lebih banyaknya komponen dari aspek ekonomi didasarkan atas pertimbangan kemudahan data dan pendekatan yang digunakan dalam metodologi

penelitian, yaitu pendekatan ekonomi. Pengukuran variabel data sekunder lebih jelas dapat dilihat pada Tabel I.3.

TABEL I.3
PENGUKURAN VARIABEL PENGARUH PERKEMBANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

VARIABEL BEBAS (X)	KOMPONEN VARIABEL	BOBOT (%)
Perkembangan Kota Bandar Lampung	Jumlah penduduk	20
	Jumlah industri	20
	Jumlah pekerja di sektor industri	20
	Luas lahan kosong (diperuntukkan & tidak diusahakan)	20
	Volume ekspor regional	20
VARIABEL TERIKAT (Y)	KOMPONEN VARIABEL	BOBOT (%)
Perkembangan kawasan pesisir	Jumlah penduduk	20
	Jumlah industri	20
	Jumlah pekerja di sektor industri	20
	Luas pekarangan	20
	Volume ekspor melalui pelabuhan	20

Langkah selanjutnya dari penggunaan analisis regresi linear sederhana ini adalah sebagai berikut (Subana dan Sudrajad, 2001):

- Menentukan kesalahan dasar ramalan (residu) dengan rumus:

$$\text{Residu} = \Sigma y^2 - \frac{(\Sigma xy)^2}{\Sigma x^2} \quad (19), \quad \text{dimana:}$$

$$\Sigma y^2 = \Sigma Y^2 - \frac{(\Sigma Y^2)}{N} \quad (20)$$

$$\Sigma x^2 = \Sigma X^2 - \frac{(\Sigma X)^2}{N} \quad (21)$$

$$\Sigma xy = \Sigma XY - \frac{\Sigma X \cdot \Sigma Y}{N} \quad (22)$$

Apabila harga residu tinggi maka kesalahan dasar ramalan tinggi, dan sebaliknya apabila residu rendah maka dasar ramalan memiliki kesalahan yang rendah.

- Uji signifikan, yaitu mencari taraf keberartian dari regresi yang digunakan sebagai alat untuk menyimpulkan atau dasar ramalan terhadap variabel-variabel penelitian. Untuk menghitung signifikansi persamaan regresi digunakan rumus analisis varian (anova) yang akan menghasilkan harga F dengan langkah-langkah :

- Menghitung jumlah kuadrat regresi (Jk_{reg}) dan residu (Jk_{res}) :

$$Jk_{reg} = \frac{(\Sigma xy)^2}{\Sigma x^2} \quad (23)$$

$$Jk_{res} = y^2 - \frac{(\Sigma xy)^2}{\Sigma x^2} \quad (24)$$

- Menghitung derajat kebebasan regresi (db_{reg}) dan residu (db_{res})

$$db_{reg} = m (\Sigma \text{ prediktor}) \quad (25)$$

$$db_{res} = N - 2 \quad (26)$$

- Menghitung rata-rata kuadrat regresi (Rk_{reg}) dan residu (Rk_{res})

$$Rk_{reg} = \frac{Jk_{reg}}{db_{reg}} \quad (27)$$

$$Rk_{res} = \frac{Jk_{res}}{db_{res}} \quad (28)$$

- Menghitung harga F regresi

$$F_{\text{reg}} = \frac{Rk_{\text{reg}}}{Rk_{\text{res}}} \quad (29)$$

- Melakukan uji signifikansi, yaitu dengan membandingkan harga F empirik dengan F teoritik yang terdapat dalam tabel nilai-nilai F. Bila harga F empirik lebih besar dari harga F teoritik maka harga F regresi yang ditemukan signifikan, yaitu dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel kriterium (Y) berdasarkan variabel prediktor (X).
- Mencari hubungan/korelasi antara variabel prediktor (X) dengan kriterium (Y) dengan menggunakan teknik korelasi Karl Pearson yang dikenal dengan korelasi *Product Moment*, yaitu dengan rumus:

$$R = \sqrt{\frac{b \cdot \Sigma xy}{\Sigma y^2}} \quad (30)$$

1.7.4.2 Analisis kualitatif

Analisis kualitatif dilakukan dengan pendekatan deskriptif yaitu dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul, antara lain dengan cara:

- Mendeskripsikan
- Menginterpretasikan kondisi atau hubungan yang ada
- Memperhatikan:
 - pendapat yang sedang tumbuh
 - proses yang sedang berlangsung
 - kecenderungan yang tengah berkembang

sehingga data yang ada dapat ditafsirkan serta disimpulkan.

Dalam studi ini, analisis deskriptif kualitatif secara umum digunakan pada semua analisis tetapi secara khusus digunakan pada analisis perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung, analisis perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, dan analisis kondisi lingkungan kawasan pesisir.

1.7 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan tesis yang berjudul “Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir” ini adalah sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi latar belakang perlunya dilakukan studi mengenai perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan pengaruhnya terhadap kawasan pesisir; rumusan masalah, tujuan, sasaran, manfaat studi, ruang lingkup materi dan wilayah, kerangka pemikiran. Diuraikan juga metodologi penelitian yang digunakan meliputi: pendekatan studi, kerangka analisis, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis.

Bab II Perkembangan Kawasan Pesisir dalam Pembangunan Kota Berkelanjutan

Pada bab ini dikemukakan teori-teori serta referensi lainnya yang mendukung pelaksanaan studi dan dapat menjawab secara teoritis permasalahan yang diangkat meliputi teori perkembangan kota dan faktor-faktor yang mempengaruhinya, teori dan literatur yang berkenaan dengan pembangunan kota berkelanjutan, peran kawasan pesisir dalam perkembangan kota, serta teori mengenai pesisir itu sendiri.

Bab III Perkembangan Kota dan Kawasan Pesisir Bandar Lampung

Bab ini menggambarkan kondisi secara umum Kota Bandar Lampung sebagai wilayah studi makro dan kondisi kawasan pesisirnya sebagai wilayah studi mikro ditinjau dari aspek fisik dan geografis, sosial kependudukan, ekonomi, dan tata ruang.

Bab IV Analisis Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir

Dalam bab ini dilakukan analisis- analisis baik secara kuantitatif maupun kualitatif yang meliputi: analisis fisik dan geografis, analisis sosial kependudukan, analisis perekonomian dan tata ruang pada wilayah studi makro dan mikro untuk mengidentifikasi perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, analisis kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung, serta analisis dampak perkembangan Kota Bandar Lampung terhadap perkembangan kawasan pesisir.

Bab V Kesimpulan dan Rekomendasi

Bab ini memuat suatu temuan studi dari penelitian yang dilakukan sekaligus memberikan rekomendasi mengenai hal-hai yang diperlukan.

BAB II

PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR DALAM PEMBANGUNAN KOTA YANG BERKELANJUTAN

2.1 Perkembangan Kota

Menurut Marbun (1992), kota merupakan kawasan hunian dengan jumlah penduduk relatif besar, tempat kerja penduduk yang intensitasnya tinggi serta merupakan tempat pelayanan umum. Kegiatan ekonomi merupakan hal yang penting bagi suatu kota karena merupakan dasar agar kota dapat bertahan dan berkembang (Jayadinata, 1992:110). Kedudukan aktifitas ekonomi sangat penting sehingga seringkali menjadi basis perkembangan sebuah kota. Adanya berbagai kegiatan ekonomi dalam suatu kawasan menjadi potensi perkembangan kawasan tersebut pada masa berikutnya.

Istilah perkembangan kota (*urban development*) dapat diartikan sebagai suatu perubahan menyeluruh, yaitu yang menyangkut segala perubahan di dalam masyarakat kota secara menyeluruh, baik perubahan sosial ekonomi, sosial budaya, maupun perubahan fisik (Hendarto, 1997).

Pertumbuhan dan perkembangan kota pada prinsipnya menggambarkan proses berkembangnya suatu kota. Pertumbuhan kota mengacu pada pengertian secara kuantitas, yang dalam hal ini diindikasikan oleh besaran faktor produksi yang dipergunakan oleh sistem ekonomi kota tersebut. Semakin besar produksi berarti ada peningkatan permintaan yang meningkat. Sedangkan perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer kesekunder atau tersier. Secara umum kota akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan melalui keterlibatan aktivitas sumber daya

manusia berupa peningkatan jumlah penduduk dan sumber daya alam dalam kota yang bersangkutan (Hendarto, 1997).

Pada umumnya terdapat tiga faktor utama yang mempengaruhi perkembangan kota, yaitu:

1. Faktor penduduk, yaitu adanya penambahan penduduk baik disebabkan karena penambahan alami maupun karena migrasi.
2. Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat
3. Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat akibat pengaruh luar, komunikasi dan sistem informasi.

Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Firman, 1996). Kegiatan sekunder dan tersier seperti manufaktur dan jasa-jasa cenderung untuk berlokasi di kota-kota karena faktor "*urbanization economics*" yang diartikan sebagai kekuatan yang mendorong kegiatan usaha untuk berlokasi di kota sebagai pusat pasar, tenaga kerja ahli, dan sebagainya.

Perkembangan kota menurut Raharjo dalam Widyaningsih (2001), bermakna perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas, dan seterusnya.

Dikatakan oleh Beatley dan Manning (1997) bahwa penyebab perkembangan suatu kota tidak disebabkan oleh satu hal saja melainkan oleh berbagai hal yang saling

berkaitan seperti hubungan antara kekuatan politik dan pasar, kebutuhan politik, serta faktor-faktor sosial budaya.

Teori Central Place dan *Urban Base* merupakan teori mengenai perkembangan kota yang paling populer dalam menjelaskan perkembangan kota-kota. Menurut teori *central place* seperti yang dikemukakan oleh Christaller (Daldjoeni, 1992), suatu kota berkembang sebagai akibat dari fungsinya dalam menyediakan barang dan jasa untuk daerah sekitarnya. Teori *Urban Base* juga menganggap bahwa perkembangan kota ditimbulkan dari fungsinya dalam menyediakan barang kepada daerah sekitarnya juga seluruh daerah di luar batas-batas kota tersebut. Menurut teori ini, perkembangan ekspor akan secara langsung mengembangkan pendapatan kota. Disamping itu, hal tersebut akan menimbulkan pula perkembangan industri-industri yang menyediakan bahan mentah dan jasa-jasa untuk industri-industri yang memproduksi barang ekspor yang selanjutnya akan mendorong pertambahan pendapatan kota lebih lanjut (Hendarto, 1997).

2.2 Kawasan Pesisir

2.2.1 Definisi dan Deliniasi Kawasan Pesisir

Definisi kawasan pesisir adalah: “wilayah daratan dan wilayah laut yang bertemu di garis pantai dimana wilayah daratan mencakup daerah yang tergenang atau tidak tergenang air yang dipengaruhi oleh proses-proses laut seperti pasang surut, angin laut, dan intrusi air laut. Sedangkan wilayah laut mencakup perairan yang dipengaruhi oleh proses-proses alami daratan seperti sedimentasi dan aliran air tawar ke laut serta perairan yang dipengaruhi oleh kegiatan manusia di darat” (Bengen, 2000:3). Sedangkan menurut Naskah Akademik Pengelolaan Wilayah Pesisir (2001), pengertian dari kawasan pesisir adalah wilayah pesisir tertentu yang ditunjuk atau ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan

kriteria tertentu, seperti karakteristik fisik, biologi, sosial, dan ekonomi untuk dipertahankan keberadaannya.

Batas kawasan pesisir yang ditetapkan oleh Indonesia ditetapkan dalam Rapat Kerja Nasional Proyek MREP (*Marine Resource Evaluation and Planning* atau Perencanaan dan Evaluasi Sumber Daya Kelautan). Dalam rapat kerja tersebut ditetapkan bahwa batas ke arah laut suatu kawasan pesisir untuk keperluan praktis dalam proyek MREP adalah sesuai dengan batas laut yang terdapat dalam Peta Lingkungan Pantai Indonesia (LPI) yang telah diterbitkan oleh Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional (BAKOSURTANAL). Sedangkan batas ke arah darat mencakup batas administratif seluruh desa pantai (sesuai dengan ketentuan Direktorat Jendral Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah, Departemen Dalam Negeri) yang termasuk dalam wilayah pesisir MREP (PKSPL-IPB, 2002).

Berdasarkan uraian di atas, maka untuk kepentingan pengelolaan adalah kurang begitu penting untuk menetapkan batasan fisik secara tegas dan kaku (Dahuri, 2001), dan akan lebih berarti apabila penetapan batas-batas suatu kawasan pesisir didasarkan pada faktor-faktor yang mempengaruhi pembangunan (pemanfaatan) dan pengelolaan ekosistem pesisir beserta segenap sumber daya yang ada di dalamnya, serta dari tujuan pengelolaan itu sendiri.

2.2.2 Potensi Kawasan Pesisir

Potensi pembangunan yang terdapat di kawasan pesisir secara garis besar terdiri dari tiga kelompok : (1) sumber daya dapat pulih (*renewable resources*), (2) sumber daya tak dapat pulih (*non-renewable resources*), dan (3) jasa-jasa lingkungan (*environmental services*) (Dahuri, 2001).

a. Sumber Daya Dapat Pulih

Hutan Mangrove

Hutan mangrove merupakan ekosistem utama pendukung kehidupan yang penting di kawasan pesisir. Selain mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, tempat pemijahan dan asuhan bagi bermacam biota, penahan abrasi, penyerap limbah, pencegah intrusi air laut, dan lain sebagainya, hutan mangrove juga mempunyai fungsi ekonomis seperti penyedia kayu, daun-daunan sebagai bahan baku obat-obatan, dan lain-lain.

Terumbu Karang

Terumbu karang mempunyai fungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, pelindung fisik, tempat bermain dan asuhan berbagai biota; terumbu karang juga menghasilkan berbagai produk yang mempunyai nilai ekonomi penting seperti berbagai jenis hasil perikanan, batu karang untuk konstruksi. Dari segi estetika, terumbu karang dapat menampilkan pemandangan yang sangat indah.

Rumput Laut

Pemanfaatan rumput laut untuk industri terutama pada senyawa kimia yang terkandung di dalamnya, khususnya karegenan, agar, dan algin.

Sumber Daya Perikanan Laut

b. Sumber daya yang Tidak Dapat Pulih

Sumber daya yang tidak dapat pulih terdiri dari seluruh mineral dan geologi, yang termasuk kedalamnya antara lain minyak gas, batu bara, emas, timah, nikel, bijih besi, batu bara, granit, tanah liat, pasir, dan lain-lain. Sumber daya geologi lainnya adalah bahan baku industri dan bahan bangunan, antara lain kaolin, pasir kuarsa, pasir bangunan, kerikil dan batu pondasi.

c. Jasa-jasa Lingkungan

Jasa-jasa lingkungan yang dimaksud meliputi fungsi kawasan pesisir dan lautan sebagai tempat rekreasi dan pariwisata, media transportasi dan komunikasi, sumber energi, sarana pendidikan dan penelitian, pertahanan keamanan, penampungan limbah, pengatur iklim, kawasan lindung, dan sistem penunjang kehidupan serta fungsi fisiologis lainnya.

2.2.3 Aktivitas Ekonomi Kawasan Pesisir

Penggunaan pesisir telah berlangsung sejak adanya kehidupan manusia karena potensi yang besar yang dimilikinya baik berupa sumber daya hayati maupun non hayati. Dalam meninjau kondisi ekonominya tidak dapat lepas dari penggunaan lahan yang ada yang terdiri dari: eksploitasi sumber daya, infrastruktur, pariwisata, serta konservasi (Kay dan Alder, 1999). Aktifitas ekonomi pada kawasan pesisir terdiri dari berbagai jenis yang umumnya terdiri dari:

1. Industri kehutanan, industri ini berkaitan dengan pemanfaatan hutan mangrove yang dipergunakan untuk bahan baku konstruksi
2. Industri berat. Menurut teori lokasi yang dikemukakan Weber, Palander, maupun Hoover dinyatakan bahwa penentuan lokasi industri dipengaruhi beberapa hal seperti bahan baku, biaya, angkutan, tenaga kerja, dan pasar (Djoyodipuro, 1992). Kawasan pesisir sangat menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya, khususnya dalam hal produksi suatu industri. Salah satu keuntungan pengalokasian industri pada kawasan pesisir adalah kemudahan dalam hal pengiriman barang ke luar wilayah. Berdasarkan hal tersebut, sebagian besar industri-industri yang ditempatkan di kawasan ini merupakan industri yang berorientasi ekspor.

3. Pelabuhan, keberadaan pelabuhan pada kawasan pesisir merupakan suatu potensi ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah. Pelabuhan biasanya berfungsi sebagai tempat pendaratan hasil minyak dan gas, tempat menyimpan peti kemas, perikanan, dan sebagai salah satu komponen dalam transportasi yang berfungsi untuk pergantian moda angkutan.
4. Pertambangan, pertambangan yang banyak berkembang di kawasan pesisir adalah pertambangan pasir dan terumbu karang
5. Perikanan
6. Industri perminyakan dan gas
7. Parawisata

2.2.3 Permasalahan Kawasan Pesisir

Pemanfaatan sumber daya pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan penyediaan lapangan pekerjaan seperti penangkapan ikan secara tradisional, budi daya tambak, penambangan terumbu karang, dan lain sebagainya. Namun di sisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap kelangsungan ekosistem pesisir.

Ada beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan lautan di Indonesia antara lain:

a. **Pencemaran.** Pencemaran laut adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan laut oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya menurun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan laut tidak sesuai lagi dengan baku mutu dan/atau fungsinya.

b. **Kerusakan Fisik Habitat.** Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di daerah pesisir adalah akibat aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman, pembangunan infrastruktur, dan perikanan tambak. Ekosistem lainnya yang mengalami kerusakan cukup parah adalah ekosistem terumbu karang. Ada beberapa faktor yang menyebabkan rusaknya terumbu karang antara lain adalah: (1) penambangan batu karang untuk bahan bangunan, jalan, dan hiasan, (2) penangkapan ikan dengan menggunakan bahan peledak, racun, dan alat tangkap ikan tertentu, (3) pencemaran perairan oleh limbah industri, pertanian dan rumah tangga, (4) pengendapan dan peningkatan kekeruhan perairan akibat erosi tanah di darat, penggalian dan penambangan, (5) eksploitasi berlebihan sumber daya perikanan karang (Dahuri, 2001).

Ekosistem padang lamun secara khusus rentan terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktivitas manusia. Beberapa aktivitas manusia yang dapat merusak ekosistem padang lamun adalah (1) pengerukan dan pengurugan untuk pembangunan pemukiman pinggir laut, pelabuhan, industri dan saluran navigasi, (2) pencemaran logam industri terutama logam berat, dan senyawa organoklorin, pembuangan sampah organik, pencemaran oleh limbah industri, pertanian, dan minyak (Bengen, 2000).

c. **Eksplorasi sumber daya secara berlebihan.** Ada beberapa sumber daya perikanan yang telah dieksploitir secara berlebihan (*overfishing*), termasuk udang, ikan demersal, palagis kecil, dan ikan karang. Menipisnya stok sumber daya tersebut, selain karena *overfishing* juga dipicu oleh aktivitas ekonomi yang baik secara langsung atau tidak merusak ekosistem dan lingkungan sehingga perkembangan sumber daya perikanan

terganggu. Disamping itu, kurangnya apresiasi dan pengetahuan manusia untuk melakukan konservasi sumber daya perikanan, seperti udang, mangrove, terumbu karang, dan lain-lain.

d. Abrasi Pantai. Ada 2 faktor yang menyebabkan terjadinya abrasi pantai, yaitu : (1) proses alami (karena gerakan gelombang pada pantai terbuka), (2) aktivitas manusia. Kegiatan manusia tersebut misalnya kegiatan penebangan hutan (HPH) atau pertanian di lahan atas yang tidak mengindahkan konsep konservasi telah menyebabkan erosi tanah dan kemudian sedimen tersebut dibawa ke aliran sungai serta diendapkan di kawasan pesisir. Aktivitas manusia lainnya adalah menebang atau merusak ekosistem mangrove di garis pantai baik untuk keperluan kayu, bahan baku arang, maupun dalam rangka pembuatan tambak.

e. Konversi Kawasan Lindung ke Penggunaan Lainnya. Dewasa ini banyak sekali terjadi pergeseran penggunaan lahan, misalnya dari lahan pertanian menjadi lahan industri, property, perkantoran, dan lain sebagainya yang terkadang kebijakan persegeran tersebut tanpa mempertimbangkan efek ekologi, tetapi hanya mempertimbangkan keuntungan ekonomi jangka pendek. Demikian juga halnya yang terjadi di kawasan pesisir, banyak terjadi pergeseran lahan pesisir dan bahkan kawasan lindung sekalipun menjadi lahan pemukiman, industri, pelabuhan, perikanan tambak, dan pariwisata. Akibatnya terjadi kerusakan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove. Jika ekosistem mangrove rusak dan bahkan punah, maka hal yang akan terjadi adalah (1) regenerasi stok ikan dan udang terancam, (2) terjadi pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh hutan mangrove, (3) pedangkalan perairan pantai, (4) erosi garis pantai dan intrusi garam.

Menurut Sugandhy (1999:21-30) permasalahan-permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di kawasan pesisir adalah sebagai berikut:

1. Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan
2. Penurunan daya dukung lingkungan pesisir
3. Penurunan mutu lingkungan pesisir
4. Penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir
5. Adanya ketidak terpaduan pengelolaan sumberdaya manusia, alam, dan buatan dalam pengelolaan lingkungan di pesisir
6. Kurang optimalnya pemanfaatan ruang kawasan
7. Perusakan dan pencemaran lingkungan
8. Rendahnya peran serta masyarakat
9. Kurang lengkap dan konsistennya sistem informasi lingkungan
10. Belum terintegrasinya ekonomi lingkungan dalam perhitungan investasi pembangunan
11. Belum berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi pengelolaan lingkungan
12. Lemahnya penegakan hukum dalam mendukung pengelolaan lingkungan

2.3 Pembangunan Kota yang Berkelanjutan

Pembangunan kota yang berkelanjutan adalah suatu proses dinamis yang berlangsung secara terus-menerus, merupakan respon terhadap tekanan perubahan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Proses dan kebijakannya tidak sama pada setiap kota, tergantung pada kota-kotanya. Salah satu tantangan terbesar konsep tersebut saat ini adalah menciptakan keberlanjutan, termasuk didalamnya keberlanjutan sistem politik dan kelembagaan sampai pada strategi, program, dan kebijakan sehingga pembangunan kota yang berkelanjutan dapat terwujud (Salim, 1997).

Pertumbuhan kota dengan diiringi penduduk yang besar bagaimanapun akan membutuhkan area yang lebih besar, sehingga akan menimbulkan permasalahan dengan alam. Pembangunan kota harus memperhatikan alam dan lingkungan sebagaimana konsep E. Howard dengan *Garden City*-nya. Kota besar bukanlah tempat yang cocok untuk tempat tinggal jika persoalan lingkungan diabaikan. Demikian juga yang disampaikan Geddes, bahwa alam merupakan unit terpenting bagi kelangsungan aktivitas kota (Salim, 1997).

Perwujudan kota berkelanjutan (The World Commision on Environment and Development, 1987) antara lain :

1. Kota berkelanjutan dibangun dengan kepedulian dan memperhatikan aset-aset lingkungan alam, memperhatikan penggunaan sumber daya, meminimalisasi dampak kegiatan terhadap alam.
2. Kota berkelanjutan berada pada tatanan regional dan global, tidak peduli apakah besar atau kecil, tanggung jawabnya melewati batas-batas kota.
3. Kota berkelanjutan meliputi areal yang lebih luas, dimana individu bertanggung jawab terhadap kota.
4. Kota berkelanjutan memerlukan aset-aset lingkungan dan dampaknya terdistribusi secara lebih merata.
5. Kota berkelanjutan adalah kota pengetahuan, kota bersama, kota dengan jaringan internasional.
6. Kota berkelanjutan akan memperhatikan konservasi, memperkuat dan mengedepankan hal-hal yang berkaitan dengan alam dan lingkungan
7. Kota berkelanjutan saat ini lebih banyak kesempatan untuk memperkuat kualitas lingkungan skala lokal, regional, dan global.

Kota-kota memiliki ciri yang ditentukan oleh fungsi kota dalam ruang lingkup daerah. Masing-masing fungsi memberikan pengaruhnya tersendiri pada pengembangan kota. Oleh karena itu, hal pertama yang perlu diperhatikan adalah fungsi apa yang dilaksanakan sebuah kota. Sifat serta fungsi kota inilah yang mempengaruhi proses pembangunan kota tersebut. Setiap kota harus berkembang dengan karakternya sendiri, dan yang lebih penting, bagaimana kota tersebut mampu menampung perkembangannya dimasa mendatang dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan kota dan masyarakatnya.

Untuk dapat menciptakan suatu kota yang berkelanjutan, diperlukan lima prinsip dasar, yaitu ekologi, ekonomi, *equity* (pemerataan), *engagement* (peran serta), dan energi (Budiharjo, 1996). Dalam mengukur suatu keberlanjutan dalam pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial (Trzyna, 1995). Hal tersebut didukung pula oleh Haeruman (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu tujuan yang dilatarbelakangi sebuah visi akan keseimbangan dalam keterkaitan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi) guna membangun masyarakat yang stabil, makmur, dan berkualitas.

Antara kepentingan pertumbuhan ekonomi dan pelestarian lingkungan terkesan kontradiktif atau dengan kata lain harus ada yang dikorbankan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya ketidakseimbangan kekuatan di masyarakat yang menawarkan kepentingan tertentu untuk meletakkan kepentingan individu berjangka pendek di atas kepentingan kolektif berjangka panjang dari suatu masyarakat yang sustainabel (Yakin, 1997).

Beberapa persyaratan yang harus dicapai dalam merealisasikan pembangunan yang berkelanjutan (Haeruman, 1997) antara lain:

1. Dalam konteks ekonomi, pembangunan harus menghindari upaya-upaya untuk memperkaya satu kelompok yang akan menyebabkan kemiskinan bagi kelompok-kelompok lainnya. Dengan adanya ketidaksamaan itu, keberlanjutan hanya dicapai dalam konteks fisik tetapi tidak dalam konteks sosial ekonomi. Sehingga dalam pembangunan berkelanjutan, keadilan dan persamaan benar-benar menjadi dasar yang wajib diterapkan.
2. Dalam konteks ekologis, pembangunan selayaknya menjaga, memperbaiki, dan memulihkan sumber daya alam yang dimiliki, baik pada daerah-daerah yang dimanfaatkan secara produktif maupun pada daerah-daerah marginal.
3. Dalam konteks sosial, diperlukan suatu solidaritas, koordinasi dalam tindakan, serta partisipasi oleh berbagai sektor dan individu. Untuk itu diperlukan suatu pembenahan kelembagaan, pembagian tanggung jawab dan kerjasama yang baik dari para pembuat keputusan

2.4 Peran Kawasan Pesisir dalam Perkembangan Kota

Secara fisik, kota merupakan kawasan terbangun di perkotaan yang terletak saling berdekatan, yang meluas dari pusatnya hingga kepinggiran kota. Hal ini memberikan gambaran konsentrasi bangunan atau areal terbangun yang ada di kota cenderung lebih besar atau lebih padat dibandingkan dengan daerah pinggiran atau daerah pedesaan. Bangunan merupakan unsur pertama yang dibangun di kota setelah air dan makanan tersedia. Penggunaan bangunan beragam sesuai dengan beragamnya kegiatan manusia yang menghuninya. Kategori utama penggunaan bangunan di perkotaan adalah terdiri dari

permukiman, perdagangan, industri, pemerintah, dan transportasi. Unsur ini membentuk pola penggunaan lahan kota.

Secara sosial, kota memberikan gambaran sebuah komunitas yang diciptakan pada awalnya untuk meningkatkan produktifitas melalui konsentrasi dan spekulasi tenaga kerja, kebudayaan dan kegiatan rekreatif. Dalam hal ini, kota merupakan strata dari komunitas yang heterogen dan dapat dikelompokkan berdasarkan intelektualitas, kebudayaan, keahlian, kreatifitas dan kelompok-kelompok tertentu yang membutuhkan ruang untuk berekreasi disamping pekerjaan yang ditekuni. Aspek ini dipandang perlu bagi masyarakat perkotaan sebagai suatu kebutuhan guna menghilangkan kejenuhan sehabis beraktivitas.

Secara ekonomi, kota memberikan makna fungsi dasar suatu kota sebagai tempat menghasilkan penghasilan yang cukup melalui produksi barang dan jasa untuk mendukung kehidupan penduduknya dan untuk kelangsungan kota itu sendiri. Disini dapat diartikan adanya aktivitas perkotaan khususnya aktivitas ekonomi mengindikasikan dinamisasi masyarakat dalam aktivitas sehari-hari. Ekonomi perkotaan berkaitan erat dengan perkembangan kota, dimana ekonomi perkotaan yang sehat mampu menyediakan berbagai kebutuhan untuk keperluan pertumbuhan perkotaan, terutama untuk menerima perkembangan baru yang disebabkan oleh kemajuan dibidang teknologi dan perubahan keadaan (Hendro, 2001).

Dari uraian tersebut, kawasan pesisir yang memiliki potensi sumber daya yang besar termasuk ketersediaan lahan yang dapat dikembangkan menjadi daerah perkotaan, pada dasarnya memiliki potensi dalam membentuk wajah suatu kota dimana keberadaan

kawasan pesisir pada suatu daerah perkotaan ternyata menambah suasana tersendiri bagi kota tersebut.

Permasalahannya adalah bagaimana memadukan kepentingan dinamika perkembangan kota dengan fungsi ekologis yang disandang oleh kawasan pesisir sebagai penghubung antara fungsi ekonomis di wilayah daratan dan di lautan. Sebab, pengaruh pembangunan kota terhadap lingkungan adalah lebih besar daripada pengaruh pembangunan desa. Demikian halnya dengan kawasan pesisir yang terletak di wilayah perkotaan, secara langsung maupun tidak langsung akan dipengaruhi pelaksanaan pembangunan di sekitarnya. Pengaruh secara fisik adalah karena pembangunan kota mengubah keadaan fisik lingkungan alam menjadi lingkungan buatan manusia. Dalam kota, keadaan lingkungan alam sulit untuk dipertahankan kelestarian dalam wujud aslinya sehingga lahir lah lingkungan buatan manusia. Permasalahannya adalah, sejauh mana fungsi lingkungan alam dapat digantikan oleh lingkungan buatan manusia dan sampai seberapa jauh perubahan lingkungan tersebut mencapai titik krisis sehingga berdampak negatif terhadap kehidupan manusia.

Untuk itu dapatlah dikatakan bahwa tujuan utama dalam pengembangan dan pengelolaan di pesisir adalah memanfaatkan segenap sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Menurut Dahuri (2001), pembangunan berkelanjutan yang merupakan strategi pembangunan untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa menurunkan atau merusak kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasinya, memiliki dimensi ekologis, sosial-ekonomi dan budaya, sosial politik, serta hukum dan kelembagaan.

Dari dimensi ekologis, agar pembangunan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan, maka harus memenuhi tiga persyaratan utama. Pertama, bahwa setiap kegiatan pembangunan hendaknya ditempatkan di lokasi yang secara biofisik (ekologis) sesuai dengan persyaratan biofisik dari kegiatan pembangunan tersebut. Dengan perkataan lain, perlu adanya tata ruang pembangunan kawasan pesisir dan lautan. Untuk keperluan penyusunan tata ruang ini, dibutuhkan informasi tentang karakteristik biofisik suatu wilayah dan persyaratan biofisik dari setiap kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan. Selain itu, perlu juga informasi tentang tata guna lahan pesisir yang ada saat ini (eksisting). Kedua, bahwa laju pembuangan limbah ke dalam kawasan pesisir dan lautan hendaknya tidak melebihi kapasitas asimilasi kawasan tersebut. Artinya, perlu pengendalian pencemaran. Untuk itu diperlukan informasi tentang sumber dan kuantitas limbah dari setiap jenis limbah yang masuk ke dalam kawasan pesisir dan lautan, tingkat kualitas perairan pesisir dan lautan, dan kapasitas asimilasi perairan tersebut. Ketiga, bahwa tingkat pemanfaatan sumber daya alam kawasan pesisir dan lautan, khususnya yang dapat pulih, hendaknya tidak melampaui kemampuan pulihnya (potensi lestari) dalam kurun waktu tertentu. Artinya, perlu pemanfaatan sumber daya alam secara optimal. Untuk itu diperlukan informasi tentang potensi lestari dari setiap sumber daya alam pulih yang ada di wilayah pesisir dan lautan, dan permintaan (*demand*) terhadap sumber daya alam tersebut dari waktu ke waktu. Dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang tidak dapat pulih, seperti minyak dan gas serta mineral, perlu dilakukan secara cermat dan dampak negatif yang mungkin timbul ditekan seminimal mungkin. Untuk itu diperlukan informasi tentang dampak lintas kegiatan (sektoral) dan integrasi antar ekosistem.

Dimensi sosial ekonomi mensyaratkan bahwa laju perkembangan pembangunan hendaknya dirancang sedemikian rupa, sehingga permintaan total atas sumber daya alam dan jasa lingkungan yang terdapat di wilayah pesisir dan lautan tidak melebihi kemampuan ekosistem pesisir dan lautan untuk menyediakannya. Dimensi sosial politik, mensyaratkan bahwa perlu diciptakan suasana yang kondusif bagi segenap lapisan masyarakat untuk dapat berpartisipasi aktif dalam pembangunan sumber daya pesisir dan lautan. Untuk itu diperlukan informasi tentang pola dan sistem perencanaan serta proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya tersebut oleh segenap lapisan masyarakat yang terlibat.

Dimensi hukum dan kelembagaan mensyaratkan perlunya sistem dan kinerja hukum dan kelembagaan yang dapat mendukung pelaksanaan pembangunan sumber daya pesisir dan lautan secara berkelanjutan. Untuk itu diperlukan informasi tentang aspek dan dinamika hukum serta kelembagaan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

2.5 Kesimpulan

Berdasarkan kajian literatur di atas, dapat diambil suatu kesimpulan teoritis untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam studi ini, yaitu:

1. Perkembangan suatu kota atau bagian dari kota termasuk kawasan pesisir secara umum dipengaruhi oleh tiga faktor (Hendarto, 1997), yaitu:
 - Faktor penduduk, yaitu adanya penambahan penduduk baik disebabkan karena pertumbuhan alami maupun karena migrasi.
 - Faktor sosial ekonomi, yaitu perkembangan kegiatan usaha masyarakat
 - Faktor sosial budaya, yaitu adanya perubahan pola kehidupan dan tata cara masyarakat

Perkembangan kota menurut Raharjo dalam Widyaningsih (2001), bermakna perubahan yang dialami oleh daerah perkotaan pada aspek-aspek kehidupan dan penghidupan kota tersebut, dari tidak ada menjadi ada, dari sedikit menjadi banyak, dari kecil menjadi besar, dari ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, dari penggunaan ruang yang sedikit menjadi teraglomerasi secara luas, dan seterusnya. Perkembangan suatu kota juga dipengaruhi oleh perkembangan dan kebijakan ekonomi. Hal ini disebabkan karena perkembangan kota pada dasarnya adalah wujud fisik perkembangan ekonomi (Firman, 1996).

Perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung dan kawasan pesisirnya secara fisik terwujud dalam bentuk perkembangan kota yang dipengaruhi oleh faktor penduduk, faktor sosial ekonomi, dan faktor sosial budaya sebagaimana tersebut di atas serta diindikasikan oleh perubahan-perubahan yang dialami seperti ketersediaan lahan yang menjadi terbatas dan sebagainya. Lebih rinci variabel-variabel yang akan digunakan dalam analisis kuantitatif dalam studi ini adalah sebagai berikut:

- Perkembangan Kota Bandar Lampung dijadikan variabel bebas karena perkembangan yang terjadi mempengaruhi setiap bagian wilayah kota termasuk kawasan pesisirnya.
 - Jumlah penduduk: mengindikasikan faktor penduduk/sosial
 - Jumlah industri: mengindikasikan faktor ekonomi
 - Jumlah pekerja di sektor industri: mengindikasikan faktor ekonomi-sosial (perkembangan usaha masyarakat)
 - Luas lahan industri: mengindikasikan perubahan fisik yang terjadi
 - Volume ekspor regional: mengindikasikan faktor ekonomi

• Perkembangan kawasan pesisir dijadikan variabel terikat karena perkembangan di kawasan ini sangat dipengaruhi perkembangan kota secara keseluruhan melalui kebijakan-kebijakan pembangunan kota yang banyak memanfaatkan kawasan pesisir sebagai pendukung perekonomian kota dan wilayah.. Beberapa komponen variabel yang digunakan adalah:

- Jumlah penduduk: mengindikasikan faktor penduduk/sosial
- Jumlah industri: mengindikasikan faktor ekonomi
- Jumlah pekerja di sektor industri: mengindikasikan faktor ekonomi-sosial (perkembangan usaha masyarakat)
- Luas pekarangan: mengindikasikan perubahan fisik yang terjadi
- Volume ekspor melalui pelabuhan: mengindikasikan faktor ekonomi

2. Perkembangan di kawasan pesisir di satu sisi berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu dengan beragamnya lapangan pekerjaan yang tersedia, namun disisi lain, pemanfaatan sumber daya alam secara terus menerus dan berlebihan akan menimbulkan dampak negatif terhadap fungsi ekologis kawasan pesisir. Menurut Sugandhy (1999:21-30), permasalahan-permasalahan pengelolaan lingkungan hidup yang ada di pesisir antara lain:

- Perusakan dan pencemaran lingkungan
- Perubahan fungsi dan tatanan lingkungan
- Penurunan daya dukung lingkungan wilayah pesisir
- Penurunan mutu lingkungan wilayah pesisir
- Penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir

Sedangkan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung saat ini terdapat beberapa permasalahan (PKSPL-IPB, 2002), antara lain:

- Langkanya air tawar di beberapa tempat di kawasan pesisir
- Pembuangan sampah dan limbah padat menimbulkan pencemaran limbah padat berbau busuk di kawasan pesisir
- Pola bangunan yang membelakangi pantai menjadikan suasana lingkungan pantai menjadi kotor.
- Sanitasi pemukiman pesisir belum memadai
- Reklamasi pantai tanpa perencanaan tepat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir seperti terjadinya banjir

Berdasarkan kajian di atas ditentukan variabel-variabel dalam survey primer, meliputi:

1. Keberadaan populasi bakau: mengindikasikan penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir
2. Keberadaan terumbu karang: mengindikasikan penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir
3. Keberadaan padang lamun (rumput laut): mengindikasikan penyusutan keanekaragaman flora dan fauna pesisir
4. Kemudahan mendapatkan air bersih: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
5. Warna air: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
6. Bau air: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
7. Rasa air: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan

8. Kekerusuhan air: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
 9. Debu di udara: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
 10. Bau: mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
 11. Kebisingan : mengindikasikan kerusakan dan pencemaran lingkungan
 12. Estetika Lingkungan: mengindikasikan penurunan mutu lingkungan
 13. Kondisi permukiman : mengindikasikan penurunan mutu lingkungan
 14. Frekuensi banjir: mengindikasikan penurunan daya dukung lingkungan
3. Kawasan pesisir dengan potensi sumber dayanya yang besar termasuk ketersediaan lahan, dapat dikembangkan menjadi daerah perkotaan. Permasalahannya adalah bagaimana memadukan kepentingan dinamika perkembangan kota dengan fungsi ekologis yang disandang oleh kawasan pesisir sebagai penghubung antara fungsi ekonomis di wilayah daratan dan di lautan. Dengan memperhatikan ruang lingkup suatu kota dan fungsinya dalam pembangunan wilayah maka setiap kota akan berkembang dengan karakternya sendiri. Sifat serta fungsi kota inilah yang mempengaruhi proses pembangunan kota tersebut. Yang penting, dalam mengarahkan perkembangan suatu kota perlu diperhatikan bagaimana kota tersebut mampu menampung perkembangannya dimasa mendatang dengan tetap mempertahankan kawasan yang berfungsi melindungi kehidupan kota dan masyarakatnya.

Kota Bandar Lampung yang berpotensi menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa baik regional maupun nasional perlu mengarahkan perkembangannya dimasa mendatang. Sebagai kota yang memiliki potensi perkembangan yang pesat, Kota Bandar Lampung memerlukan suatu konsepsi seluruh perubahan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang berperan penting dalam

mendukung perekonomian Kota Bandar Lampung maupun perekonomian Propinsi Lampung secara regional perlu mendapatkan perhatian lebih karena fungsi lain yang dimilikinya, yaitu fungsi ekologis.

Dari dimensi ekologis, agar pembangunan kawasan pesisir dapat berlangsung secara berkelanjutan antara lain diperlukan informasi tentang tata guna lahan pesisir yang ada saat ini/eksisting (Dahuri, 2001). Dengan demikian, perkembangan yang terjadi di kawasan pesisir dapat dikaji ulang dan diarahkan kembali secara proporsional sesuai dengan fungsi ekonomis dan fungsi ekologis yang dimilikinya.

BAB III

PERKEMBANGAN KOTA DAN KAWASAN PESISIR BANDAR LAMPUNG

3.1 Kondisi Umum Kota Bandar Lampung

3.1.1 Kedudukan Geografis



Secara geografis Kota Bandar Lampung terletak pada $5^{\circ} 20'$ sampai dengan $5^{\circ} 30'$ lintang selatan dan $105^{\circ} 28''$ sampai dengan $105^{\circ} 37'$ bujur timur. Letak tersebut berada dibagian selatan Propinsi Lampung dan di ujung Pulau Sumatra. Lebih jelas, letak geografis Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.1.

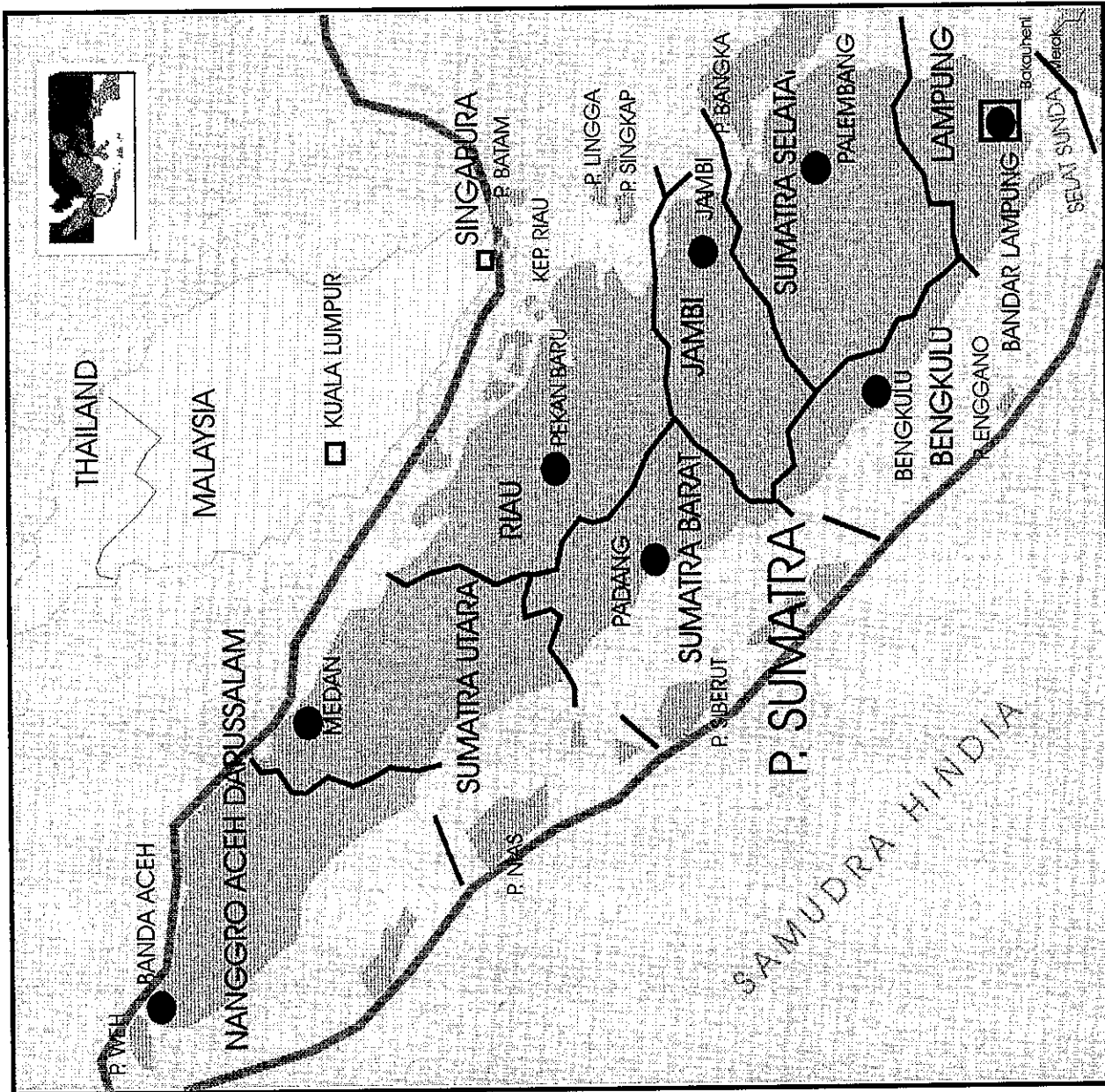
Kota Bandar Lampung merupakan Ibu Kota Propinsi Lampung. Oleh karena itu, Kota Bandar Lampung merupakan pusat kegiatan pemerintahan, sosial, politik, pendidikan, dan kebudayaan, serta merupakan pusat kegiatan perekonomian Propinsi Lampung.

Kota Bandar Lampung memiliki luas wilayah 192 km^2 yang terdiri dari 9 kecamatan dan 64 kelurahan. Seluruh kecamatan yang membatasi wilayah Kota Bandar Lampung merupakan bagian dari wilayah Kabupaten Lampung Selatan.

Struktur ruang wilayah Propinsi Lampung telah menetapkan fungsi dan peranan Kota Bandar Lampung dalam konteks nasional maupun regional sebagaimana berikut (RUTR, 1995):

1. Kota Bandar Lampung merupakan pintu gerbang menuju Pulau Sumatra dan sebagai pusat pertumbuhan nasional (RTRWN Tahun 1996) sehingga diarahkan sebagai pusat pengembangan antar daerah, pusat pengembangan daerah, dan pusat lokal.

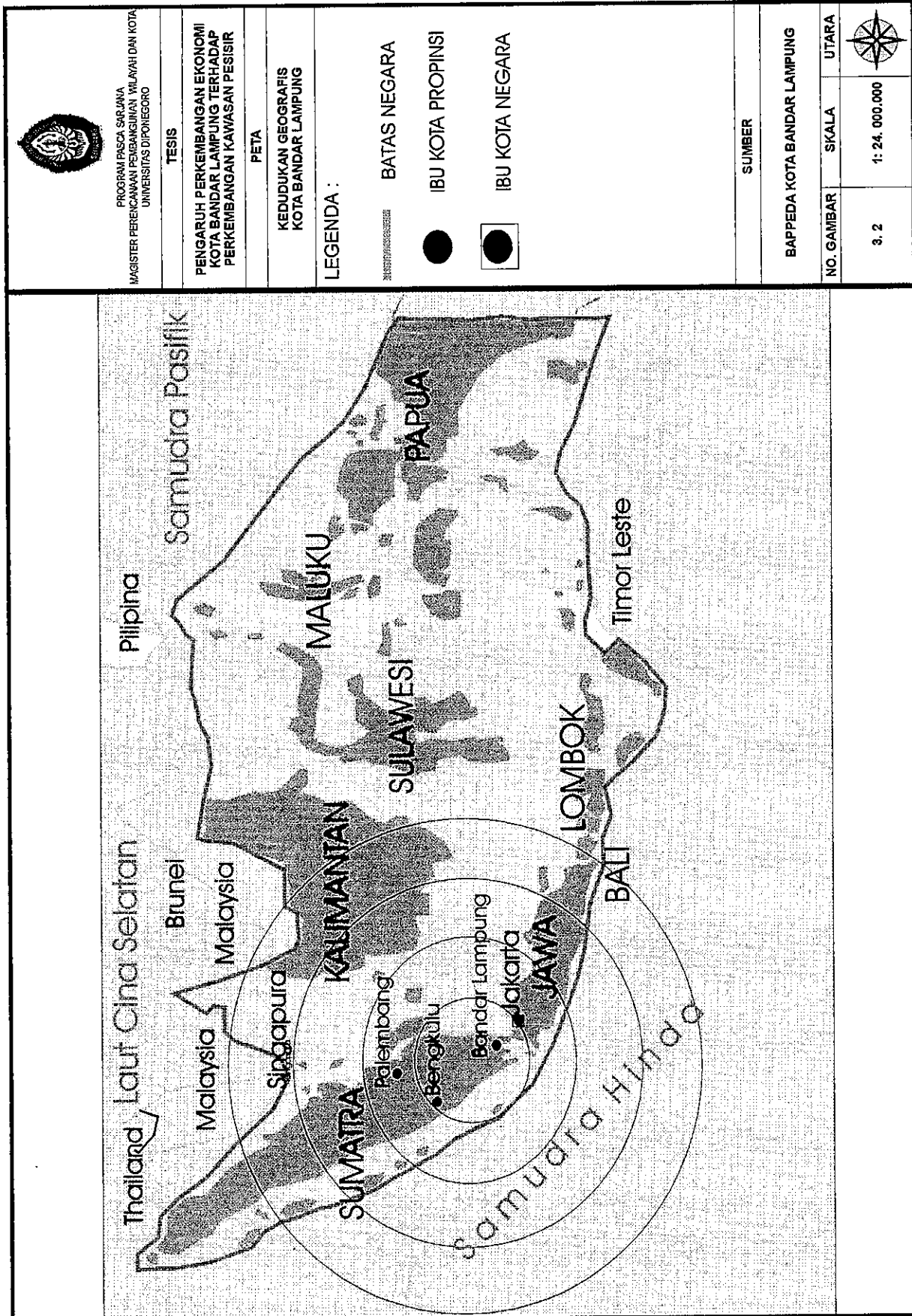
 <p>PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO</p>		
<p>TESIS</p>		
<p>PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR</p>		
<p>PETA</p>		
<p>LETAK GEOGRAFS KOTA BANDAR LAMPUNG</p>		
<p>LEGENDA:</p> <ul style="list-style-type: none"> — : Batas Propinsi — : Batas Negara ● : Ibukota Propinsi ◻ : Wilayah Studi 		
<p>SUMBER</p>		
<p>BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG</p>		
NO. GAMBAR	SKALA	UTARA
3.1	1 : 2.450.000	



2. Kota Bandar Lampung dan sekitarnya memiliki tiga wilayah strategis yang memiliki dampak regional maupun nasional yaitu Jalur Lintas Trans Sumatra yang terdiri dari tiga jalur:
 - Jalur tengah, mulai dari Pelabuhan Bakauheni – Bandar Lampung – Muara Enim (Sumatra Selatan)
 - Jalur lintas barat, mulai Bandar Lampung – Kota Agung – Liwa – Propinsi Bengkulu
 - Jalur Lintas Timur, mulai Pelabuhan Bakauheni – Menggala – Kayu Agung – Palembang
3. Pelabuhan Panjang, selain berfungsi sebagai pelabuhan antar pulau juga diarahkan pada pelabuhan samudra (ekspor-impor) sehingga akan berpengaruh besar terhadap kegiatan ekonomi Kota Bandar Lampung.
4. Rencana basis angkatan laut Teluk Ratai. Kawasan pangkalan angkatan laut Teluk Ratai secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak terhadap perkembangan Kota Bandar Lampung.

Dalam konteks nasional, regional maupun internasional, posisi Kota Bandar Lampung secara geografis sangat strategis (Gambar 3.2) dengan adanya kondisi:

- Merupakan pintu gerbang penghubung Pulau Sumatra dengan Pulau Jawa
- Berada pada ujung selatan Sumatra sehingga membentuk kesatuan dengan Jawa Barat bagian barat dan Jabotabek
- Berada pada satuan kerjasama ekonomi regional IMS-GT
- Memiliki gerbang transportasi laut Pelabuhan Panjang dan terhubung oleh akses yang tinggi dengan Pelabuhan Bakauheni dan Jaringan Trans Sumatra.



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

PETA

KEDUDUKAN GEOGRAFIS
KOTA BANDAR LAMPUNG

LEGENDA :

- BATAS NEGARA
- IBU KOTA PROPINSI
- IBU KOTA NEGARA

SUMBER

BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG

NO. GAMBAR	SKALA	UTARA
3. 2	1: 24. 000.000	

3.1.2 Kondisi Fisik Dasar

Wilayah Kota Bandar Lampung terletak pada ketinggian 0 sampai 700 meter di atas permukaan laut dengan topografi terdiri atas:

1. Daerah Pantai, yaitu sekitar Teluk Betung bagian selatan dan Panjang
2. Daerah perbukitan, yaitu sekitar Teluk Betung Bagian Utara
3. Daerah dataran tinggi serta sedikit bergelombang terdapat di sekitar Tanjung Karang bagian barat.
4. Teluk Lampung dan pulau-pulau kecil di bagian selatan.

Di tengah kota mengalir sungai-sungai, yaitu sungai Way Halim, Way Balau, Way Awi, Way simpur di wilayah Tanjung Karang Barat dan Way Kuripan, Way Balau, Way Kupang, Way Garuntang, Way Kuala di wilayah Teluk Betung. Daerah hulu sungai berada di bagian barat. Sedangkan daerah hilir berada di selatan yaitu pada dataran pantai. Luas wilayah yang datar sampai landai \pm 60%, landai sampai miring 35%, sangat miring sampai curam sebesar 4%. Kota Tanjung Karang-Teluk Betung, yang kemudian menjadi Kota Bandar Lampung (tahun 1982) semula luasnya kurang lebih hanya 4.800 Ha. Namun saat ini telah berkembang menjadi seluas 192 km². Sebagian besar wilayah kota berada pada ketinggian 0 – 500 m d.p.l, kecuali sebagian wilayah Kecamatan Kedaton yang berada pada ketinggian antara 500 – 700 m d.p.l. Pengkajian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa \pm hanya 40% wilayah kota yang layak secara lingkungan untuk dimanfaatkan bagi aktifitas perkotaan (Bappeda, 1997). Luas lahan kosong baik yang sudah diperuntukkan maupun yang tidak diusahakan selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.1
LUAS LAHAN KOSONG DI KOTA BANDAR LAMPUNG

TAHUN	LUAS LAHAN KOSONG (HA)		
	Diperuntukkan	Tidak diusahakan	Jumlah
1993	1.761,5	-	1.761,5
1994	1.231,58	623	1.854,58
1995	1.304,47	-	1.304,47
1996	800,75	-	800,75
1997	752	-	752
1998	628	-	628
1999	466	46,02	512,02
2000	360	44,02	404,02
2001	350	-	350

Sumber BPS, 1993-2001

Sebagaimana hasil studi Bandar Lampung Tahun 2020 yang telah dilakukan, bahwa Kota Bandar Lampung memiliki salah satu visi yaitu menjadi kota yang berkelanjutan dengan misi antara lain :

- Menjamin kualitas sumber daya alam terutama tanah dan air agar tetap terjaga hingga melampaui tahun 2020.
- Menjamin fungsi-fungsi ekologis agar dapat tetap dilangsungkan dan ditingkatkan hingga melampaui tahun 2020.

3.1.3 Kondisi Sosial Kependudukan

Pada tahun 2000 penduduk Kota Bandar Lampung berjumlah 743.109 jiwa yang berasal dari beraneka macam latar belakang suku bangsa dan budaya. Tingkat pertumbuhan penduduk rata-rata 3,11% per tahun, lebih besar dari laju pertumbuhan rata-rata propinsi yang tercatat sebesar 2,75% per tahun. Pertambahan jumlah penduduk selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.2
JUMLAH PENDUDUK KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 1993-2001

TAHUN	JUMLAH PENDUDUK
1993	626.640
1994	627.230
1995	629.629
1996	665.603
1997	670.398
1998	670.500
1999	674.316
2000	743.109
2001	754.847

Sumber: BPS, 1993-2001

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Sejak dimulainya program transmigrasi dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatra khususnya ke Propinsi Lampung, penduduk Lampung terdiri dari berbagai suku bangsa. Kota Bandar Lampung termasuk wilayah yang terpadat penduduknya, terutama di Tanjung Karang dan Teluk Betung. Pada periode 1971 – 1980 pertumbuhan penduduk di Propinsi Lampung adalah 5,77 % dan periode 1980 – 1990 menurun menjadi 5,06 %. Pada dua periode tersebut, laju pertumbuhan penduduk Propinsi Lampung adalah kedua tertinggi di Indonesia setelah DKI Jakarta.

Penduduk asli Lampung sukar untuk diketahui jumlahnya, karena tidak pernah dicacah menurut penggolongan suku bangsa. Namun, menurut Prof. Hilman Hadikusuma (1996), jumlah etnis Lampung asli diperkirakan hanya sebesar 16% saja dari total yang ada. Penduduk pendatang yang mendominasi hampir 84% terdiri dari berbagai etnis dengan kelompok terbesar adalah Jawa (30%), Banten/Sunda (20%), Lampung asli (16%), Sumatra Selatan (12%), Minangkabau (10%). Kelompok etnis lain yang juga cukup banyak adalah Bali, Batak, Bengkulu, Bugis, Cina, Ambon, Aceh, Riau, dan lain sebagainya (Hadikusuma dkk, 1996).

3.1.4 Kondisi Perekonomian

Dari hasil penghitungan PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2000, terlihat bahwa sektor usaha yang dominan kontribusinya terhadap PDRB sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 29,82 % dan 22,78 %. Kedua sektor ini mampu menyumbang lebih dari separuh nilai total PDRB, yaitu sebesar 52,6 %. Sektor jasa-jasa yang pada tahun 1999 sebagai penyumbang terbesar ke empat terhadap PDRB Kota Bandar Lampung meningkat menjadi penyumbang terbesar ketiga pada tahun 2000 dengan kontribusinya sebesar 14 %, menggeser sektor transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Bandar Lampung tetap didominasi oleh sektor sekunder dan tersier yang merupakan ciri daerah perkotaan.

Nilai PDRB Kota Bandar Lampung dan acuannya terhadap nilai PDRB Propinsi Lampung pada awal dan akhir tahun kajian yaitu tahun 1993 dan 2001 dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.3
NILAI PDRB KOTA BANDAR LAMPUNG DAN PROPINSI LAMPUNG
TAHUN 1993 DAN TAHUN 2001

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB KOTA B. LAMPUNG (JUTA RUPIAH)		PDRB PROPINSI LAMPUNG (JUTA RUPIAH)	
		TH 1993	TH 2001	TH 1993	TH 2001
1	Pertanian, peternakan & perikanan	30.245	44.606	1.993.681	2.712.194
2	Pertambangan dan penggalian	5.416	8.796	79.542	179.557
3	Industri pengolahan	267.805	323.095	777.420	1.016.569
4	Listrik dan air bersih	18.798	42.583	26.117	87.360
5	Bangunan	109.190	171.217	360.217	554.693
6	Perdagangan, hotel, dan restoran	275.205	402.548	857.230	1.117.560
7	Pengangkutan dan komunikasi	246.667	376.092	402.565	691.572
8	Keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan	139.360	124.846	288.630	388.877
9	Jasa-jasa	235.849	251.524	625.128	675.062
JUMLAH		1.328.535	1.743.307	5.410.530	7.423.444

Sumber: BPS, 1993 dan 2001

Dengan perannya sebagai pusat kegiatan, termasuk kegiatan ekonomi di dalam propinsi (Gambar 3.3), Kota Bandar Lampung berpotensi dengan adanya daerah hinterland yang sangat mendukung perkembangannya. Dengan wilayah seluas 35.376,50 km², Propinsi Lampung dijuluki sebagai wilayah unggulan, sentra pertumbuhan industri baru dan pintu gerbang Jawa-Sumatra. Propinsi Lampung tumbuh menjadi wilayah penyangga bagi kegiatan pertanian dan industri pengolah hasil pertanian. Komoditi yang memegang peranan penting adalah gula, kelapa, lada, dan kopi robusta. Propinsi ini akan segera menjadi daerah produsen gula terbesar di Indonesia yang mampu memasok 40% kebutuhan gula nasional setelah berbagai daerah produsen di Pulau Jawa menghadapi keterbatasan lahan perkebunan tebu (Bappeda,1997).

Hasil bumi yang sering dijumpai dan diperdagangkan di Bandar Lampung antara lain kopi, lada, dan pisang. Kopi dari Lampung terutama jenis robusta sudah mampu menembus pasar internasional. Kopi tersebut dikirim dalam bentuk kering. Berdasarkan data dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan Propinsi Lampung, ekspor kopi pada Januari-April 2001 mampu mencapai 43.971,37 ton atau senilai 26 juta dollar Amerika. Bila dibanding dengan periode tahun sebelumnya, volume ekspor kopi ini mengalami peningkatan hampir 43 persen.

Pasokan kopi kering diperoleh dari sentra-sentra penghasil kopi seperti Kabupaten Lampung Barat, Lampung Utara, dan Tanggamus. Melalui para eksportir, kopi yang sudah diseleksi mutunya dikirim ke berbagai negara tujuan misalnya Amerika Serikat, Jepang, Belanda, dan Jerman. Sampai saat ini, ekspor kopi masih dalam bentuk kering, belum dalam bentuk olahan.

Ekspor produk hasil bumi yang lain adalah lada hitam yang dipasok dari kabupaten di sekitar Bandar Lampung seperti Lampung Utara. Dilihat dari ekspor hasil



PROGRAM PASCA SARJANA
 MAJISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
 UNIVERSITAS DRIYOSEGORO

TESIS

PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI
 KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
 PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

PETA

BATAS-BATAS KOTA DAN KABUPATEN
 DI PROPINSI LAMPUNG

LEGENDA :

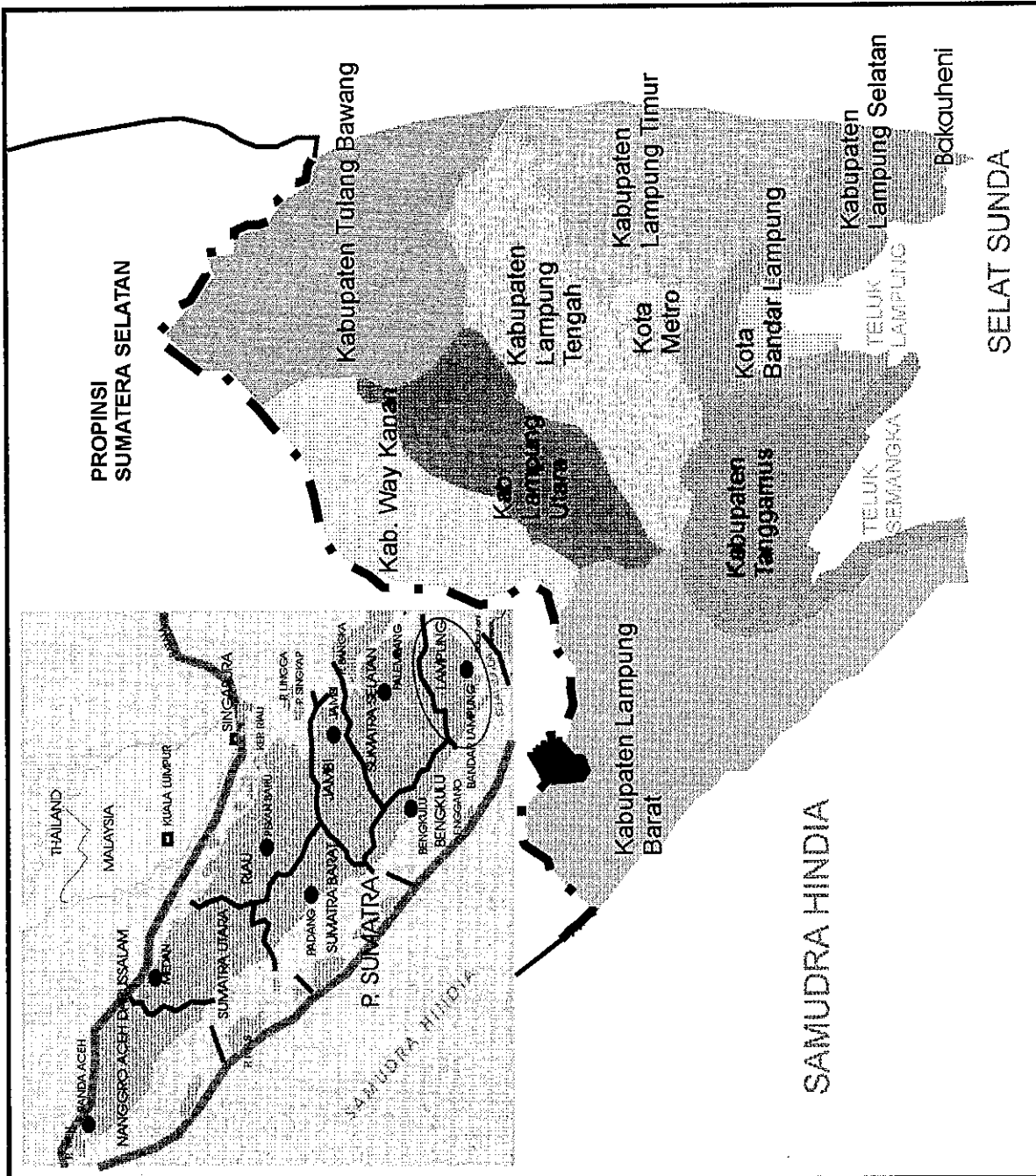
--- BATAS PROPINSI

DANAU

SUMBER

BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG

NO. GB	SKALA	UTARA
3.3	1 : 180.000	



PROPINSI
 SUMATERA SELATAN

SAMUDRA HINDIA

SELAT SUNDA

pertanian, lada hitam mampu menduduki posisi ketiga setelah kopi dan udang beku. Volume ekspor lada hitam dari Januari sampai dengan April 2001 mencapai 2.639 ton dengan nilai mencapai 5,8 juta dollar Amerika. Volume ini mengalami peningkatan sebesar 43 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun, nilainya mengalami penurunan sebesar 8,78 persen akibat penurunan nilai jual.

Produk perdagangan unggulan Kota Bandar Lampung lainnya adalah pisang. Buah ini banyak didatangkan dari Kabupaten Lampung Selatan, Tanggamus, Lampung Barat, Lampung Utara, dan Lampung Tengah. Ekspor pisang segar dari Provinsi Lampung pada caturwulan pertama tahun 2001 sekitar 316 ton dengan nilai 58.976 dollar Amerika, atau 0,02 persen dari total ekspor propinsi sebesar 245,6 juta dollar Amerika. Angka ini jauh lebih kecil dibandingkan ekspor di caturwulan yang sama tahun sebelumnya, yang nilainya mencapai 103.215 dollar Amerika. Ekspor pisang Indonesia selama ini ditujukan ke negara-negara di kawasan Asia terutama Cina (Kompas, Juli 2001).

Nilai ekspor regional Propinsi Lampung selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.4
NILAI EKSPOR BARANG DAN JASA PROPINSI LAMPUNG

TAHUN	NILAI EKSPOR (JUTA RUPIAH)
1993	2.163.777
1994	2.219.993
1995	2.343.942
1996	2.508.603
1997	2.502.590
1998	2.555.270
1999	2.539.536
2000	2.657.243
2001	2.724.931

Sumber: BPS, 1993-2001

3.1.5 Rencana Tata Ruang Kota Bandar Lampung

Untuk mewadahi kegiatan-kegiatan yang diharapkan akan berkembang di Kota Bandar Lampung maka penyediaan ruang dan pengembangannya diarahkan sebagai berikut (RUTRK, 1995):

1. Pengembangan tata ruang dilaksanakan secara ekstensif (horizontal) dengan memberikan ruang yang efisien sesuai dengan kebutuhan tiap kegiatan.
2. Pengembangan tata ruang dilaksanakan dengan sistem prioritas dan pengarahannya lokasi bagi kawasan "urbanized" yang belum terbangun, relokasi bagi penggunaan yang dipandang tidak sesuai, refungsionalisasi dan rehabilitasi bagi penggunaan ruang yang sudah besar penyimpangannya, dan konservasi pada bagian-bagian kawasan kota untuk dijaga kelestariannya.

Untuk mewujudkan pengembangan tata ruang demikian maka ditetapkan konsep tata ruang sebagaimana berikut:

1. Dengan mempertimbangkan keadaan fisik alam terutama keadaan topografi yang bergelombang, perkembangan fisik kota yang beragam, fungsi kota yang dikembangkan, serta pola penggunaan lahan yang telah ada yang mencirikan adanya pemisahan sektor-sektor kegiatan dan tidak hanya memiliki satu pusat kegiatan, maka diarahkan pusat kegiatan disebarkan pada daerah yang dianggap potensial dan sedikit kendala dalam pembangunan yang terbagi menjadi 6 Bagian Wilayah Kota dan pada tiap bagian wilayah kota terdapat pusat kegiatan yang memiliki fungsi utama dan fungsi pendukung.

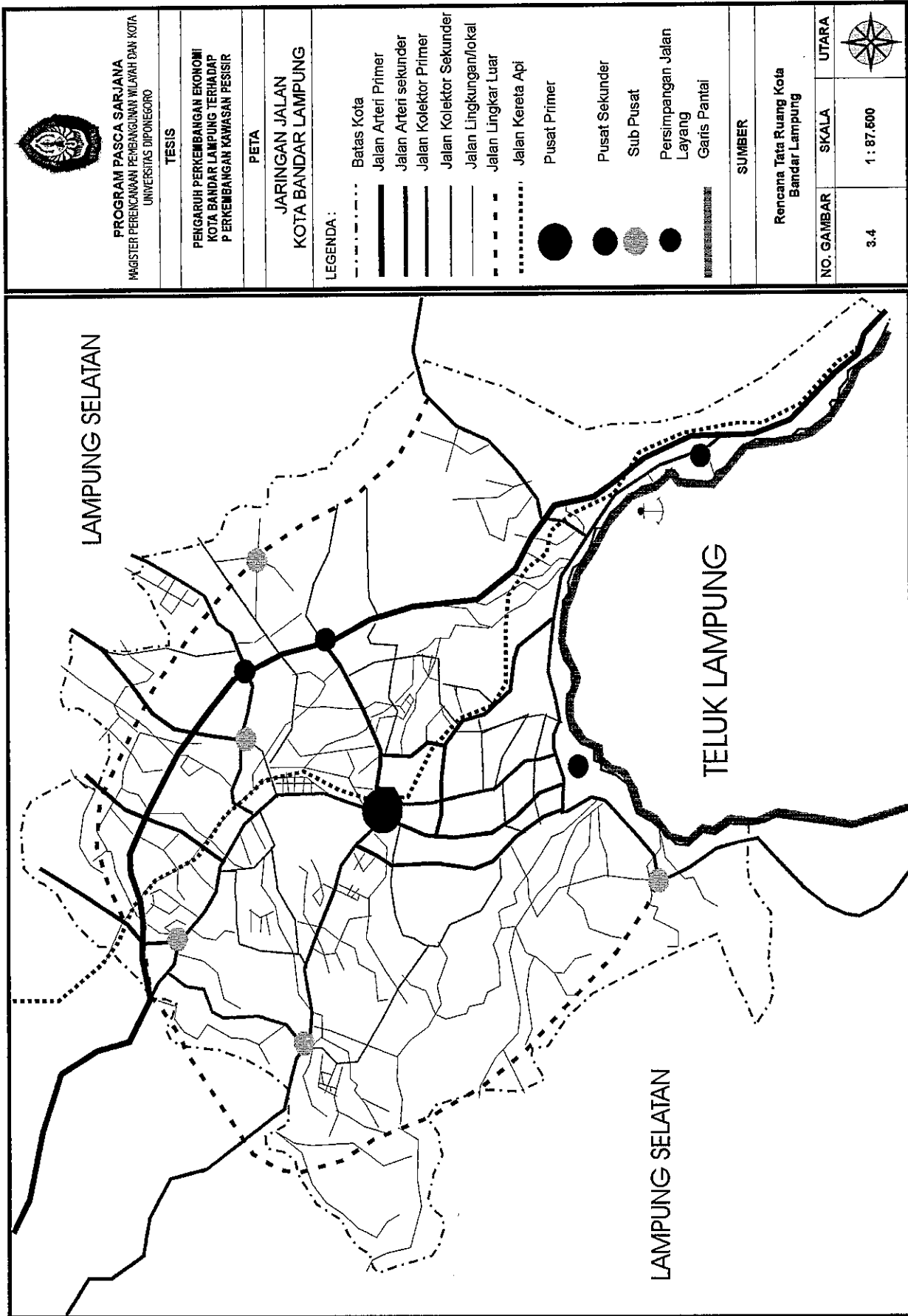
Di antara 6 pusat kegiatan terdapat 3 pusat kegiatan yang dominan dengan ruang lingkup pelayanan ekonomi regional, yaitu:

- Tanjung Karang, memiliki fungsi perdagangan barang sekunder dan tersier serta padat kegiatan jasa
- Teluk Betung, memiliki fungsi perdagangan grosir dan perkantoran pemerintah
- Panjang, memiliki fungsi sebagai transportasi pelabuhan, industri manufaktur dan pergudangan.

Sedangkan 3 pusat lainnya, yaitu kawasan Gedong Meneng berfungsi regional dalam bidang pendidikan dan sosial budaya, Langkapura sebagai kawasan perumahan skala besar, konservasi dan pusat hortikultura, sedangkan kawasan Sukarame berfungsi sebagai kawasan perumahan skala besar dan pusat pelayanan lokal.

2. Konsep bentuk fisik dan fungsional kota sebagaimana uraian di atas didukung oleh pola jaringan yang berbentuk melingkar (*ring road*) dan jari-jari (*radial*).

Jaringan jalan dan arahan penggunaan lahan Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.4 dan 3.5



LAMPUNG SELATAN

TELUK LAMPUNG

LAMPUNG SELATAN



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP
PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

PETA

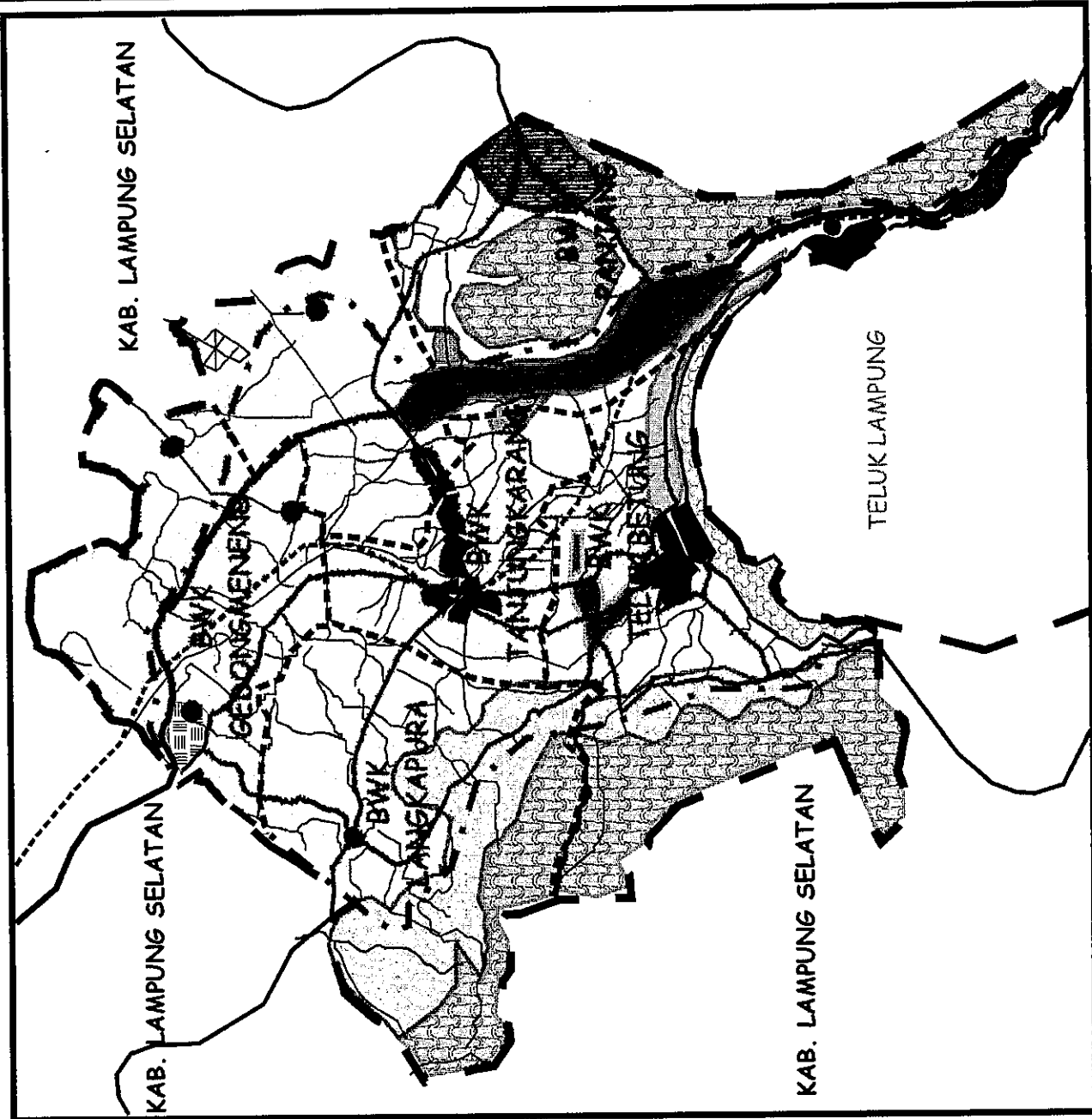
ARAHAN PENGGUNAAN LAHAN
KOTA BANDAR LAMPUNG

- Legenda :
- Batas Kota/Kabupaten
 - - - Batas BWK
 - Jalan Kolektor
 - Jalan Arteri Primer
 - Jalan Kolektor Primer
 - Daerah Permukiman
 - Kawasan Konservasi
 - Kawasan Pengembangan Terbatas (Elevasi 25 %)
 - Daerah Reklamasi (kawasan terbuka)
 - Daerah Pelabuhan
 - Daerah Perikanan
 - Daerah Pariwisata
 - Kawasan Industri
 - Pusat Pengembangan & Perdagangan
 - Kawasan Khusus Regional
 - Perdagangan & Industri campuran
 - Rencana Jalan Arteri Sekunder
 - Pusat Pertumbuhan
 - - - Jalan KA

SUMBER

BAPPEDA KOTA BANDAR LAMPUNG

NO. GAMBAR	SKALA	UTARA
3.5	0 900 2700 M 1	



3.2 Kondisi Umum Kawasan Pesisir Kota Bandar Lampung

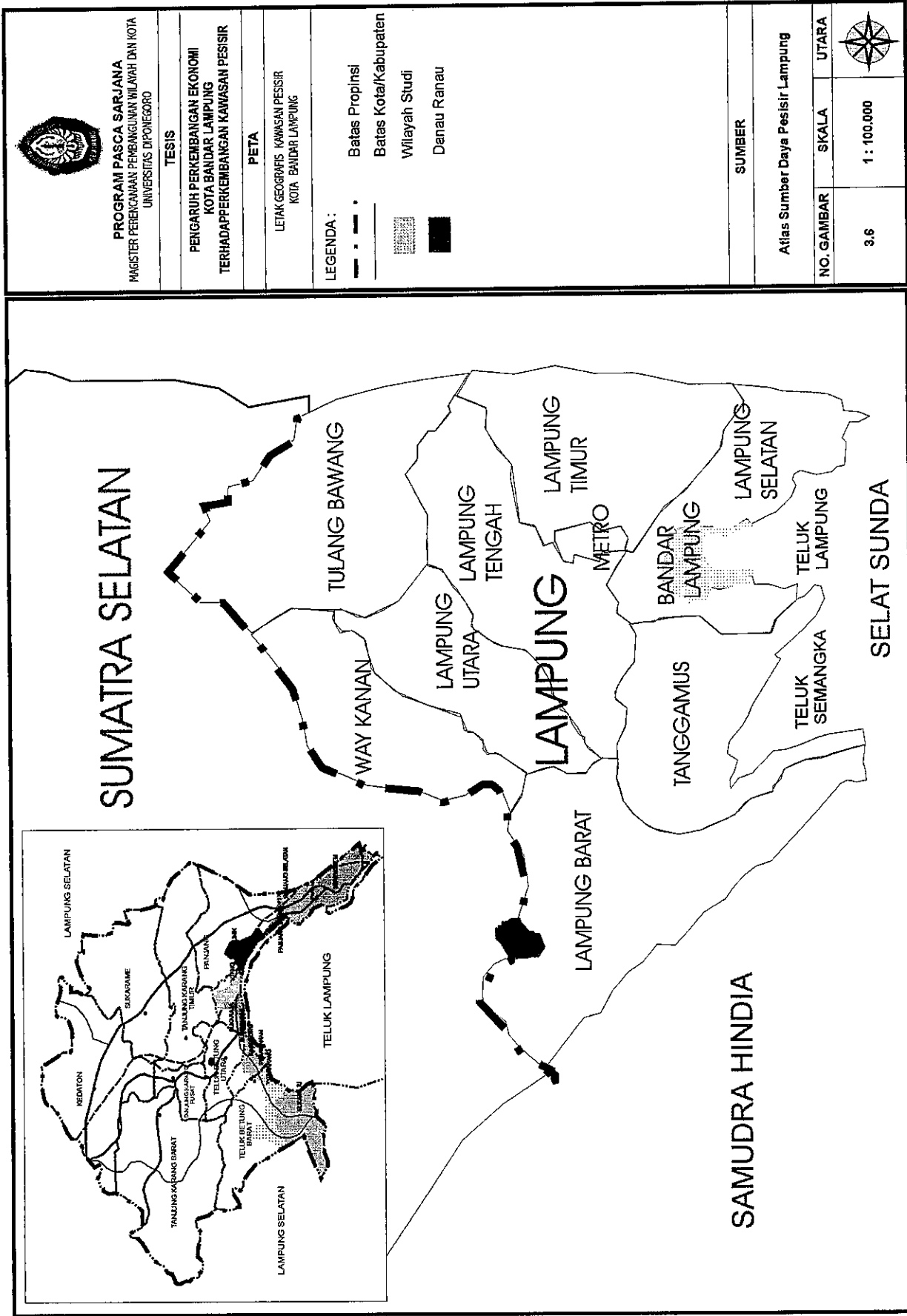
3.2.1 Kedudukan Geografis

Kota Bandar Lampung terletak di Teluk Lampung bagian selatan di ujung selatan Pulau Sumatra. Dari 84 kelurahan/desa yang ada di Bandar Lampung, 12 diantaranya merupakan desa pantai, yaitu wilayah administratif kelurahan yang memiliki garis pantai. Kedua belas kelurahan tersebut berada dalam 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Betung Barat, Kecamatan Teluk Betung Selatan, dan Kecamatan Panjang (Gambar 3.6). Secara keseluruhan, garis pantai yang dimiliki Kota Bandar Lampung adalah sepanjang 18 km (PKSPL-IPB, 2002).

3.2.2 Kondisi Fisik Dasar

Pesisir di Kota Bandar Lampung memiliki dua macam geomorfologi. Pertama, berupa pedataran, yaitu dari Kalianda sampai Lempasing yang tertak pada lembah antara perbukitan dan muara-muara sungai. Elevasi ketinggian 0 hingga + 10 m, kemiringan lereng 0 – 3%. Batuan penyusun dominan adalah endapan-endapan aluvium, rawa, serta batu gamping terumbu. Kedua, kaki perbukitan terletak disekitar Teluk Ratai. Daerah pantainya beraneka ragam, terdiri dari perbukitan kasar dan bertebing terjal dengan garis pantai yang sempit dan berkelok-kelok. Elevasi ketinggian sekitar 0 – 100 m dengan kemiringan lereng 8 – 30% atau lebih. Batuan penyusun yaitu lava andesitik-basaltik, breksi gunung api, batu pasir, dan batu gamping terumbu (PKSPL-IPB, 2002).

Sumber daya geologi di pesisir Bandar Lampung antara lain berupa mata air dengan debit 50 – 100 l/dt dan bahan galian terutama bahan galian golongan C yang telah diusahakan secara tradisional dan modern, yaitu andesit dan basalt baik sebagai tubuh intrusif maupun bongkahan sedimen, terdapat di Teluk Betung, Tanjung Karang, dan Panjang. Sedangkan proses geologi yang terjadi di pesisir Bandar Lampung antara lain



abrasi di sekitar Teluk Ratai, patahan di Tanjung Karang, dan intrusi air laut di sekitar Lempasing. Dengan adanya perubahan hutan bakau menjadi tambak yang berlebihan menyebabkan kondisi abrasi dan intrusi air laut menjadi lebih buruk. Selain itu, penggalian bahan galian C dapat mengganggu tata air setempat (*water table*), akibatnya, ketersediaan air tanah di kawasan sekitar menjadi langka.

3.2.3 Kondisi Sosial Kependudukan

Sebagaimana kondisi sosial Kota Bandar Lampung umumnya, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung juga dihuni oleh penduduk yang beragam suku bangsanya. Adat budaya Lampung yang lebih dekat ke daratan menyebabkan pemanfaatan wilayah pesisir oleh masyarakat asli kurang mendapat perhatian. Mereka cenderung untuk mengolah lahan pertanian dan perladangan daripada menangkap ikan di laut. Hal ini menyebabkan kawasan pesisir lebih didominasi oleh pendatang yang tinggal dan menetap untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung (dalam unit kelurahan/desa pesisir) dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.5
JUMLAH PENDUDUK PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 1993-2001

NO	KELURAHAN	JUMLAH PENDUDUK TAHUN:								
		1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
1	Serengsem	5.878	5.921	5.970	6.100	6.152	6.254	8.476	8.568	8.611
2	Panjang Selatan	15.940	15.977	16.075	19.784	20.499	28.420	28.468	28.785	28.932
3	Panjang Utara	13.213	13.228	13.277	13.661	13.678	18.150	18.503	18.831	19.084
4	Way Lunik	5.395	6.700	6.829	7.284	7.701	8.017	9.318	9.529	9.530
5	Garuntang	9.054	9.095	9.120	9.144	9.186	12.153	12.295	12.692	12.777
6	Sukaraja	9.505	9.586	9.668	9.704	9.766	9.815	10.215	13.180	13.251
7	Bumi Waras	14.354	14.441	14.555	14.655	14.798	14.818	18.135	20.006	21.007
8	Kangkung	10.025	10.252	10.654	12.039	12.078	14.192	14.465	16.687	16.988
9	Pesawahan	13.311	13.783	13.789	13.863	14.192	14.465	16.900	17.581	17.692
10	Kota Karang	11.659	11.717	11.725	13.266	13.291	13.328	17.317	18.820	18.900
11	Keteguhan	2.518	3.213	3.349	5.240	5.262	5.265	7.061	7.620	7.334
12	Sukamaju	2.242	2.501	2.577	3.687	3.729	3.737	4.110	5.218	5.579
	Jumlah	113094	116414	117588	128427	130332	148614	165263	177517	17685

Sumber: BPS, 1993-2001

3.2.4 Kondisi Perekonomian

Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung umumnya di dominasi oleh aktivitas perdagangan dan industri sebagaimana yang diarahkan dalam rencana tata ruang kota. Hanya beberapa kawasan saja yang masih banyak aktivitas di sektor kelautan/perikanannya. Khusus sektor industri (industri besar, kecil, dan aneka industri), perbandingan jumlah industri dan pekerja sektor industri di kawasan pesisir dibandingkan dengan jumlah industri dan tenaga kerja sektor industri di Kota Bandar Lampung selama 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.6
JUMLAH INDUSTRI
DI KAWASAN PESISIR DAN KOTA BANDAR LAMPUNG

KAWASAN PESISIR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Kel. Serengsem	5	5	7	8	8	8	8	8	8
Kel. Panjang Selatan	6	6	6	6	6	6	6	6	6
Kel. Panjang Utara	4	4	4	4	12	12	15	15	15
Kel. Way Lunik	20	20	20	22	22	26	26	29	29
Kel. Garuntang	6	6	6	13	13	15	15	15	15
Kel. Sukaraja	6	6	6	6	6	6	11	11	11
Kel. Bumi Waras	5	7	7	7	7	7	8	8	8
Kel. Kangkung	11	16	16	16	16	16	17	17	17
Kel. Pesawahan	14	14	14	14	14	14	14	14	14
Kel. Kota Karang	-	-	2	2	2	2	2	2	2
Kel. Keteguhan	5	5	6	6	6	6	6	6	6
Kel. Sukamaju	3	3	3	3	3	3	3	4	4
JUMLAH	85	92	97	107	115	121	131	135	135
KOTA BANDAR LAMPUNG	1993	1994	1995	1996	1997	1997	1999	2000	2001
JUMLAH	192	198	199	207	222	228	238	242	242

Sumber: BPS dan Kelurahan, 1993-2001

TABEL 3.7
JUMLAH TENAGA KERJA DI SEKTOR INDUSTRI
DI KAWASAN PESISIR DAN KOTA BANDAR LAMPUNG

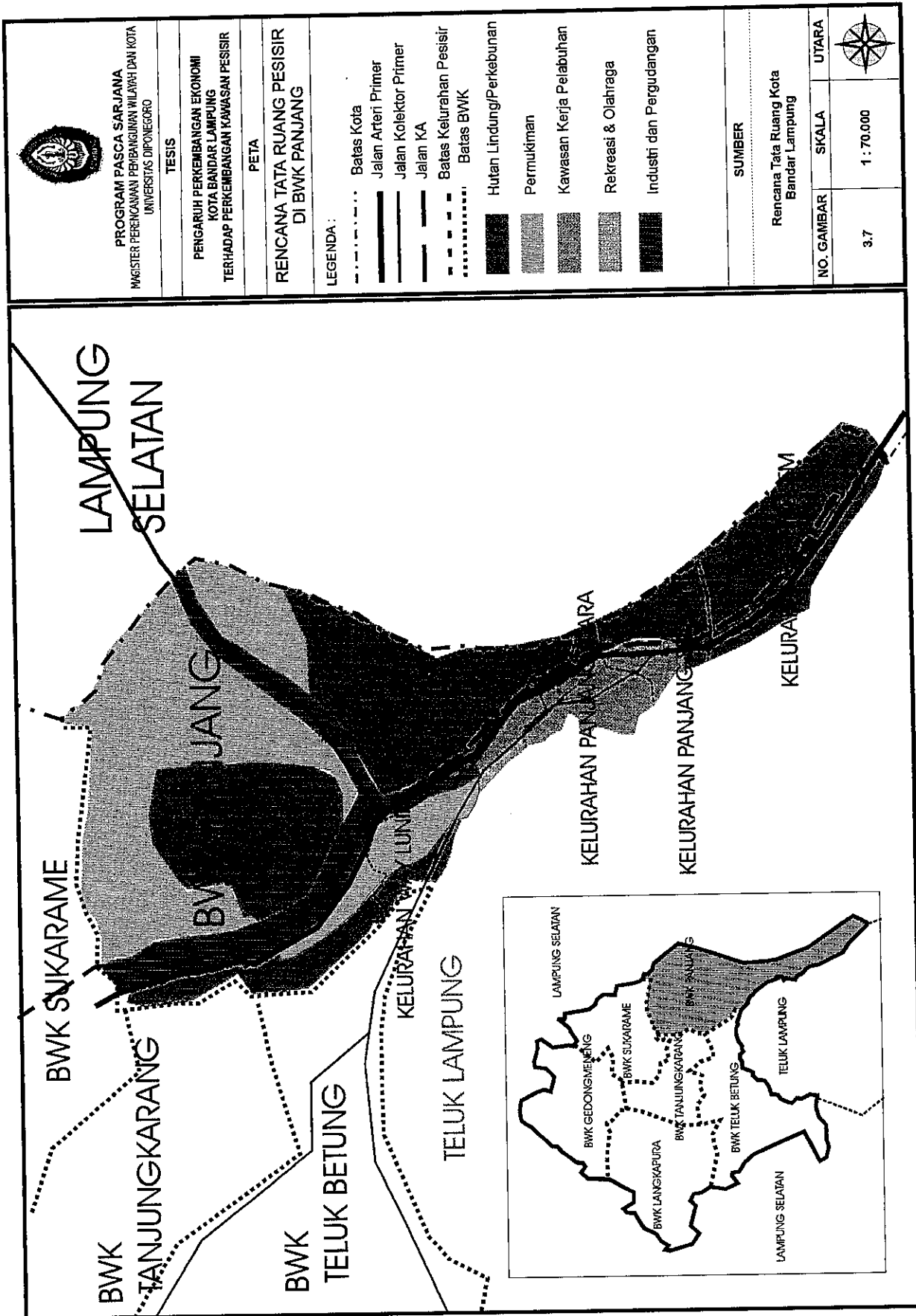
KAWASAN PESISIR	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Kel. Serengsem	404	404	404	516	516	404	516	516	516
Kel. Panjang Selatan	366	366	366	366	379	660	660	660	660
Kel. Panjang Utara	316	316	316	316	316	317	317	317	317
Kel. Way Lunik	537	537	537	537	537	482	492	492	492
Kel. Garuntang	272	272	272	272	272	273	273	273	273
Kel. Sukaraja	43	43	43	43	43	43	43	43	43
Kel. Bumi Waras	140	140	140	140	140	148	148	148	148
Kel. Kangkung	9	9	9	9	9	9	9	9	9
Kel. Pesawahan	28	28	28	28	28	35	35	35	35
Kel. Kota Karang	2633	2633	2633	3420	3425	3425	3425	3425	3425
Kel. Keteguhan	1273	1273	1273	2219	2228	2228	2228	2228	2228
Kel. Sukamaju	756	756	756	1309	1331	1331	1331	1331	1331
JUMLAH	6.777	6.777	6.777	9.175	9.224	9.355	9.477	9.477	9.477
KOTA BANDAR LAMPUNG	1993	1994	1995	1996	1997	1997	1999	2000	2001
JUMLAH	15.510	16.599	16.839	18.165	19.800	19.800	19.985	19.985	19.985

Sumber: BPS dan Kelurahan, 1993-2001

3.2.5 Kondisi Tata Ruang

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Kota (RTRK) Bandar Lampung, kawasan pesisir terletak pada 2 Bagian Wilayah Kota (BWK), yaitu BWK Panjang dan BWK Teluk Betung dimana kedua BWK tersebut termasuk pusat kegiatan yang dominan, dengan ruang lingkup pelayanan regional. Penggunaan lahan kawasan pesisir di masing-masing BWK diarahkan pada (Gambar 3.7 dan Gambar 3.8):

- Kawasan pesisir di BWK Teluk Betung: ruang terbuka/hutan, jasa penunjang kawasan pendidikan dan perkantoran, perdagangan dan pemukiman.
- Kawasan pesisir di BWK Panjang: daerah konservasi, permukiman, industri dan pergudangan, rekreasi dan olahraga, kawasan kerja/kepentingan pelabuhan, perdagangan dan jasa.



PROGRAM PASCA SARJANA
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA
UNIVERSITAS DIPONEGORO

TESIS

PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDAR LAMPUNG
TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

PETA

RENCANA TATA RUANG PESISIR
DI BWK PANJANG

LEGENDA :

- Batas Kota
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan KA
- - - - - Batas Kelurahan Pesisir
- Batas BWK
- Hutan Lindung/Perkebunan
- Permukiman
- Kawasan Kerja Pelabuhan
- Rekreasi & Olahraga
- Industri dan Pergudangan

SUMBER

Rencana Tata Ruang Kota
Bandar Lampung

NO. GAMBAR	SKALA	UTARA
3.7	1 : 70.000	

Saat ini kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung sebagian besar dijadikan lahan pemukiman. Berbagai perusahaan, perkantoran, lokasi pergadangan, dan tempat hiburan yang terletak di sepanjang pesisir tersebut di samping beberapa tempat wisata pantai yang juga menjadi faktor penarik sehingga kawasan pesisir di Kota Bandar Lampung menjadi ramai. Selain itu, terdapat juga industri yang sebagian besar terletak di wilayah DAS Way Kuala (22 industri), lalu DAS Way Lunik (13 Industri), Das Way Pancoran (5 industri), DAS Way Kunyit (2 industri), dan 1 industri di Way Kupang. Dari gambaran tersebut, kemungkinan pencemaran oleh industri terjadi di wilayah yang dekat dengan Pelabuhan Panjang. Kondisi eksisiting kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.9 Gambar 3.10, dan Gambar 3.11. Termasuk yang menyebabkan ramainya aktivitas diawasan pesisir Kota Bandar Lampung adalah terdapatnya Pelabuhan Panjang yang berperan sebagai pelabuhan ekspor-impor dan antar pulau. Kondisi fisik perairan Pelabuhan Panjang memungkinkan pengembangannya sebagai gerbang internasional (PKSPL-IPB, 2002).

Dengan perannya sebagai simpul koleksi dan distribusi barang dan jasa, maka keberadaan Pelabuhan Panjang bagi Kota Bandar Lampung sangat penting. Dengan kecenderungan peningkatan volume bongkar muat sebesar 4% per tahun di Pelabuhan Panjang, maka telah direncanakan perluasan kawasan pelabuhan oleh PT Pelindo II. Untuk saat ini dan waktu yang akan datang Pelabuhan Panjang menjadi tumpuan perkembangan Kota Bandar Lampung. Peningkatan volume ekspor melalui Pelabuhan Panjang selama kurun waktu 9 tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut:

TABEL 3.8
VOLUME EKSPOR MELALUI PELABUHAN PANJANG
TAHUN 1993-2001

TAHUN	VOLUME (TON)
1993	1.341.564
1994	1.366.156
1995	1.591.886
1996	1.700.673
1997	1.897.526
1998	2.124.999
1999	2.532.973
2000	3.016.417
2001	3.780.206

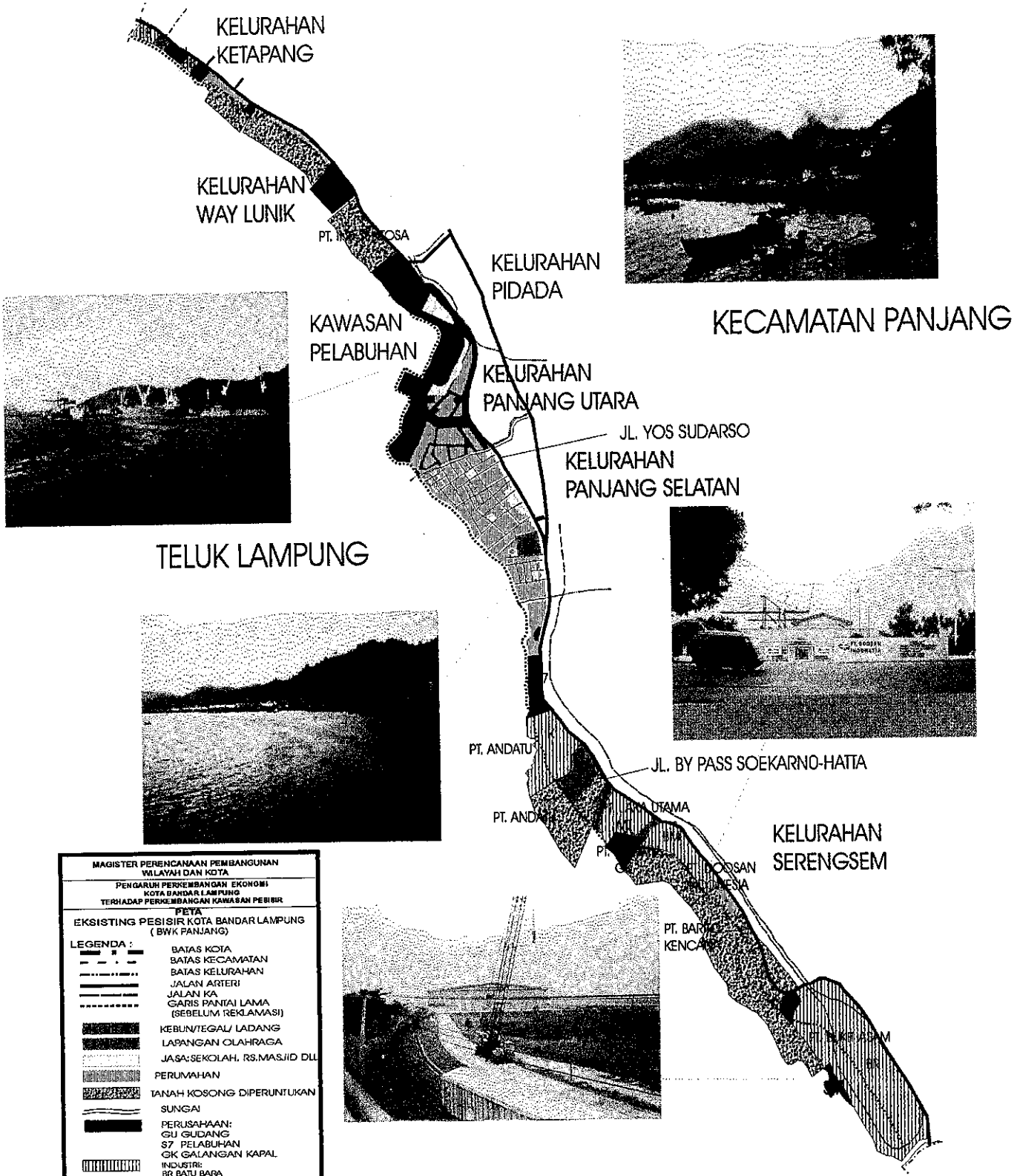
Sumber: BPS, 1993-2001

Sedangkan semakin terbatasnya lahan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terlihat dari luas pekarangan di kelurahan-kelurahan pesisir selama kurun waktu 9 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tabel berikut:

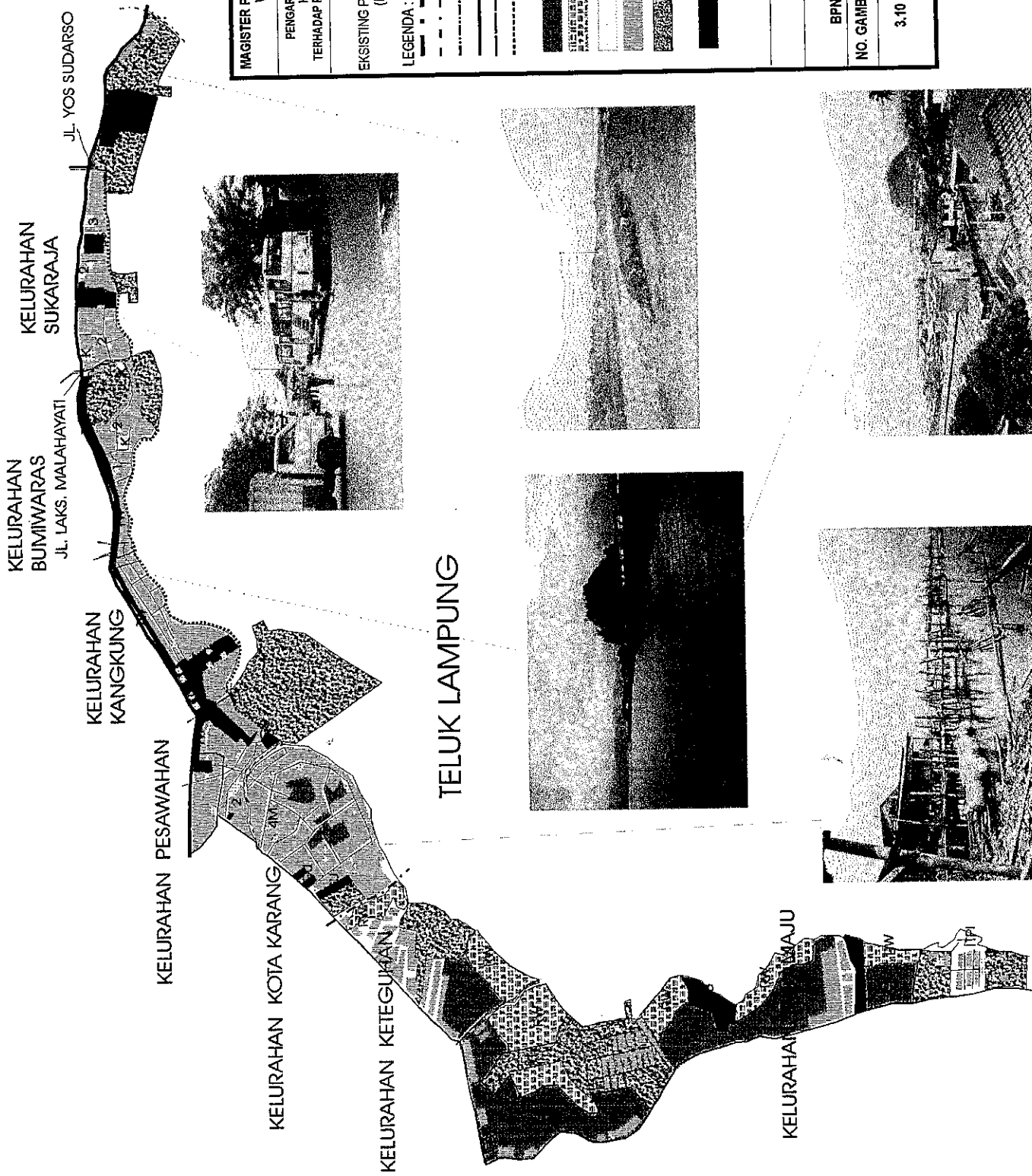
TABEL 3.9
LUAS PEKARANGAN DI KAWASAN PESISIR TAHUN 1993-2001

KAWASAN PESISIR	LUAS PEKARANGAN (HA)								
	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Kel. Serengsem	100,5	100,5	100,5	97	97	97	92,4	92,4	92,4
Kel. Panjang Selatan	81	81	81	76	76	76	76	76	76
Kel. Panjang Utara	147	147	147	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5	81,5
Kel. Way Lunik	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8	57,8
Kel. Garuntang	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3	74,3
Kel. Sukaraja	13	13	13	13	13	13	13	7,5	7,5
Kel. Bumi Waras	18	18	18	18	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5
Kel. Kangkung	3,7	3,7	3,7	-	-	-	-	-	-
Kel. Pesawahan	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Kel. Kota Karang	56	56	56	56	56	56	56	56	56
Kel. Keteguhan	163	163	163	163	81	81	81	81	81
Kel. Sukamaju	148	148	148	148	148	93	93	93	93
JUMLAH	874,3	874,3	874,3	796,6	702,1	647,1	647,1	641,6	641,6


Sumber: BPS, 1993-2001

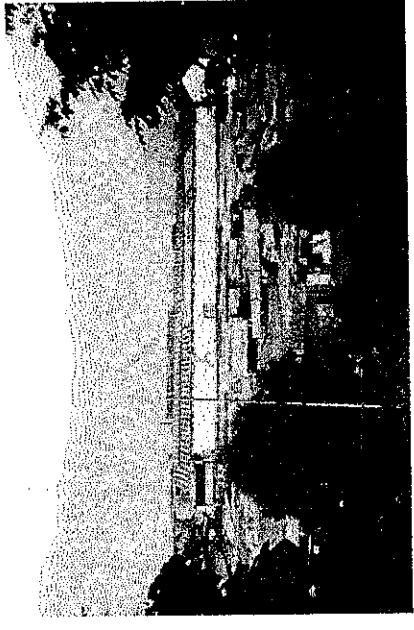
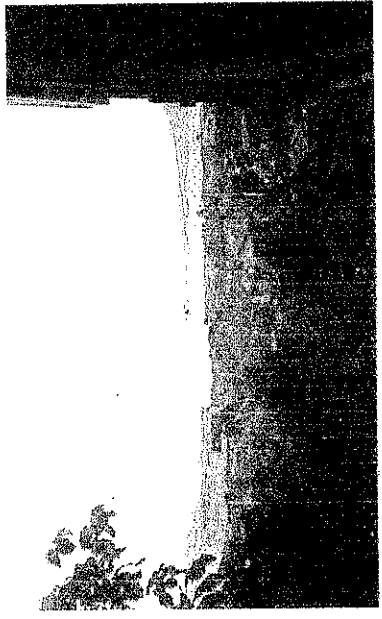
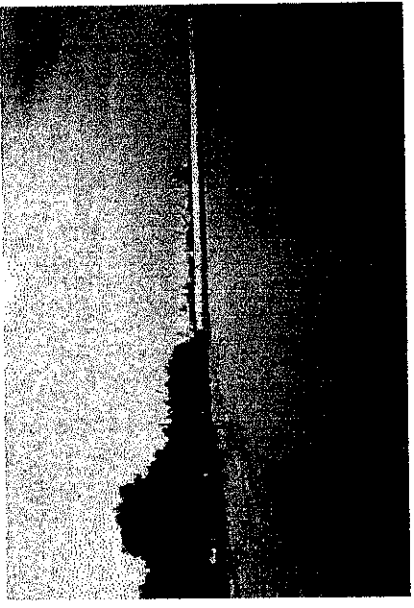
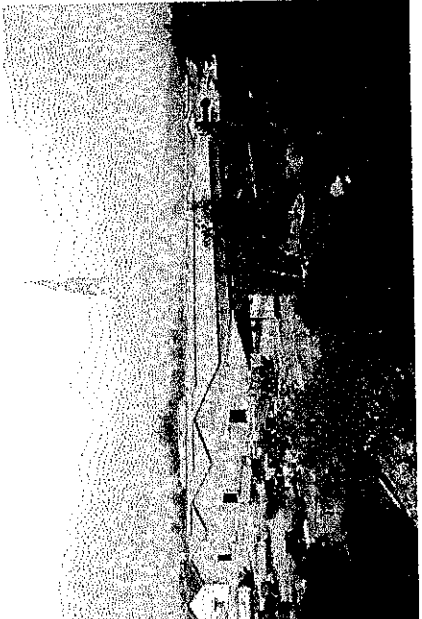
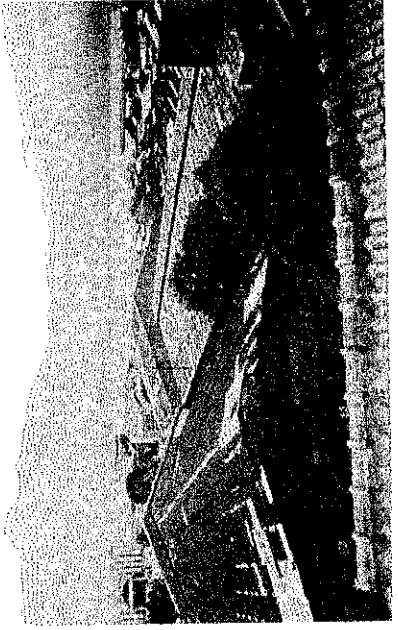


MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA		
PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR		
PETA EKSTING PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (BWK PANJANG)		
LEGENDA :		
[Symbol]	BATAS KOTA	
[Symbol]	BATAS KECAMATAN	
[Symbol]	BATAS KELURAHAN	
[Symbol]	JALAN ARTERI	
[Symbol]	JALAN KA	
[Symbol]	GARIS PANTAI LAMA (SEBELUM REKLAMASI)	
[Symbol]	KEBUN/TEGAL/ LADANG	
[Symbol]	LAPANGAN OLAHRAGA	
[Symbol]	JASA: SEKOLAH, RS, MASJID DLL	
[Symbol]	PERUMAHAN	
[Symbol]	TANAH KOSONG DIPERUNTUKAN	
[Symbol]	SUNGAI	
[Symbol]	PERUSAHAAN:	
[Symbol]	GU GUDANG	
[Symbol]	S7 PELABUHAN	
[Symbol]	GK GALANGAN KAPAL	
[Symbol]	INDUSTRI:	
[Symbol]	SB BATU BAGA	
[Symbol]	BB BAHAN BANGUNAN	
[Symbol]	BM BAHAN MAKANAN	
[Symbol]	MT MAKANAN TERSAK	
[Symbol]	K WYU & ALAT BERAT	
SUMBER		
OBSERVASI DAN BPN KOTA BANDAR LAMPUNG		
NO. GAMBAR	SKALA	UTARA
3.9	1 : 65.000	



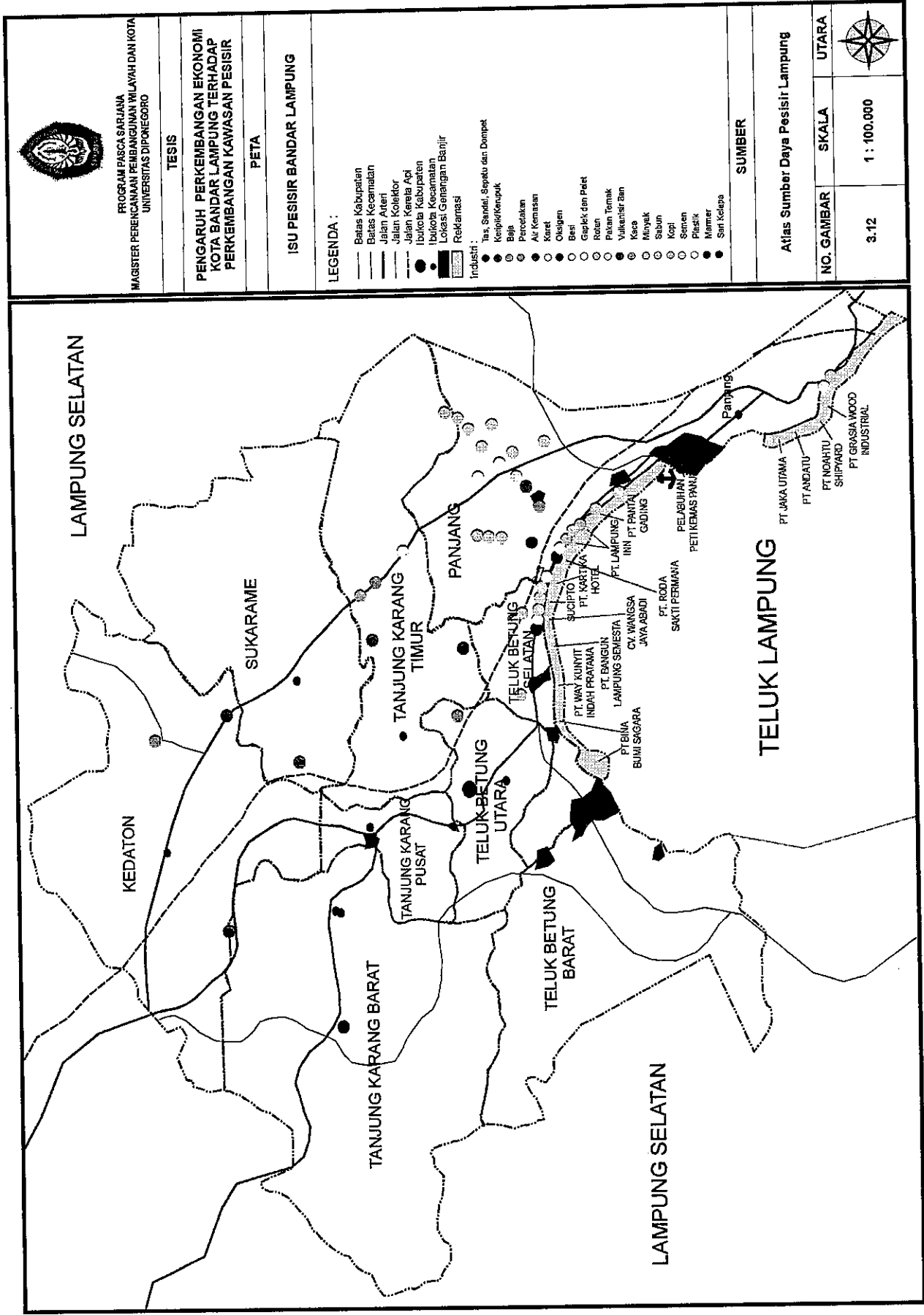
MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA	
PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR	
PETA	
EKISTING PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG (BMK TELUK BETUNG)	
LEGENDA :	
—	BATAS KOTA
- - -	BATAS KECAMATAN
— · — ·	BATAS KELURAHAN
— · — · — ·	JALAN ARTERI
— · — · — · — ·	JALAN KA
— · — · — · — · — ·	GARIS PANTAI LAMA (SEBELUM REKLAMASI)
■	KEBUNTEGAL/ LADANG
■	RAWA (RW)
■	JASA-SEKOLAH, RS, MASJID DLL
■	PERUMAHAN
■	TANAH KOSONG DIPERUNTUKAN
■	PERUSAHAAN:
■	GU GUDANG, S7, PELABUHAN,
■	TW TOKO, HT, HOTEL, HB TEMPAT
■	HBURAN, TPI, PELELANGAN IKAN
SUMBER	
OBSERVASI DAN BPN KOTA BANDAR LAMPUNG	
NO. GAMBAR	UTARA
3.10	1 : 65.000

 PROGRAM PASCA SARJANA MAGISTER PERENCANAAN PEMBANGUNAN WILAYAH DAN KOTA UNIVERSITAS DIPONEGORO
TESIS
PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI KOTA BANDAR LAMPUNG TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR
FOTO
EKSISTING PESISIR KOTA BANDAR LAMPUNG
SUMBER
OBSERVASI
NO. GAMBAR: 3.11



Selain itu, terdapat suatu permasalahan yang menjadi satu isu utama pesisir Kota Bandar Lampung, yaitu reklamasi pantai. Reklamasi pantai yang dilakukan di Teluk Lampung sejak tahun 1983 pada awalnya bertujuan untuk merancang kembali kawasan pantai Teluk Lampung (Bandar Lampung dan Lampung Selatan) dengan menimbun laut sampai kedalaman 3 m sehingga terbentuk suatu kawasan pantai yang akan mendukung sistem pengembangan kota pantai yang disebut dengan *water front city*. Sejak tahun 1983 sampai dengan 1990 telah diberikan izin penimbunan pantai tidak kurang dari 18 perusahaan dan 7 perorangan, dengan luas 650 Ha, yang sebagian besar berada di wilayah Bandar Lampung (450 Ha). Pada kenyataannya, saat ini proses penimbunan pantai tidak dilaksanakan sebagaimana rencana semula, tidak ada lahan bebas sepanjang pantai yang telah ditimbun. Menurut rencana semula, sepanjang pantai dengan lebar 60 m harus bebas, berupa jalan 20 m, sempadan pantai 30 m, dan batas jalan dengan bangunan 10 m. Selain itu, semua bangunan harus menghadap ke pantai sehingga setiap masyarakat dapat menikmati keindahan pantai dan laut tanpa harus membayar ke penimbun pantai. Para penimbun pantai dapat memanfaatkan areal timbunannya pada jarak 60 m dari bibir pantai. Kondisi reklamasi pantai saat ini sangat menyedihkan karena bagian-bagian yang telah direklamasi tidak menyatu atau terpotong-potong. Muara-muara sungai banyak yang menyempit, tidak ada sempadan sungai, drainase terganggu sehingga dapat menyebabkan banjir atau genangan pada saat hujan lebat bersamaan dengan pasang air laut. Upaya Pemerintah Daerah untuk mengatasi dampak negatif reklamasi yang lebih besar adalah dengan menghentikannya sementara berdasarkan usulan Tim Pengendalian Penimbunan Pantai Propinsi Lampung (PKSPL-IPB, 2002). Isu menyangkut kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dapat dilihat pada Gambar 3.12.

1. Langkanya air tawar di darah pemukiman pantai di Teluk Betung dan Panjang terutama di pemukiman yang berada di sempadan pantai.
2. Pembuangan sampah dan limbah padat dari pantai Kota Bandar Lampung belum dilaksanakan secara terpadu sehingga menimbulkan pencemaran limbah padat berbau busuk di kawasan pesisir
3. Keinginan pengusaha industri untuk menjaga kualitas limbah cair yang dibuang ke perairan umum masih rendah dan mekanisme kontrol masih belum terintegrasi secara terpadu. Sistem ganti rugi akibat pencemaran tidak efisien secara ekologis, ekonomi atau sosial.
4. Pola bangunan yang membelakangi pantai menjadikan suasana lingkungan pantai menjadi kotor.
5. Pola pengembangan wisata pantai belum berwawasan lingkungan dan tidak tersedia fasilitas pendukung sehingga terlihat tidak profesional.
6. Berhentinya program *Water Front City 2000* berakibat pada perubahan situasi, yaitu nelayan kembali ke tempatnya semula diluar perencanaan semula dengan kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana yang cukup dari pemerintah.
7. Sanitasi pemukiman pesisir belum memadai karena pemahaman masyarakat terhadap sanitasi lingkungan masih rendah
8. Reklamasi pantai tanpa studi amdal/izin formal dan tanpa perencanaan tepat mengakibatkan perubahan kondisi lingkungan pesisir seperti terjadinya banjir
9. Kurangnya partisipasi pihak swasta dan masyarakat dalam pembangunan sumber daya pesisir akibat proses pengambilan keputusan yang tidak terkoordinasi.
10. Belum adanya tata ruang kawasan pesisir yang secara detil dapat menjadi acuan untuk menentukan peruntukan pemanfaatannya.



Namun demikian, hasil penelitian tentang kualitas air perairan Teluk Lampung, termasuk kawasan pesisir Bandar Lampung, masih sangat kurang. Oleh karena itu dibuat suatu formula yang dapat mencerminkan kualitas perairan berdasarkan kandungan beberapa parameter kunci seperti pestisida, logam berat (Hg, Cd, Cu, Pb, dan Cr), minyak, coliform, TSS, dan bahan organik (BOD dan COD). Berdasarkan formula tersebut disimpulkan bahwa perairan Teluk Lampung bagian dalam diklasifikasikan memiliki kualitas perairan cukup baik, dengan taraf tercemar ringan. Tabel berikut menunjukkan kualitas perairan Teluk Lampung (PKSPL-IPB, 2002):

TABEL 3.10
NILAI KONSENTRASI PARAMETER KUALITAS AIR
DI PERAIRAN TELUK LAMPUNG

NO	PARAMETER	SATUAN	KISARAN	BAKU MUTU
1	Suhu	°C	28,0 - 31,5	Alami
2	Salinitas	Psu	22,8 - 23,5	Alami (10%)
3	PH	-	7,96 - 8,22	6,5 - 8,5
3	Pembacaan <i>Seichi disk</i>	M	1,13 - 7,55	> 3
5	Kekeruhan	NTU	1,61 - 3,37	< 3
6	Oksigen Terlarut	mg/l	3,2 - 6,2	> 4
7	BOD5	mg/l	10 - 40	< 40
8	COD	mg/l	398 - 123	< 40
9	Minyak (Lapisan)	mg/l	-	
10	Coliform	Sel/100 ml	0 - 700	< 1.000
11	TSS	mg/l	10 - 34	< 23
12	Logam Berat:			
	- Hg (Air raksa)	mg/l	< 0,001-0,104	< 0,003
	- Cr (Crom)	mg/l	< 0,009-0,054	< 0,01
	- Pb (Timbal)	mg/l	< 0,019-0,069	< 0,01
	- Cu (Tembaga)	mg/l	< 0,013- 0,031	< 0,06
	- Cd (Cadmium)	mg/l	< 0,024-0,044	< 0,01

Sumber: PKSPL-IPB, 2002

Dari survey primer yang dilakukan didapatkan data persepsi masyarakat setempat mengenai kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang selengkapnya tersaji pada Tabel 3.11.

3	Penurunan mutu lingkungan wilayahpesisir	Rasa air (3 responden abstain)	Asin	6	8	8	3	1	6	6	1	7	15	61	31,7		
		Kekeruhan air (6 responden abstain)	Payau	4	2	7		5	1					1	36	18,8	
			Agak payau				13	1	4	1	2	3			24	12,5	
			Tawar	6	6	1		9	5	9	13	6	13		68	35,4	
			Sangat keruh				6			1	1	1			8	4,2	
		<u>Pencemaran Udara:</u> Debu di udara (6 responden abstain)	Agak keruh			6	5	5	5	6	5	2	4	14	63	32,8	
			Bening	16	16	10	2	9	9	7	13	11	14		107	55,7	
			Sangat bening				3		3	1	3	1			8	4,2	
			Debu selalu ada & mengganggu	6	7	1	14	4	2	4	2	4	2	2	1	43	22,4
		Bau (6 responden abstain)	Debu selalu ada tapi tidak mengganggu	10	2	13		8	9	8	8	4	4	1	15	74	38,5
			Ada sedikit debu		6		2	2	3	4	10	9			6	42	21,9
			Tidak terlihat adanya debu			2			2				1	12	10	27	14,1
			Sangat tidak enak					1	2	1	2	1	7	2		13	6,8
		Kebisingan (5 responden abstain)	Tidak enak		1					1	1	1	1			4	2,1
			Bau tapi tidak mengganggu	14	7	13	10	3	8	11	8	3	13	14		104	54,2
Tidak berbau	2		8	3	5	10	5	3	3		11	1	16	64	33,3		
Sangat bising	1				1	1	2		2					5	2,6		
Estetika Lingkungan (5 responden abstain)	Bising	15	14	14	13	1	6	7	1	3	2			76	39,6		
	Tidak bising		2			6	10	5	13	13	12			61	31,8		
	Senyap/sepi			2	2	6	2	2	2	2		15	16	45	23,4		
	Tdk enak dilihat						3	3	8	1				15	7,8		
Kondisi permukiman (5 responden abstain)	Tidak indah	14	7	14	13	11	4	4	6	1		2		76	39,6		
	Indah	2	9	2	3	3	9	9	2	14	14	13	16	96	50		
	Sangat indah																
	Sangat buruk						2		4					6	3,1		
Baik	Buruk		6	1		1	1	1	1	1				11	5,7		
	Sedang	14	2	15	16	12	12	10	11	15	13	10		130	67,7		
	Baik	2	8			1	1	5		1	1	5	16	40	20,8		

4	Penurunan daya dukung lingkungan wilayah pesisir	Frekuensi banjir (6 responden abstain)	Sangat sering						1	10	54	28,1
			1	2	3	4	5	6				
			1									2,6
			4	6	1	2	2	1	1	16	8,3	
			9	14	9	15	3	7	5	14	14	57,8
			2	2	1	10	8	7	11	2	2	28,1

Keterangan:

1. Kelurahan Serengsem
2. Kelurahan Panjang Selatan
3. Kelurahan Panjang Utara
4. Kelurahan Way Lunik
5. Kelurahan Garuntang
6. Kelurahan Sukaraja
7. Kelurahan Bumi Waras
8. Kelurahan Kangkung
9. Kelurahan Pesawahan
10. Kelurahan Kota Karang
11. Kelurahan Keteguhan
12. Kelurahan Sukamaju

Sumber: Hasil Survey Primer, 2003

3.3 Resume

Kota Bandar Lampung merupakan ibukota Propinsi Lampung. Kota ini berada di Teluk Lampung di bagian selatan Propinsi Lampung. Lokasi ini menempatkan Kota Bandar Lampung pada posisi yang strategis, terutama sebagai pintu gerbang antara Pulau Jawa dan Pulau Sumatra. Kota Bandar Lampung berpotensi menjadi salah satu simpul distribusi barang dan jasa nasional ditunjang oleh sumber daya yang memadai dan prospek yang dimiliki Propinsi Lampung.

Beberapa faktor yang mempengaruhi perkembangan Kota Bandar Lampung anatar lain faktor penduduk yang ditandai dengan jumlah yang terus meningkat dengan tingkat pertumbuhan 3,11% per tahun. Di sektor ekonomi perkembangan dapat dilihat dari volume ekspor melalui Pelabuhan Panjang yang terus meningkat tiap tahunnya serta dominasi sektor sekunder dan tersier dalam pembentukan PDRB kota. Sedangkan perubahan secara fisik ditandai oleh ketersediaan lahan kosong yang terus berkurang.

Meskipun Kota Bandar Lampung memiliki prospek perkembangan yang positif, namun Kota Bandar Lampung dihadapkan pada salah satu isu utama secara fisik yang membatasi perkembangan kota, yaitu pelestarian ekosistem pantai di Teluk Lampung. Dari hasil survey primer didapat informasi mengenai beberapa indikasi penurunan kualitas lingkungan pesisir terutama kerusakan habitat pesisir serta di beberapa tempat terdapat beberapa masalah penurunan mutu dan daya dukung lingkungan. Dari sebuah penelitian yang telah dilakukan ditegaskan bahwa kondisi perairan Kota Bandar Lampung dinilai relatif masih baik untuk saat ini. Namun dari hasil survey primer (observasi) dan data-data sekunder diketahui bahwa perkembangan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tiap tahunnya terus meningkat yang ditandai oleh jumlah penduduk yang juga terus meningkat tiap tahunnya. Disamping itu, terus bertambahnya jumlah aktifitas komersial yang ditandai

oleh jumlah industri dan pekerja sektor industri, terus berkurangnya luas pekarangan di kawasan ini, serta semakin meningkatnya peran Pelabuhan Panjang bagi kota maupun wilayah menunjukkan adanya tren perkembangan yang akan terus meningkat diwaktu-waktu berikutnya. Sehingga yang menjadi permasalahan adalah bagaimana menyeimbangkan peran ekonomi sekaligus fungsi ekologis yang dimiliki kawasan pesisir tersebut pada waktu mendatang. Karena, meskipun untuk saat ini kawasan tersebut dinilai masih mampu mendukung perkembangan yang ada secara ekologi namun tren perkembangan yang terus meningkat akan berpotensi menurunkan daya dukung lingkungan tersebut sehingga akhirnya pembangunan berkelanjutan yang diharapkan tidak dapat tercapai.

BAB IV
PENGARUH PERKEMBANGAN EKONOMI
KOTA BANDAR LAMPUNG
TERHADAP PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR

4.1 Identifikasi Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung

4.1.1 Aspek Fisik

Dengan luas wilayah terbangun kurang lebih 54,93 km² dari 192 km² yang ada, Bandar Lampung memiliki kawasan tak terbangun yang cukup untuk dimanfaatkan bagi berbagai aktifitas perkotaan.

Selain wilayah yang luas, Kota Bandar Lampung juga memiliki potensi alam yang indah, terutama laut dan perbukitannya. Kekhasan morfologinya mulai dari pegunungan, perbukitan, daratan, hingga pantai di bagian Teluk Lampung, menjadikan Kota Bandar Lampung sangat potensial untuk dikunjungi wisatawan. Pantai Bandar Lampung ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu terletak di suatu teluk yang nyaman, dengan keindahan panorama laut dan beberapa gugusan pulau kecil di tengah teluk sehingga sangat potensial bila dikembangkan untuk wisata bahari. Hal ini juga ditunjang oleh letaknya yang tidak jauh dari pusat kota. Fisiografi marin tersebut memanjang dari Serengsem, Panjang, Way Lunik, Teluk Betung, Pesawahan, sampai kearah Lempasing (Teluk Betung Barat). Keindahan pantai dan Teluk Lampung ini dapat menjadi modal bagi Bandar Lampung untuk mengembangkan diri sebagai kota pantai (*water front city*). Pengembangan *water front city* sebagai identitas atau ciri khas kota dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan perkotaan terutama kegiatan rekreasi/wisata pantai dan kegiatan pendukungnya yang dirancang sedemikian sehingga menjadi daya tarik wisata sekaligus sebagai salah satu identitas baru Kota Bandar Lampung.

Perbukitan yang terletak di pusat kota dan bagian kota lainnya juga merupakan potensi alam yang secara khas dimiliki oleh Bandar Lampung. Selain berfungsi lindung bagi pelestarian tata air dan konservasi tanah, perbukitan dengan tanaman hijaunya akan berfungsi pula sebagai paru-paru kota. Pemanfaatannya yang terbatas dapat diselaraskan dengan pengembangan wisata hutan raya.

Dengan demikian, sektor pariwisata menjadi sektor yang prospektif bagi perkembangan Bandar Lampung, baik dalam rangka menunjang pembangunan pariwisata di Sumatra Bagian Selatan maupun dalam upaya mendayagunakan potensi keindahan alam Bandar Lampung. Sektor ini berpotensi menjadi sektor unggulan bagi peningkatan pendapatan daerah dan perluasan lapangan kerja bagi warga kota sekaligus berfungsi ganda dalam mendukung aktifitas perdagangan dan jasa komersial.

4.1.2 Aspek Geografis

Kota Bandar Lampung menempati posisi geografis yang strategis, baik dalam konstelasi regional, nasional, maupun internasional. Posisinya terhadap Singapura dan Jakarta merupakan potensi bagi pengambilan peran dalam kerjasama Indonesia-Malaysia-Singapura-*Growth Triangle* (IMS-GT) maupun dalam menyongsong era pasar bebas. Dari segi jarak, kedudukan Kota Bandar Lampung terhadap kota-kota besar seperti Jakarta dan wilayah pertumbuhan Jabotabek dan Jawa Barat menjadikannya salah satu pilihan bagi relokasi dan tempat limpahan kegiatan ekonomi dari wilayah tersebut. Dalam kaitan ini, Bandar Lampung menjadi bagian dari poros pertumbuhan Pantai Utara Jawa dan bagian dari proses perkembangan Pulau Jawa bagian barat. Dalam kedudukannya ini, Bandar Lampung menjadi salah satu unggulan untuk menjadi pusat pertumbuhan Sumatra Bagian Selatan. Dengan lokasinya di ujung selatan Pulau Sumatra akan memantapkannya sebagai pintu gerbang utama antara Pulau Jawa dan Sumatra.

Kedudukan Bandar Lampung pada posisi geografis yang strategis ini didukung pula oleh aksesibilitas yang tinggi. Bandar Lampung dapat dicapai melalui jalan raya Trans Sumatra (jalur lintas tengah, jalur lintas barat, dan jalur lintas timur), transportasi laut melalui Pelabuhan Bakauheni dan Pelabuhan Panjang, serta jalur udara melalui Bandar Udara Branti yang berjarak lebih kurang 18 km dari pusat Kota Bandar Lampung. Prasarana perhubungan yang baik, cepat, murah, dan aman merupakan salah satu faktor penarik mengalirnya arus imigrasi ke Kota Bandar Lampung. Disamping itu, banyaknya transmigran yang datang ke Propinsi Lampung baik secara spontan maupun yang mengikuti program pemerintah, pada umumnya bertujuan untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik dari sebelumnya, dan hal ini akan berdampak terhadap Kota Bandar Lampung sebagai ibukota dan pusat kegiatan Propinsi Lampung.

Peran sebagai pusat pertumbuhan semakin ditunjang oleh rencana peningkatan aksesibilitas dari dan ke Kota bandar Lampung. Rencana pembangunan jembatan Selat Sunda yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatra akan memperlancar aliran pergerakan penumpang dan barang antar kedua pulau tersebut. Pelabuhan Panjang juga direncanakan akan terhubung dengan sistem angkutan antar moda bagi seluruh Propinsi Lampung dan Sumatra bagian selatan dengan rencana jaringan kereta api Trans Sumatra dengan jalur pantai timur hingga Sumatra Utara sehingga menjadi salah satu alternatif sarana pergerakan antar moda. Adanya rencana jalan tol ke arah Palembang juga akan turut mendukung kelancaran aksesibilitas tersebut.

Selain itu, Bandar Lampung juga memiliki posisi yang menguntungkan terhadap obyek dan daya tarik wisata nasional maupun internasional, seperti Gunung Krakatau dan pusat pelatihan gajah Way Kambas.

4.1.3 Aspek Sosial

Salah satu ciri khas Kota Bandar Lampung adalah keanekaragaman suku bangsanya. Dengan keanekaragaman suku bangsanya, Lampung terkenal sebagai negeri yang ruwa jurai (dua unsur) karena dihuni oleh masyarakat asli dan pendatang. Keanekaragaman suku bangsa ini harus dipandang sebagai potensi atau kekuatan untuk membangun Kota bandar Lampung. Dengan kata lain, Kota Bandar Lampung menjadi semakin mudah beradaptasi dan menerima pendatang baru yang berarti juga semakin mudah menerima pengaruh pembangunan bagi wilayahnya. Dengan laju pertumbuhan penduduk sebesar 3,11% per tahunnya lebih tinggi diatas Propinsi Lampung (2,75%), Kota Bandar Lampung sangat potensial bagi investasi berbagai kegiatan pembangunan.

Selain itu, Propinsi Lampung merupakan wilayah multi-etnik yang mengakomodasikan berbagai budaya dari seluruh suku bangsa yang bermukim di Lampung. Kota Bandar Lampung, sebagai pusat kegiatan Propinsi Lampung, akan berfungsi sebagai sarana untuk menampilkan berbagai budaya tradisional yang tumbuh di Lampung, terutama budaya lokal. Dengan demikian, dibidang sosial budaya, Kota Bandar Lampung tumbuh sebagai kota yang multi-etnik tanpa mengurangi nilai budaya lokal. Kekhasan nilai-nilai tradisional senantiasa menjadi daya tarik suatu kota atau wilayah untuk dikunjungi dan penyebarluasan informasi.

4.1.4 Aspek Ekonomi

Untuk mengidentifikasi potensi ekonomi Kota Bandar Lampung ditinjau dari aspek ekonomi selain dilakukan secara deskriptif juga dilakukan analisis kuantitatif menggunakan analisis *Location Quotion* dan *shift and share*. Dengan menggunakan rumus-rumus seperti yang telah diuraikan pada BAB I didapatkan hasil perhitungan yang selanjutnya ditabelkan sebagaimana berikut:

TABEL 4.1
HASIL PERHITUNGAN LQ KOTA BANDAR LAMPUNG
TAHUN 2001

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB PROP. LAMPUNG	PDRB KOTA B. LAMPUNG	LOCATION QUOTION (LQ)	KETERANGAN
1	2	(jutaan rupiah) 3	(jutaan rupiah) 4	$\frac{4.1}{\text{total } 4}$ $\frac{3.1}{\text{total } 3}$ 5	6
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	2,712,194.00	44,606.00	0.07	Sektor Non Basis
2	Pertambangan dan Penggalian	179,557.00	8,796.00	0.21	Sektor Non Basis
3	Industri pengolahan	1,016,569.00	323,095.00	1.35	Sektor Basis
4	Listrik, gas dan air bersih	87,360.00	42,583.00	2.07	Sektor Basis
5	Konstruksi	554,693.00	171,217.00	1.31	Sektor Basis
6	Perdagangan, restoran dan hotel	1,117,560.00	402,548.00	1.53	Sektor Basis
7	Angkutan dan komunikasi	691,572.00	376,092.00	2.31	Sektor Basis
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	388,877.00	124,846.00	1.37	Sektor Basis
9	Jasa-jasa	675,062.00	251,524.00	1.58	Sektor Basis
	TOTAL	7,423,444.00	1,745,307.00		

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa sektor-sektor yang memiliki nilai LQ lebih besar dari satu ($LQ > 1$) adalah sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor konstruksi, sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Dengan demikian sektor-sektor tersebut adalah sektor basis yang membutuhkan perhatian untuk tetap dipertahankan dan dikembangkan sebagai pendukung kemajuan perekonomian dan pendapatan Kota Bandar Lampung. Sedangkan sektor-sektor selain diatas, yaitu sektor

pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan serta sektor pertambangan dan penggalian merupakan sektor non basis.

Untuk melihat pertumbuhan Kota Bandar Lampung secara detil, dilakukan analisis berdasarkan nilai komponen pertumbuhan wilayah (KPW), komponen pertumbuhan proporsional (KPP), dan komponen pergeseran/pertumbuhan pangsa pasar (KPK) dengan mengambil Propinsi Lampung sebagai acuan. Hasil dari perhitungan masing-masing komponen tersebut dapat dilihat pada Tabel 4.2, Tabel 4.3, dan Tabel 4.4 berikut:

TABEL 4.2
KOMPONEN PERTUMBUHAN WILAYAH (KPW) ACUAN TAHUN 1993-2001

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB PROP.LAMPUNG (acuan)		KPW
		1993 (jutaan rupiah)	2001 (jutaan rupiah)	
1	2	3	4	5 (total 4 : total 3) - 1
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	1,993,681	2,712,194	0.37
2	Pertambangan dan Penggalian	79,542	179,557	0.37
3	Industri pengolahan	777,420	1,016,569	0.37
4	Listrik, gas dan air bersih	26,117	87,360	0.37
5	Konstruksi	360,217	554,693	0.37
6	Perdagangan, restoran dan hotel	857,230	1,117,560	0.37
7	Angkutan dan komunikasi	402,565	691,572	0.37
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	288,630	388,877	0.37
9	Jasa-jasa	625,128	675,062	0.37
	TOTAL	5,410,530	7,423,444	

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Pada tabel di atas tampak bahwa kinerja perekonomian Propinsi Lampung bernilai positif dan cukup baik setelah terjadinya krisis yang dimulai pada beberapa tahun sebelumnya. Perbaikan kinerja ini sedikit banyak mempengaruhi pertumbuhan pada daerah-daerah di Propinsi Lampung termasuk Kota Bandar Lampung.

TABEL 4.3
KOMPONEN PERTUMBUHAN PROPORSIONAL (KPP) TAHUN 1993-2001

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB PROP.LAMPUNG		KPP (4 : 3) - (total4 : total3) 5	KETERANGAN 6
		1993 (jutaan rupiah)	2001 (jutaan rupiah)		
1	2	3	4	5	6
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	1,993,681	2,712,194	-0.01	- Pertumbuhan Lambat
2	Pertambangan dan Penggalian	79,542	179,557	0.89	- Pertumbuhan Cepat
3	Industri pengolahan	777,420	1,016,569	-0.06	- Pertumbuhan Lambat
4	Listrik, gas dan air bersih	26,117	87,360	1.97	- Pertumbuhan Cepat
5	Konstruksi	360,217	554,693	0.17	- Pertumbuhan Cepat
6	Perdagangan, restoran dan hotel	857,230	1,117,560	-0.07	- Pertumbuhan Lambat
7	Angkutan dan komunikasi	402,565	691,572	0.35	- Pertumbuhan Cepat
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	288,630	388,877	-0.02	- Pertumbuhan Lambat
9	Jasa-Jasa	625,128	675,062	-0.29	- Pertumbuhan Lambat
	TOTAL	5,410,530	7,423,444		

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Sedangkan nilai komponen pertumbuhan proporsional (KPP) sektor-sektor untuk wilayah Propinsi Lampung seperti tampak pada tabel di atas. Sektor-sektor yang mengalami pertumbuhan pesat adalah sektor-sektor dengan nilai KPP positif, yaitu sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, sektor konstruksi, serta sektor angkutan dan komunikasi. Sektor-sektor tersebut berpengaruh positif terhadap daerah-daerah di Propinsi Lampung termasuk Kota Bandar Lampung. Sedangkan sektor-

sektor selainnya mengalami pertumbuhan yang lambat dan berpengaruh negatif terhadap pendapatan daerah.

Sektor-sektor yang mengalami peningkatan daya saing/keunggulan adalah sektor-sektor dengan nilai KPK positif, yaitu sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan, sektor konstruksi, serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (Tabel 4.4).

TABEL 4.4
KOMPONEN PERGESERAN / PERTUMBUHAN PANGSA PASAR (KPK)
KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 1993-2001

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB KOTA B. LAMPUNG		(4 : 3) - (KPP4/KPP3) KPK	KETERANGAN 6
		1993 (jutaan rupiah)	2001 (jutaan rupiah)		
1	2	3	4	5	
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	30,245	44,606	0.11	- Daya saing meningkat
2	Pertambangan dan Penggalian	5,416	8,796	-0.63	- Daya saing menurun
3	Industri pengolahan	267,805	323,095	-0.10	- Daya saing menurun
4	Listrik, gas dan air bersih	18,798	42,583	-1.08	- Daya saing menurun
5	Konstruksi	109,190	171,217	0.03	- Daya saing meningkat
6	Perdagangan, restoran dan hotel	275,205	402,548	0.16	- Daya saing meningkat
7	Angkutan dan komunikasi	246,667	376,092	-0.19	- Daya saing menurun
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	139,360	124,846	-0.45	- Daya saing menurun
9	Jasa-Jasa	235,849	251,524	-0.01	- Daya saing menurun
	TOTAL	1,328,535	1,745,307		

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Untuk melihat sektor-sektor maju dan kurang maju pada Kota Bandar Lampung dilakukan analisis lanjutan dengan menghitung pergeseran bersih (*net shift*) yang dapat

TABEL 4.5
PERGESERAN NETTO KOTA BANDAR LAMPUNG TAHUN 1993-2001

NO	LAPANGAN USAHA	KPP	KPK	PN =	Keterangan
				KPP + KPK	
1	2	3	4	5 = 3 + 4	
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	-0.01	0.11	0.10	Sektor maju
2	Pertambangan dan Penggalian	0.89	-0.63	0.25	Sektor maju
3	Industri pengolahan	-0.06	-0.10	-0.17	Sektor mundur
4	Listrik, gas dan air bersih	1.97	-1.08	0.89	Sektor maju
5	Konstruksi	0.17	0.03	0.20	Sektor maju
6	Perdagangan, restoran & hotel	-0.07	0.16	0.09	Sektor maju
7	Angkutan dan komunikasi	0.35	-0.19	0.15	Sektor maju
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	-0.02	-0.45	-0.48	Sektor mundur
9	Jasa-Jasa	-0.29	-0.01	-0.31	Sektor mundur

Sumber: Hasil Analisis, 2003

TABEL 4.6
PERUBAHAN PDRB KOTA BANDAR LAMPUNG

NO	LAPANGAN USAHA	PDRB KOTA B. LAMPUNG (Jutaan)		Perubahan PDRB (Jutaan)
		1993	2001	
1	2	3	4	5
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	30,245	44,606	14,361
2	Pertambangan dan Penggalian	5,416	8,796	3,380
3	Industri pengolahan	267,805	323,095	55,290
4	Listrik, gas dan air bersih	18,798	42,583	23,785
5	Konstruksi	109,190	171,217	62,027
6	Perdagangan, restoran & hotel	275,205	402,548	127,345
7	Angkutan dan komunikasi	246,667	376,092	129,425
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	139,360	124,846	- 14.514
9	Jasa-Jasa	235,849	251,524	15,675
	TOTAL	1,328,535	1,745,307	416,772

Sumber: Hasil Analisis, 2003

dilihat pada Tabel 4.5. Dari tabel tampak bahwa sektor-sektor yang memiliki nilai positif adalah semua sektor kecuali sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. Nilai PN/*netshift* positif tersebut menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang maju dan sebaliknya.

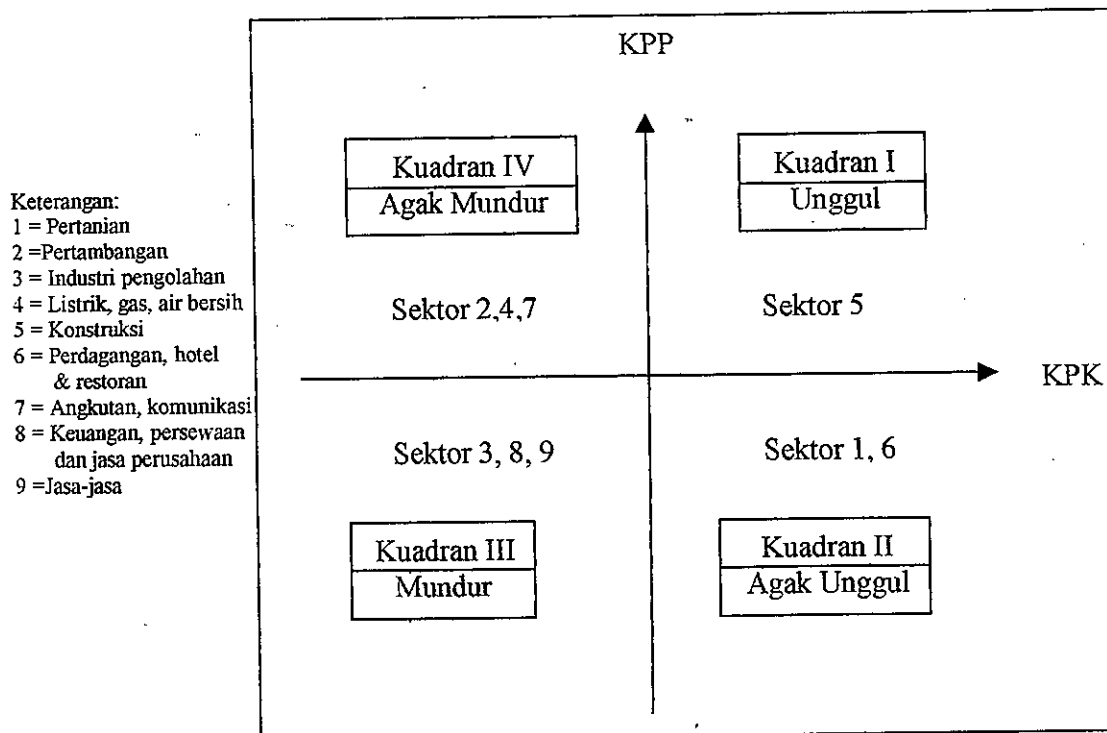
Hal yang sama juga ditunjukkan pada nilai absolut pertumbuhan ekonomi kota (PEK) pada Tabel 4.7. Komponen KPW, KPP, dan KPK masing-masing sektor dikalikan dengan nilai PDRB Kota Bandar Lampung tahun 1993 pada sektor yang sama. Hasil perhitungan untuk nilai PEK (perubahan pendapatan daerah) menurut sektor sama dengan angka-angka perubahan PDRB pada Tabel 4.6.

TABEL 4.7
NILAI ABSOLUT PERTUMBUHAN EKONOMI KOTA (PEK)
BANDAR LAMPUNG TAHUN 1993-2001

NO	LAPANGAN USAHA	KPW	KPP	KPK	PEK
1	2	3	4	5	6 = 3 + 4 + 5
1	Pertanian, perikanan kehutanan dan peternakan	11,252.24	-352.09	3,460.85	14,361.00
2	Pertambangan dan Penggalian	2,014.95	4,795.05	-3,430.00	3,380.00
3	Industri pengolahan	99,633.20	-17,251.35	-27,091.85	55,290.00
4	Listrik, gas dan air bersih	6,993.54	37,086.79	-20,295.33	23,785.00
5	Konstruksi	40,622.65	18,327.46	3,076.88	62,027.00
6	Perdagangan, restoran dan hotel	102,386.27	-18,809.97	43,766.69	127,343.00
7	Angkutan dan komunikasi	91,769.10	85,316.56	-47,660.66	129,425.00
8	Keuangan, persewaan dan jasa perusahaan	51,846.99	-3,444.46	-62,916.53	-14,514.00
9	Jasa-Jasa	87,744.41	-68,905.25	-3,164.16	15,675.00
	TOTAL	494,263.35	36,762.75	114,254.10	416,772.00

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Selanjutnya dilakukan analisis kembali untuk mengetahui sektor-sektor yang termasuk unggul, agak unggul, agak mundur, dan mundur di Kota Bandar Lampung dalam periode 1993-2001. Sedangkan yang menjadi acuan utama adalah nilai KPK atau komponen pertumbuhan daya saing daerah karena merupakan komponen terpenting dalam pertumbuhan suatu daerah. Dari Gambar 4.1 dapat dilihat bahwa sektor sektor dengan nilai KPK positif adalah sektor konstruksi (unggul), sektor pertanian, perikanan, kehutanan dan peternakan (agak mundur), serta sektor perdagangan, hotel dan restoran (agak mundur). Sektor yang masuk kriteria agak unggul adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor listrik, gas, dan air bersih, serta sektor angkutan dan komunikasi. Sedangkan sektor yang mengalami kemunduran adalah sektor industri pengolahan, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa



GAMBAR 4.1
DIAGRAM SEKTOR UNGGULAN KOTA BANDAR LAMPUNG

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Selain analisis-analisis di atas perlu juga diketahui sektor-sektor apa saja yang memberikan sumbangan terbesar dalam membentuk PDRB Kota Bandar Lampung selama periode 1993-2001. Nilai PDRB Kota Bandar Lampung selama periode 1993-2001 dapat dilihat pada Tabel 4.8.

Pada tahun 1997, dimana mulai terjadinya krisis moneter yang berlanjut menjadi krisis ekonomi menyebabkan pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung menurun menjadi sebesar. Pada tahun 1998 krisis ekonomi masih terjadi bahkan mencapai puncaknya sehingga kegiatan usaha banyak yang tidak mampu lagi beroperasi secara menguntungkan. Akibatnya, perekonomian, baik secara nasional maupun regional menjadi terpuruk. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap kondisi perekonomian Kota Bandar Lampung dimana pada tahun 1998 pertumbuhannya turun sangat drastis mencapai minus 14,63% (BPS, 2000).

Seiring dengan adanya berbagai usaha dari pemerintah untuk pemulihan aktifitas dunia usaha di tanah air, maka secara bertahap upaya tersebut mulai terlihat dampak positifnya. Mulai tahun 1999 sampai tahun 2000, perekonomian Kota Bandar Lampung secara berangsur telah mampu bangkit dari krisis yang terjadi meskipun belum sepenuhnya pulih sebagaimana keadaan sebelum terjadinya krisis. Secara sektoral, pertumbuhan ekonomi pada tahun 2000 tertinggi terjadi pada sektor pertanian, peternakan dan perikanan, serta sektor penggalian. Namun, karena kontribusi kedua sektor tersebut terhadap PDRB Kota Bandar Lampung sangat kecil, maka pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi secara total juga kecil. Sedangkan sektor keuangan mengalami pertumbuhan negatif 14,72% akibat pengaruh sub sektor bank yang mengalami pertumbuhan negatif 78,35% (BPS, 2000).

TABEL 4.8
NILAI PDRB KOTA BANDAR LAMPUNG MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA KONSTAN 1993
TAHUN 1993 - 2001 (DALAM JUTAAN RUPIAH)

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001
LAPANGAN USAHA									
1 Pertanian, peternakan & perikanan	30.245	30.956	31.876	33.753	36.963	35.549	46.924	53.188	44.606
2 Pertambangan dan penggalian	5.416	8.124	9.701	11.887	12.643	7.846	7.530	8.427	8.796
3 Industri pengolahan	267.805	281.926	307.907	331.488	352.406	345.611	300.444	316.010	323.095
4 Listrik dan air bersih	18.798	19.216	22.287	24.364	29.599	32.176	32.953	35.779	42.583
5 Bangunan	109.190	148.304	195.890	232.142	251.466	164.287	160.355	166.532	171.217
6 Perdagangan, hotel, dan restoran	275.205	296.432	314.164	341.128	355.347	361.863	379.774	393.150	402.548
7 Pengangkutan dan komunikasi	246.667	257.684	276.724	307.249	337.033	296.913	321.082	343.597	376.092
8 Keuangan, persewaan, jasa perusahaan	139.360	160.556	172.252	188.700	220.914	108.494	155.780	132.856	124.846
9 Jasa-jasa	235.849	241.073	243.961	249.405	253.151	232.161	236.538	242.814	251.524
JUMLAH	1.328.535	1.444.271	1.574.762	1.720.116	1.849.522	1.641.380	1.641.353	1.692.353	1.743.307

Sumber: BPS, 1993-2001

Sektor ekonomi yang besar pengaruhnya terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung secara keseluruhan yaitu sektor perdagangan, hotel dan restoran, sektor pengangkutan dan komunikasi, serta sektor industri. Pertumbuhan ketiga sektor ini masing-masing sebesar 3,52%, 6,52%, dan 5,18%.

Dari hasil penghitungan PDRB Kota Bandar Lampung tahun 2000 terlihat bahwa sektor usaha yang dominan kontribusinya terhadap PDRB sama seperti pada tahun-tahun sebelumnya yaitu pada sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel, dan restoran masing-masing sebesar 29,82 % dan 22,78 %. Kedua sektor ini mampu menyumbang lebih dari separuh nilai total PDRB, yaitu sebesar 52,6 %. Sektor jasa-jasa yang pada tahun 1999 sebagai penyumbang terbesar ke empat terhadap PDRB Kota Bandar Lampung meningkat menjadi penyumbang terbesar ketiga pada tahun 2000 dengan kontribusinya sebesar 14 %, menggeser sektor transportasi dan komunikasi. Dengan demikian, struktur perekonomian Kota Bandar Lampung tetap didominasi oleh sektor sekunder dan tersier yang merupakan ciri daerah perkotaan.

Sedangkan sektor usaha yang kontribusinya sangat kecil adalah sektor penggalian, sektor listrik dan air minum, serta sektor pertanian, peternakan, dan perikanan. Ketiga sektor ini hanya mampu memberikan kontribusi sebesar 5,6 %. Besarnya kontribusi sektor-sektor tersebut disebabkan karena Kota Bandar Lampung merupakan pusat perbelanjaan di Propinsi Lampung. Selain itu, Kota Bandar Lampung juga merupakan pusat pemerintahan di Propinsi Lampung. Oleh karena itu, wajar jika sektor-sektor tersebut menjadi tulang punggung perekonomian Kota Bandar Lampung. Bahkan jika dilihat dari kontribusinya terhadap PDRB Propinsi Lampung, terlihat bahwa Kota Bandar Lampung merupakan penyumbang terbesar untuk sektor-sektor tersebut.

Dengan adanya kecenderungan perubahan struktur ekonomi Propinsi Lampung dari sektor primer kesektor sekunder dan tersier tentu akan berpengaruh pada perekonomian Kota Bandar Lampung. Bila dekade tahun 70-an agroindustri merupakan andalan sektor industri, kini industri manufaktur mulai mengambil peranan penting dalam perekonomian wilayah. Kecenderungan ini berkaitan dengan arus relokasi industri dari Pulau Jawa, khususnya Jabotabek dan Propinsi Banten. Perkembangan penanaman modal selain menunjukkan minat ke arah sektor pertanian, juga sektor industri dan jasa. Artinya, seluruh sektor memberikan daya tarik bagi masuknya kegiatan ke Propinsi Lampung. Perkembangan dan pertumbuhan ini dalam jangka panjang akan membawa implikasi yang besar bagi Kota Bandar Lampung.

4.2 Identifikasi Perkembangan Kawasan Pesisir

4.2.1 Aspek Fisik dan Geografis

Secara geografis, kedudukan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sangat penting artinya bagi perkembangan Kota Bandar Lampung maupun Propinsi Lampung umumnya. Dengan letaknya di Teluk Lampung dibagian selatan Propinsi Lampung, maka kawasan ini menjadi penting dengan perannya sebagai kawasan pelabuhan dan berbagai aktifitas pendukungnya.

Peran Bandar Lampung sebagai pusat koleksi dan distribusi barang dan jasa didukung oleh Pelabuhan Panjang yang telah diminati oleh berbagai pihak untuk dikembangkan sebagai pelabuhan antar negara, terutama dalam konteks region Sumatra bagian selatan. Peranan yang dituju oleh pelabuhan ini adalah sebagai pelabuhan ekspor bagi komoditi dan produk yang dihasilkan oleh Sumatra bagian selatan. Pilihan ini mempertimbangkan posisi strategis Pelabuhan Panjang sebagai gerbang lintas dua kawasan, yaitu Sijori (Singapura-Johor-Riau) dan pusat pasar nasional Jakarta dan Jawa

Barat bagian barat, terutama dalam mengisi kerjasama ekonomi regional IMS-GT. Selain itu, kondisi fisik perairan pelabuhan juga memungkinkan pengembangan Pelabuhan Panjang sebagai gerbang internasional.

Disamping kedudukan geografisnya yang strategis, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung secara fisik juga potensial berkembang menjadi wilayah perkotaan. Kondisi fisiknya yang relatif datar, kecuali sedikit dibagian barat, kawasan ini sangat diminati masyarakat untuk dijadikan tempat tinggal dan berusaha. Terutama di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung, kepadatan penduduk cukup tinggi. Terdapat juga berbagai aktifitas ekonomi baik yang berhubungan dengan pelabuhan, seperti pergudangan dan pabrik (Panjang), maupun aktifitas perdagangan dan jasa skala lokal (Teluk Betung Selatan). Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang merupakan bagian dari wilayah perkotaan mengalami perkembangan yang secara fisik ditandai dengan meluasnya penggunaan ruang bagi kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain itu, dari data kelurahan di dapatkan informasi bahwa ketersediaan lahan bukan untuk dibudidayakan (pekarangan) juga semakin berkurang.

Sebagai mana telah diuraikan sebelumnya, daya tarik Kota Bandar Lampung secara fisik antara lain terletak pada kawasan pesisirnya. Selain berpotensi untuk dikembangkan dimasa mendatang, hal tersebut juga yang selama ini berperan menjadikan kawasan ini ramai. Keindahan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terutama masih terlihat di Kecamatan Teluk Betung Barat karena belum banyak aktifitas masyarakatnya. Namun kawasan pesisir di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Selatan pun sebenarnya masih baik dan lebih mudah dijangkau karena berupa dataran landai. Hanya sayangnya, saat ini keindahan kawasan pesisir di bagian tersebut terhalang oleh berbagai bangunan sehingga tidak tampak dari jalan. Rencana untuk menjadikan Kota Bandar Lampung

sebagai *Water Front City* sebenarnya terdukung oleh kondisi pesisir yang indah namun pelaksanaan reklamasi pantai yang kurang matang menyebabkan belum terwujudnya rencana tersebut. Sehingga saat ini, tanah reklamasi yang ada digunakan oleh masyarakat untuk bermukim ataupun kegiatan komersial lain yang tidak sesuai dengan perencanaan kota.

4.2.2 Aspek Sosial

Faktor utama perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tidak lain karena peran Pelabuhan Panjang dan berbagai kegiatan pendukungnya, seperti sektor industri dan perdagangan. Jumlah penduduk yang tinggal di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung setiap tahunnya terus meningkat. Banyaknya lapangan usaha di kawasan pesisir ini menyebabkan banyak masyarakat Kota Bandar Lampung bahkan dari luar Kota Bandar Lampung datang dan mengadu nasib di kawasan tersebut.

Umumnya tenaga kerja yang datang di kawasan pesisir ini adalah pekerja kasar atau buruh yang mengisi lapangan kerja seperti pergudangan, pabrik, atau kuli angkut di pelabuhan. Ada yang menetap di kawasan setempat, tapi ada juga yang tinggal di luar kawasan tersebut.

Dari data kelurahan mengenai jumlah keluarga menurut mata pencariannya didapat informasi bahwa pekerja di sektor perikanan/kelautan di kawasan pesisir lebih sedikit dibanding pekerja di sektor industri. Hal tersebut menunjukkan bahwa kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tidak didominasi lagi oleh sektor yang bercirikan pesisir tapi telah menunjukkan perkembangan kegiatan usaha masyarakat yang bercirikan masyarakat perkotaan, seperti sektor industri dan perdagangan.

4.2.3 Aspek Ekonomi

Sebagaimana tertuang dalam rencana tata ruang kota, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sangat berperan dalam membentuk perekonomian Kota Bandar Lampung, bahkan Propinsi Lampung dan sekitarnya. Kawasan pesisir yang terbagi kedalam dua bagian wilayah pengembangan tersebut (BWK Panjang dan BWK Teluk Betung) ditetapkan sebagai pusat pelayanan regional sehingga perkembangan Kota Bandar Lampung dapat dikatakan dimulai dari kawasan pesisir ini.

Secara umum BWK Teluk Betung memiliki fungsi utama sebagai pusat pemerintahan dan pusat perdagangan regional serta fungsi pendukung jasa umum. Sedangkan BWK Panjang memiliki fungsi utama sebagai pusat pelabuhan samudra yang menyediakan sarana pelayanan ekspor impor dan sarana pergudangan, serta fungsi pendukung sebagai kawasan industri besar, terminal barang, rekreasi dan konservasi.

Kawasan pesisir yang terletak di BWK Teluk Betung didominasi aktifitas ekonomi berupa perdagangan dan jasa penunjang pendidikan dan perkantoran. Sedangkan Kawasan pesisir yang terletak di BWK Panjang didominasi aktifitas ekonomi berupa aktifitas pelabuhan dan pengembangannya serta industri dan pergudangan.

Dengan kecenderungan perkembangan Kota Bandar Lampung menjadi orientasi perdagangan Sumatra bagian selatan maka Pelabuhan Panjang akan semakin diandalkan sebagai sarana aliran barang. Pelabuhan Panjang ditargetkan menjadi gerbang ekspor-impor utama bagi Sumatra bagian selatan serta komplementer terhadap perkembangan Pelabuhan Tanjung Priok sehingga peningkatan pelayanan dan perluasan kawasan kerja pelabuhan sudah pasti akan ditingkatkan. Dengan kecenderungan volume bongkar muat yang meningkat sebesar 4% setiap tahunnya maka PT Pelindo II telah mengantisipasi pertumbuhan cargo melalui rencana perluasan kawasan pelabuhan ke arah timur dan utara.

Dengan demikian perkembangan sarana pendukung pelabuhan seperti pergudangan di sekitarnya juga akan meningkat.

Selain itu, minat berbagai pihak untuk menanamkan modalnya dalam pengembangan Pelabuhan Panjang serta rencana pembangunan jalur kereta api Trans Sumatra yang mengakses angkutan barang dan komoditi dari dan ke Pelabuhan Panjang akan semakin meningkatkan perkembangan di kawasan pesisir Kota bandar Lampung di masa mendatang.

Disamping pelabuhan, beberapa aktifitas komersial berskala besar di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung terdapat di Kelurahan Serengsem, seperti PT Bukit Asam yang bergerak dibidang pengolahan batu bara. Rangkaian kereta api yang mengangkut batu bara dari bukit asam di Sumatra Selatan yang terkenal dengan "Babaranjang." dikenal sebagai rangkaian kereta api terpanjang di Asia Tenggara. PT Andatu bergerak di bidang pengolahan kayu lapis, dan PT Doosan Indonesia bergerak dibidang alat-alat berat. Beberapa industri pengolahan besar juga terletak di Kelurahan Way Lunik dan Garuntang. Berbagai aktifitas komersial tersebut telah menyerap sekian ribu tenaga kerja baik dari dalam maupun luar Kota Bandar Lampung.

Namun demikian, aktifitas yang seharusnya berkembang dikawasan pesisir Kota Bandar Lampung justru kurang berkembang, yaitu rekreasi/wisata pantai. Beberapa objek wisata pantai yang ada tampak kurang mendapat perhatian sehingga masyarakat lebih cenderung mengunjungi objek wisata pantai yang terdapat di Lampung Selatan seperti Kalianda Resort, Pasir Putih, Pulau Pasir dan lain sebagainya. Bahkan sebuah areal yang tadinya diperuntukkan bagi rekreasi pantai dan olahraga bahari, yaitu Pantai Gading, saat ini menjadi areal pergudangan. Hal tersebut sangat disayangkan karena keindahan kawasan

pesisir Kota Bandar Lampung sebenarnya tidak kalah dengan kawasan pesisir di wilayah sekitar lainnya.

Perkembangan kota mengacu pada kualitas, yaitu proses menuju suatu keadaan yang bersifat pematangan. Indikasi ini dapat dilihat pada struktur kegiatan perekonomian dari primer kesekunder atau tersier. Dari gambaran mengenai berbagai aktifitas ekonomi di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dapat disimpulkan bahwa pada kawasan tersebut struktur perekonomian tidak lagi bertumpu pada sektor primer seperti perikanan, melainkan telah terjadi peningkatan kegiatan usaha masyarakat sehingga sektor sekunder dan tersier lebih dominan.

4.2.4 Aspek Tata Ruang

Secara fisik, perkembangan Kota Bandar Lampung perlu didukung oleh penyiapan lokasi dan lahan yang memadai bagi fungsi-fungsi ekonomi, residensial, sesuai dengan kebutuhan aksesibilitas, komunikasi, maupun rekreasi dari masing-masing fungsi seperti pada kawasan pesisir yang memiliki peran penting bagi Kota Bandar Lampung. Namun, kondisi dan karakteristik fisik Kota Bandar Lampung dan sekitarnya memiliki beberapa kendala bagi perkembangan dan pertumbuhan aktifitas budidaya perkotaan. Salah satu isu fisik yang membatasi perkembangan Kota Bandar Lampung adalah pelestarian ekosistem pantai/pesisir di Teluk Lampung. Berbagai perkembangan fisik di sepanjang kawasan pesisir, baik pelabuhan, permukiman, perdagangan, reklamasi, dan lain sebagainya akan mengganggu ekosistem pesisir apabila tidak dikendalikan.

Dengan mempertimbangkan ketentuan mengenai kawasan lindung, sebenarnya pemerintah Kota Bandar Lampung telah menetapkan kawasan pesisir ke dalam zona dimana perkembangan budidaya perkotaannya dikendalikan. Zona ini mencakup areal

yang menurut kelerengan, ketinggian atau fungsinya sebagai sempadan pantai dan sungai perlu dilindungi, namun telah terjadi invansi aktifitas perkotaan.

Dalam rencana tata ruang, kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang terbagi kedalam dua BWK (bagian wilayah kota), yaitu BWK Teluk Betung dan BWK Panjang, beberapa kawasan telah ditetapkan sebagai kawasan konservasi, baik berupa hutan maupun ruang terbuka. Seperti pada kawasan pesisir di Kelurahan Serengsem (sebagian besar) dan Kelurahan Way Lunik (sekitar garis pantai) ditetapkan sebagai hutan lindung atau perkebunan. Pada BWK Teluk Betung, sepanjang kawasan pesisir (60 m \pm dari garis pantai) yang terdapat di 8 kelurahan di 2 kecamatan, yaitu Kecamatan Teluk Betung Selatan dan Kecamatan Teluk Betung Barat, diperuntukkan sebagai ruang terbuka atau hutan.

Kawasan pesisir yang ditetapkan sebagai kawasan budidaya dan diperuntukkan bagi aktifitas ekonomi terdapat di Kelurahan Panjang Selatan dan Panjang Utara, yaitu sebagai kawasan kerja pelabuhan. Selain itu, di Kelurahan Way Lunik sebagai lokasi industri dan pergudangan, serta sepanjang pesisir di BWK Teluk Betung yang diperuntukkan bagi aktifitas jasa penunjang kawasan, pendidikan dan perkantoran.

Pada dasarnya sempadan pantai di sepanjang Teluk Lampung ditetapkan selebar 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat proporsional terhadap bentuk dan kondisi fisik pantai. Untuk kawasan dengan hutan bakau yang relatif sudah menipis, sempadan pantai ditetapkan selebar 130 kali perbedaan pasang surut tertinggi dan terendah. Sedangkan bila di pantai terdapat rawa, maka sempadan pantai yang kurang lebar dari rawa ditetapkan menurut lebar rawa ke arah darat.

Pada kenyataannya, kondisi tata ruang yang ada saat ini di sepanjang kawasan pesisir Kota Bandar Lampung belum sepenuhnya sesuai dengan rencana tata ruang. Tren

yang ada saat ini lebih mengikuti fungsi dan perannya sebagai menjadi pusat pelayanan regional. Sedangkan fungsi dan perannya sebagai kawasan konservasi kurang mendapat perhatian. Intensitas kegiatan di kawasan pusat pelayanan ini terus meningkat dengan berbagai penambahan kegiatan baru dan penambahan kepadatan bangunan. Kawasan pesisir yang terletak disekitar garis pantai, terutama bagian yang direklamasi dan sekitar Pelabuhan Panjang terus berkembang seiring meningkatnya peran Kota Bandar Lampung. Kawasan-kawasan yang sebenarnya diperuntukkan sebagai kawasan konservasi atau ruang terbuka tidak luput dari kegiatan pembangunan. Tanah reklamasi yang seharusnya diperuntukkan sebagai kawasan terbuka sehingga masyarakat dapat mengakses pantai tanpa halangan saat ini sebagian telah dijadikan permukiman, gudang, tempat hiburan, maupun tanah kosong tetapi telah diperuntukkan. Dari jalan raya (sepanjang Jalan Yos Sudarso dan Laksamana Malahayati) pandangan ke pantai terhalang oleh berbagai bangunan dan tidak ada jalan masuk yang mengakses ke sana.

Kawasan yang diperuntukkan sebagai tempat rekreasi di atas tanah reklamasi di Kelurahan Panjang Utara justru tidak berkembang dan saat ini menjadi lahan pergudangan karena letaknya yang dekat pelabuhan. Tetapi kawasan yang seharusnya menjadi ruang terbuka di sepanjang pesisir Sukaraja dan Bumi Waras justru ramai sebagai tempat hiburan malam.

Permukiman di BWK Panjang yang awalnya direncanakan sebagai permukiman skala rendah dengan koefisien dasar bangunan (KDB) yang rendah atau permukiman yang diperuntukkan hanya sebagai permukiman yang berhubungan dengan pelabuhan, menjadi permukiman yang cukup padat dan sebagian menempati kawasan-kawasan konservasi, seperti di Panjang Utara, Panjang Selatan, Sukaraja, dan Bumi Waras. Sedangkan kawasan

pesisir yang relatif masih terjaga fungsinya sebagai kawasan konservasi adalah kawasan pesisir di Sukamaju dan Keteguhan.

4.3 Analisis Kondisi Lingkungan Kawasan Pesisir

Dari daftar pertanyaan yang disebarakan pada responden, secara umum didapatkan informasi bahwa kawasan pesisir Kota Bandar Lampung sebagian besar merupakan kawasan pembangunan. Namun, secara kualitas lingkungan masih cukup baik untuk saat ini dan perlu mendapat perhatian untuk masa mendatang.

Menurut Sugandhy (1999), salah satu permasalahan lingkungan hidup yang terdapat di kawasan pesisir adalah penyusutan keanekaragaman flora dan fauna di kawasan tersebut. Keberadaan ekosistem pesisir seperti bakau, terumbu karang, dan padang lamun cukup penting untuk dijadikan acuan dalam mengukur kondisi lingkungan suatu kawasan pesisir. Flora-fauna tersebut merupakan bagian dari ekosistem pesisir yang memiliki peran penting dalam menjaga fungsi ekologis kawasan tersebut serta menjadi sistem alamiah terhadap ancaman banjir, badai, dan erosi. Misalnya hutan bakau (mangrove), selain berfungsi ekologis sebagai penyedia nutrisi bagi biota perairan, juga berfungsi sebagai penahan abrasi, penyerap limbah, dan penahan intrusi air laut (Dahuri, 2001).

Dari angket yang disebarakan, hampir sebagian besar kawasan pesisir yang terletak di 12 kelurahan Kota Bandar Lampung sudah tidak memiliki lagi ekosistem pesisir berupa hutan bakau. Persentasi jawaban "tidak ada lagi" untuk pertanyaan mengenai keberadaan populasi bakau adalah sebanyak 85% dari 192 responden yang tinggal di sepanjang kawasan tersebut. Untuk pertanyaan mengenai keberadaan terumbu karang dan padang lamun masing-masing bernilai 64% dan 69,3%.

Sedangkan untuk pertanyaan mengenai kemudahan mendapatkan air bersih di kawasan pesisir, sebanyak 55,2% menjawab mudah. Umumnya mereka yang menjawab

mudah kebanyakan tinggal di kawasan yang intensitas pembangunannya cukup tinggi seperti Panjang Utara dan Panjang Selatan. Hal tersebut disebabkan air bersih yang di konsumsi berasal dari PDAM. Sedangkan responden yang menjawab susah (9,9%) tidak menggunakan jasa PDAM dan merupakan responden yang tinggal di kawasan pesisir Kecamatan Teluk Betung Barat.

Untuk kualitas air, secara umum dapat dikatakan kualitas air tanah di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung masih relatif baik dengan beberapa indikasi seperti tidak berwarna (67,7% responden yang menjawab), tidak berbau (55,7%), dan rasanya tawar (35%).

Sedangkan mengenai pencemaran udara, yang cukup bermasalah adalah pesisir dikawasan Way Lunik dimana terdapat banyak pabrik dan gudang. Salah satu diantaranya adalah CV. Bumi Waras yang memproduksi tepung tapioka dan pengolahan kopra sehingga limbah yang dihasilkan setiap harinya seperti debu, bau dan asap, dirasakan cukup mengganggu masyarakat yang bermukim di sekitar lokasi.

Sebanyak 57,8% responden mengatakan kawasan dimana ia tinggal jarang terjadi banjir. Sebanyak 2,6% mengatakan sangat sering dan 8,3% mengatakan sering. Mereka yang sering mengalami banjir ini kebanyakan tinggal di kawasan pelabuhan seperti di Kelurahan Panjang Utara dan Way Lunik dimana terdapat banyak muara sungai dan areal reklamasi yang luas.

Suasana pantai yang biasanya tenang dan jauh dari keramaian tampaknya sulit ditemukan lagi di Kota Bandar Lampung kecuali sedikit di pesisir bagian barat. Umumnya letak garis pantai hanya beberapa ratus meter dari aktifitas masyarakat seperti pasar, terminal, jalan raya, pabrik, dan sebagainya.

Namun demikian, hal yang cukup menarik adalah bahwa masyarakat setempat melihat kawasan pesisir Kota Bandar Lampung masih menampilkan pemandangan yang indah (sebanyak 50% responden) terutama pesisir di Kecamatan Teluk Betung Barat. Hal ini merupakan potensi dan perlu ditindaklanjuti dalam hal konservasinya sebelum kondisi tersebut berubah diwaktu mendatang.

Menurut Dahuri (2001), beberapa masalah yang terjadi dalam pembangunan di kawasan pesisir dan lautan Indonesia antara lain adalah pencemaran, eksploitasi sumberdaya secara berlebihan, abrasi pantai, dan konversi kawasan lindung kepenggunaan lainnya. Dengan demikian, bila mengacu pada hasil angket dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung adalah kerusakan fisik habitat, yaitu habitat bakau, terumbu karang, dan padang lamun. Sedangkan menurut Sugandhy (1999), permasalahan lingkungan hidup lainnya di kawasan pesisir adalah penurunan daya dukung lingkungan dan penurunan mutu lingkungan kawasan. Hal ini dapat dilihat dari hasil angket di beberapa lokasi yang menyatakan sering terjadinya banjir dan beberapa masalah mengenai air bersih. Namun demikian, secara umum permasalahan lingkungan yang mendominasi di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung adalah penyusutan ekosistem pantai. Sedangkan masalah-masalah lingkungan yang lain, selain belum dilakukan studi secara mendalam, dari hasil angket diketahui bahwa beberapa masalah seperti terjadinya banjir atau kesulitan air bersih hanya terjadi di beberapa tempat.

4.4 Analisis Pengaruh Perkembangan Ekonomi Kota Bandar Lampung terhadap Perkembangan Kawasan Pesisir

4.4.1 Analisis Kuantitatif

Untuk mengetahui apakah perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung saat ini dan waktu mendatang memberikan dampak terhadap perkembangan kawasan pesisir, dilakukan analisis regresi dengan langkah-langkah sebagaimana uraian metodologi penelitian di bab pertama.

TABEL 4.9
PENENTUAN SKALA KOMPONEN VARIABEL X

SKALA	KOMPONEN VARIABEL X (PERKEMBANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG)				
	JML. PENDUDUK	JML INDUSTRI	JML PEKERJA INDUSTRI	LUAS LAHAN KOSONG (HA)	VOL EKSPOR REGIONAL (JUTA)
1	626.640 - 639.461	192 - 197	15.510 - 15.958	350 - 491	2.163.777 - 2.219.892
2	639.462 - 652.281	198 - 202	15.959 - 16.405	492 - 632	2.219.893 - 2.276.008
3	652.282 - 665.102	203 - 207	16.406 - 16.853	633 - 774	2.276.009 - 2.332.123
4	665.103 - 677.923	208 - 212	16.854 - 17.300	775 - 915	2.332.124 - 2.388.239
5	677.924 - 690.744	213 - 217	17.301 - 17.748	916 - 1056	2.388.240 - 2.444.354
6	690.745 - 703.564	218 - 222	17.749 - 18.195	1057 - 1197	2.444.355 - 2.500.469
7	703.565 - 716.385	223 - 227	18.196 - 18.643	1198 - 1338	2.500.470 - 2.556.585
8	716.386 - 729.206	228 - 232	18.644 - 19.090	1481 - 1480	2.556.586 - 2.612.700
9	729.207 - 742.026	233 - 237	19.091 - 19.538	1481 - 1621	2.612.701 - 2.668.816
10	742.027 - 754.847	238 - 242	19.539 - 19.985	1622 - 1762	2.668.817 - 2.724.931

Sumber: Hasil Analisis, 2003

TABEL 4.10
PERHITUNGAN VARIABEL X (PERKEMBANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG)

X _i	THN	KOMPONEN VARIABEL X PERKEMBANGAN KOTA BANDAR LAMPUNG										Variabel X
		Penduduk (bobot 20%)		Industri (bobot 20%)		Pekerja industri (bobot 20%)		lahan kosong (bobot 20%)		Ekspor regional (bobot 20%)		
		Jml	skala	Jml	skala	Jml	skala	Luas	skala	Vol.	skala	
X ₁	1993	626.640	1	192	1	15.510	1	1.761,5	10	2.163.777	1	2,8
X ₂	1994	627.230	1	198	2	16.599	2	1.754,58	10	2.219.993	2	3,4
X ₃	1995	629.629	1	199	2	16.839	3	1.304,47	7	2.343.942	4	3,4
X ₄	1996	665.603	4	207	3	18.165	6	800,75	4	2.508.603	7	4,8
X ₅	1997	670.398	4	222	6	19.800	10	752	3	2.502.590	7	6,0
X ₆	1998	670.500	4	228	8	19.800	10	628	2	2.555.270	7	6,2
X ₇	1999	674.316	4	238	10	19.985	10	512,02	2	2.539.536	7	6,6
X ₈	2000	743.109	10	242	10	19.985	10	404,02	1	2.657.243	9	8,0
X ₉	2001	754.847	10	242	10	19.985	10	350	1	2.724.931	10	8,2

Sumber: Hasil Analisis, 2003

TABEL 4.11
PENENTUAN SKALA KOMPONEN VARIABEL Y

SKALA	KOMPONEN VARIABEL Y (PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR)				
	JML. PENDUDUK	JML INDUSTRI	JML PEKERJA INDUSTRI	LUAS PEKARANGAN (HA)	VOL EKSPOR PELABUHAN (JUTA)
1	113.094 - 119.470	85 - 90	6.777 - 7.047	641 - 664	1.341.564 - 1.585.428
2	119.471 - 125.845	91 - 95	7.048 - 7.317	665 - 688	1.585.429 - 1.829.292
3	125.846 - 132.221	96 - 100	7.318 - 7.587	689 - 711	1.829.293 - 2.073.157
4	132.222 - 138.596	101 - 105	7.588 - 7.857	712 - 735	2.073.158 - 2.317.021
5	138.597 - 144.972	106 - 110	7.858 - 8.127	736 - 758	2.317.022 - 2.560.885
6	144.973 - 151.348	111 - 115	8.128 - 8.397	759 - 781	2.560.886 - 2.804.749
7	151.349 - 157.723	116 - 120	8.398 - 8.667	782 - 805	2.804.750 - 3.048.613
8	157.724 - 164.099	121 - 125	8.668 - 8.937	806 - 828	3.048.614 - 3.292.478
9	164.100 - 170.474	126 - 130	8.938 - 9.207	829 - 852	3.292.479 - 3.536.342
10	170.475 - 176.850	131 - 135	9.208 - 9.477	853 - 875	3.536.343 - 3.780.206

Sumber: Hasil Analisis, 2003

TABEL 4.12
PERHITUNGAN VARIABEL Y (PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR)

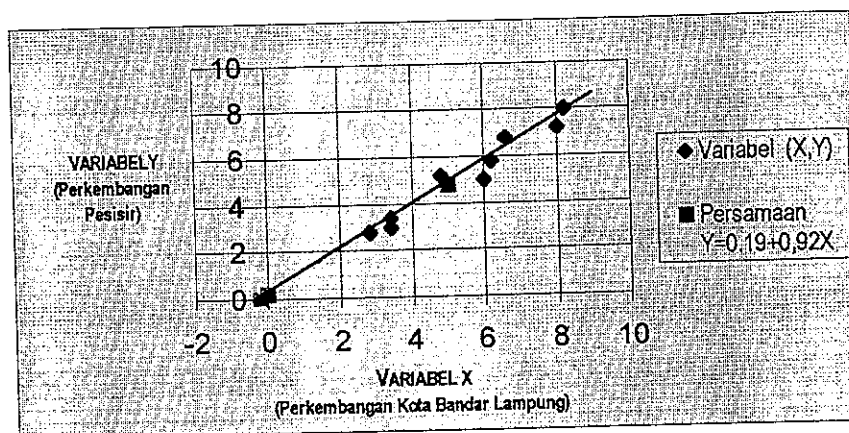
Y _i	THN	KOMPONEN VARIABEL Y PERKEMBANGAN KAWASAN PESISIR										Varia bel Y
		Penduduk (bobot 20%)		Industri (bobot 20%)		Pekerja industri (bobot 20%)		Pekarangan (bobot 20%)		Ekspor pelabuhan (bobot 20%)		
		Jml	skala	Jml	skala	Jml	skala	Luas	skala	Vol.	skala	
Y ₁	1993	113.094	1	85	1	6.777	1	874,3	10	1.341.564	1	2,8
Y ₂	1994	116.414	1	92	2	6.777	1	874,3	10	1.366.156	1	3,0
Y ₃	1995	117.588	1	97	3	6.777	1	874,3	10	1.591.886	2	3,4
Y ₄	1996	128.427	3	107	5	9.175	9	796,6	7	1.700.673	2	5,2
Y ₅	1997	130.332	3	115	6	9.224	10	702,1	3	1.897.526	3	5,0
Y ₆	1998	148.614	6	121	8	9.355	10	647,1	1	2.124.999	4	5,8
Y ₇	1999	165.263	9	131	9	9.477	10	647,1	1	2.532.973	5	6,8
Y ₈	2000	167.517	9	135	9	9.477	10	641,6	1	3.016.417	7	7,2
Y ₉	2001	176.850	10	135	9	9.477	10	641,6	1	3.780.206	10	8,0

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Selanjutnya dilakukan langkah-langkah perhitungan uji linearitas, uji korelasi dan lainnya selengkapnya dapat dilihat pada lampiran. Dari perhitungan yang dilakukan dapat disimpulkan bahwa:

- Distribusi data yang diteliti memiliki bentuk yang linear
- Persamaan regresi yang diperoleh adalah: $Y = 0,19 + 0,92 X$
- Harga residu yang didapat cukup rendah = 1,46, yang berarti kesalahan dasar ramalan cukup rendah
- Karena nilai F empirik lebih besar dari nilai F teoritik maka persamaan regresi $Y = 0,19 + 0,92 X$ merupakan persamaan regresi yang signifikan, yaitu dapat digunakan untuk meramalkan besarnya variabel Y (perkembangan kawasan pesisir) berdasarkan variabel X (perkembangan Kota Bandar Lampung)
- Harga korelasi sebesar 0,97 antara variabel X dengan Y yang didapat menggunakan teknik korelasi Karl Pearson / *Product Moment* menunjukkan bahwa korelasi antara variabel X dengan variabel Y signifikan.

Bentuk hubungan antara variabel X dan Y dapat dilihat pada diagram pencar (*Scater*) berikut ini:



GAMBAR 4.2
BENTUK HUBUNGAN LINIER ANTARA VARIABEL X DAN Y

Sumber: Hasil Analisis, 2003

Dari analisis regresi yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa perkembangan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung justru lebih pesat dibandingkan perkembangan Kota Bandar Lampung sendiri. Hal ini dapat dilihat dari persamaan $Y = 0,19 + 0,92X$ yang menunjukkan bahwa setiap satu peningkatan perkembangan di Kota Bandar Lampung berakibat pada perkembangan yang lebih besar (lebih dari satu = 1,11) di kawasan pesisirnya. Jika terdapat potensi-potensi bagi Kota Bandar Lampung bagi peningkatan perkembangannya, maka yang paling dahulu merespon perkembangan tersebut adalah kawasan pesisirnya. Dan jika setiap perkembangan berdampak pada perubahan fisik lingkungan, maka perkembangan yang terjadi di Kota Bandar Lampung berpotensi lebih besar dalam merubah lingkungan di kawasan pesisirnya. Permasalahannya adalah bahwa kawasan pesisir merupakan suatu kawasan yang harus dijaga kelestariannya karena fungsi ekologisnya yang menyangkut perlindungan pada kota dan penghuninya secara keseluruhan. Sehingga bila perkembangan di kawasan tersebut saat ini saja telah menimbulkan beberapa permasalahan lingkungan berupa penurunan kualitas lingkungan maka peningkatan perkembangan diwaktu berikutnya menjadi ancaman bagi keberlanjutan kawasan dan kota secara umum.

4.4.2 Analisis Kualitatif

Berbagai potensi yang dimiliki Kota Bandar Lampung menggambarkan masa depan Kota Bandar Lampung yang prospektif. Antisipasi yang bersifat proaktif menjadi kebutuhan utama dalam mendorong dan mengendalikan perkembangan Kota Bandar Lampung serta tidak cukup hanya mengandalkan kecenderungan perkembangan yang terjadi.

Dalam menyelenggarakan pembangunan untuk mewujudkan Kota Bandar Lampung sebagai pusat koleksi barang dan jasa bagi Sumatra bagian selatan berbagai perubahan lingkungan tentu akan timbul melalui proses transformasi lahan, penambahan unsur-unsur baru ke dalam lingkungan oleh limbah kegiatan, penggunaan dan pengambilan sumber daya alam sebagai bahan baku maupun penunjang, serta proses dinamika populasi kependudukan, flora, dan fauna.

Kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dengan berbagai fungsi dan perannya dapat dikatakan merupakan tulang punggung perekonomian dan pusat perkembangan Kota Bandar Lampung. Dari mulai pelabuhan dan berbagai sarana pendukungnya, rekreasi, industri, jasa perusahaan dan perkantoran, hingga pusat perdagangan grosir, terletak dikawasan ini. Semakin baik prospek perkembangan Kota Bandar Lampung maka semakin bertambah ramai aktifitas masyarakat di kawasan pesisirnya. Hal itu berarti bahwa perkembangan kawasan pesisir semakin meningkat pula dengan adanya berbagai kegiatan pembangunan sehingga potensi penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir semakin besar bila tidak ada upaya-upaya pengendaliannya.

Adanya kenyataan bahwa sektor-sektor sekunder dan tersier yang mendominasi pembentukan PDRB Kota Bandar Lampung, seperti sektor industri pengolahan dan sektor

perdagangan, hotel dan restoran, mengisyaratkan bahwa ketersediaan ruang di kawasan pesisir menjadi tuntutan dalam memenuhi kebutuhan sektor-sektor tersebut.

Dalam hal produksi suatu industri, kawasan pesisir sangat menarik bagi investor yang ingin menanamkan modalnya. Salah satu keuntungan pengalokasian industri pada kawasan pesisir Kota Bandar Lampung adalah kemudahan dalam hal pengiriman barang ke luar wilayah Lampung melalui Pelabuhan Panjang. Karena hal tersebut, sebagian besar industri-industri yang ditempatkan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan industri yang berorientasi ekspor seperti industri kayu lapis, alat berat, batu bara, dan sebagainya. Keberadaan pelabuhan lebih lanjut berdampak pada tuntutan ketersediaan jasa-jasa lain seperti hotel, restoran, tempat hiburan, dan sebagainya.

Keberadaan pelabuhan Panjang pada kawasan pesisir Kota Bandar Lampung merupakan suatu potensi ekonomi yang diharapkan dapat mempercepat perkembangan Propinsi Lampung umumnya dan Kota Bandar Lampung khususnya. Dengan fungsinya sebagai tempat pendaratan hasil minyak dan gas, tempat menyimpan peti kemas, perikanan, dan sebagai salah satu komponen dalam transportasi yang berfungsi untuk pergantian moda angkutan, Pelabuhan Panjang menjadi tumpuan ekonomi wilayah Propinsi Lampung.

Banyaknya aktifitas komersial di kawasan pesisir membawa konsekuensi pada beberapa masalah seperti alih fungsi lahan, polusi aktifitas industri maupun polusi kendaraan-kendaraan berat yang lalu-lalang. Bila mengacu pada rencana tata ruang untuk kawasan pesisir dapat disimpulkan bahwa arahan penggunaan ruang kawasan pesisir dalam kaitannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sejauh ini cukup berhasil. Kebijakan untuk menjadikan kawasan ini sebagai pusat pelayanan regional disamping kawasan Tanjungkarang telah menimbulkan perkembangan yang signifikan

terutama di kawasan pesisir yang masuk ke dalam BWK Panjang dimana dahulunya kawasan ini sangat sepi sebelum dipindahkannya pelabuhan dari kawasan Teluk Betung ke Panjang. Namun demikian, yang perlu diingat adalah bahwa di dalam rencana tata ruang yang dibuat, selain fungsi dan peran di atas, terdapat fungsi dan peran lain bagi kawasan pesisir, yaitu sebagai kawasan konservasi. Tampaknya, terdapat ketimpangan dalam implementasi tata ruang untuk pemenuhan fungsi dan peran-peran tersebut. Karena keuntungan yang besar dalam menempatkan kegiatan-kegiatan ekonomi di kawasan pesisir ini mengakibatkan dikorbankannya beberapa lahan yang semestinya diperuntukkan bagi upaya konservasi.

Permasalahan lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang paling menonjol adalah kerusakan fisik habitat pesisir yang akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem. Hal ini terjadi pada ekosistem mangrove, terumbu karang, dan rumput laut atau padang lamun. Kebanyakan rusaknya habitat di kawasan pesisir ini adalah karena aktivitas manusia seperti konversi hutan mangrove untuk kepentingan pemukiman dan pembangunan infrastruktur. Kerusakan ekosistem terumbu karang antara lain disebabkan oleh pencemaran perairan oleh limbah industri dan rumah tangga (Dahuri, 2001). Sedangkan ekosistem padang lamun secara khusus rentan terhadap degradasi lingkungan yang diakibatkan oleh aktifitas manusia seperti pengerukan dan pengurugan untuk pembangunan pemukiman pinggir laut, pelabuhan, pembuangan sampah organik, dan pencemaran limbah industri (Bengen, 2000).

Dari angket yang disebarakan pada masyarakat pesisir Kota Bandar Lampung, didapatkan informasi bahwa keberadaan ekosistem bakau, terumbu karang dan padang lamun sudah tidak ada atau hampir tidak ada lagi di lingkungan pesisir dimana mereka tinggal. Informasi tersebut secara teori sesuai dengan hasil observasi dan data lainnya

mengenai aktifitas di kawasan tersebut. Banyaknya dan terus meningkatnya aktifitas di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung seperti permukiman, pelabuhan, dan industri telah menyebabkan hilangnya berbagai ekosistem pesisir tersebut. Selain itu, dari analisis sebelumnya mengenai identifikasi perkembangan kawasan pesisir ditinjau dari aspek tata ruang, diketahui juga bahwa telah banyak terjadi pergeseran penggunaan lahan pesisir. Kawasan yang diperuntukkan bagi ruang terbuka menjadi permukiman atau lokasi hiburan, atau yang di dalam rencana tata ruang seharusnya menjadi kawasan lindung akhirnya diusahakan juga menjadi kawasan budidaya seperti untuk permukiman, perusahaan dan industri. Akibatnya, terjadi kerusakan ekosistem di sekitar pesisir, terutama ekosistem mangrove. Jika ekosistem mangrove rusak dan bahkan punah, maka yang akan terjadi adalah: (1) regenerasi stok ikan dan udang terancam, (2) terjadi pencemaran laut oleh bahan pencemar yang sebelumnya diikat oleh hutan mangrove, (3) pendangkalan perairan pantai, dan (4) erosi garis pantai serta intrusi air laut (Dahuri, 2001).

Perkembangan di kawasan pesisir dengan fungsinya yang strategis tidak mungkin dihindari dan pada dasarnya merupakan potensi untuk pengembangan ekonomi kota dan wilayah sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah suatu kemampuan untuk memanajemen, baik dalam penyediaan sarana-prasarana, pelayanan pada masyarakat, maupun pengendalian lingkungan. Jelas, kemampuan tersebut tidak dapat dilakukan hanya oleh pemerintah melainkan harus melibatkan swasta dan masyarakat.

Kecenderungan ekonomi yang ada pada Kota Bandar Lampung perlu dimanfaatkan dalam penataan ruang dengan memperhatikan kriteria penataan ruang seperti yang diamanatkan dalam UU No. 24 tahun 1992 mengenai penataan ruang, misalnya mengenai eksistensi kawasan lindung dan kawasan penyangga. Dengan demikian hal utama yang perlu dilakukan terkait dengan penggunaan lahan pesisir Kota Bandar

Lampung adalah mengimplementasikan penggunaan lahan bagi kawasan lindung dan penyangga secara konsisten. Dengan adanya tren yang menunjukkan peningkatan permukiman di sepanjang garis pantai maka diperlukan tindakan tegas secepatnya untuk mengembalikan lahan tersebut pada fungsinya sebagai kawasan pesisir yang terbuka. Sebagai contoh adalah lahan-lahan yang sebenarnya kosong namun siap diperuntukkan baik untuk industri maupun pergudangan, sebaiknya untuk sementara pemerintah kota menghentikan atau membatasi ijin yang diberikan.

Sedangkan alternatif lain yang dapat diambil sebagai upaya menyeimbangkan fungsi strategis kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dalam aspek ekonomi dan lingkungan adalah optimalisasi peran kawasan pesisir. Maksudnya adalah bagaimana seluruh kawasan pesisir yang ada di Kota Bandar Lampung dioptimalkan perannya dalam memenuhi kedua fungsi tersebut karena yang ada sejauh ini perkembangan pesisir terutama hanya terjadi di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Selatan. Sedangkan kawasan pesisir di Teluk Betung Barat dapat dikatakan masih belum banyak terjamah. Beberapa fungsi ruang yang ditujukan pada pesisir di Kecamatan Panjang dan Teluk Betung Selatan dapat dialokasikan ke pesisir Teluk Betung Barat. Misalnya kawasan rekreasi pantai dan olahraga bahari yang selama ini ditempatkan di Way Lunik dan tidak berjalan meskipun sarana-prasarananya sempat terbangun, sebaiknya dipindahkan ke kawasan yang memiliki tipikal yang sama di pesisir Teluk Betung Barat. Selain itu, industri-industri yang tidak berorientasi ekspor juga dapat dialokasikan ke beberapa lokasi di Teluk Betung Barat. Dari segi lokasi, kawasan sebelah barat ini cukup mendukung untuk industri, yaitu relatif lapang dan lenggang sehingga tidak mengganggu ketertiban dan kelancaran arus kota. Sedangkan dari segi infrastruktur seperti jalan, kawasan ini juga memadai. Kawasan ini relatif sepi sejak dipindahkannya pelabuhan barang ke Panjang

serta dibangunnya jaringan kereta api dan jalan raya regional yang tidak melalui kawasan ini.

Tidak dapat dipungkiri bahwa penataan ruang kota sungguh rumit, apalagi ruang kota tersebut juga merupakan kawasan pesisir yang notebene adalah kawasan konservasi. Berbagai benturan terjadi antara pendekatan-pendekatan komersial dan lingkungan. Adanya produk akhir berupa rencana tata ruang yang baik tidak selalu menghasilkan penataan ruang yang baik pula tanpa didukung oleh para pengelola yang andal, mekanisme pengawasan dan pengendalian pembangunan yang jelas. Disamping itu, terbatasnya peran serta masyarakat dalam perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup juga menjadi sebab kurang berhasilnya penataan ruang di kawasan ini.

Dalam menyelenggarakan kegiatan perkotaan yang memiliki keunggulan komparatif dan kompetitif, Kota Bandar Lampung dihadapkan pada daya dukung lingkungan yang secara fisik akan mempengaruhi keberlanjutan (*sustainability*) seluruh kegiatan pembangunan Kota Bandar Lampung. Untuk itu, isu eksistensi dari ekosistem pantai/pesisir perlu menjadi perhatian karena merupakan salah satu karakteristik fisik Kota Bandar Lampung yang implikasinya akan memberikan batasan bagi perkembangan dan pertumbuhan kota.

Dari analisis regresi yang telah dilakukan, didapat suatu prediksi bahwa perkembangan Kota Bandar Lampung secara signifikan diikuti oleh perkembangan kawasan pesisirnya. Adanya prospek pada Kota Bandar Lampung ditinjau dari potensi-potensi yang dimilikinya saat ini dapat diperkirakan dampaknya terhadap kawasan pesisir dimasa mendatang. Meskipun untuk saat ini kondisi lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung relatif masih baik namun perkembangan yang terus terjadi patut menjadi perhatian bagi usaha-usaha untuk menjaga kelestariannya. Jika hal tersebut tidak

ditindaklanjuti, bukan mustahil keuntungan ekonomi yang dihasilkan kawasan ini tidak dapat menutupi kerugian ekologis yang ditimbulkan berupa rusaknya habitat pesisir, penurunan mutu lingkungan dan daya dukung pesisir, pencemaran pesisir serta kerugian berupa hilangnya sumber daya perairan bagi masyarakat.

Namun demikian, hasil penelitian tentang kualitas perairan Teluk Lampung memang sangat kurang. Parameter suhu, salinitas, pH, kecerahan, kekeruhan, kandungan minyak, Cu, dan coliform diperairan Teluk Lampung, misalnya, masih tergolong memenuhi syarat baku mutu untuk pariwisata dan rekreasi maupun tujuan budidaya perikanan dan biota laut. Sebaliknya, COD dan kandungan Cd sudah berada diluar batas yang diperbolehkan untuk tujuan kegiatan yang sama. Sedangkan BOD, kandungan oksigen terlarut, Cr, Pb, dan padatan tersuspensi masih memenuhi syarat untuk tujuan rekreasi maupun budidaya di beberapa tempat dan sudah berada diluar batas yang diperbolehkan pada beberapa tempat yang lain. Oleh karena itu, dibuat suatu formula yang dapat mencerminkan kualitas perairan berdasarkan kandungan beberapa parameter kunci seperti pestisida, logam berat (Hg, Cd, Cu, Pb, dan Cr), minyak, coliform, TSS, dan bahan organik (BOD dan COD). Dengan melakukan pembobotan dan skoring serta penjumlahan nilai, didapat nilai akhir yang mengklasifikasikan kualitas perairan. Berdasarkan formula tersebut, disimpulkan bahwa perairan Teluk Lampung bagian dalam (termasuk perairan di Bandar Lampung) diklasifikasikan memiliki kualitas perairan yang cukup baik, dengan taraf tercemar ringan. Di beberapa lokasi, seperti beberapa industri, TPI (tempat pelelangan ikan), dan pemukiman kumuh telah terjadi pencemaran (PKSPI-IPB, 2002).

Meskipun dalam rencana tata ruang kota permasalahan kawasan konservasi dalam penggunaan lahan di kawasan pesisir cukup ditekankan, namun dalam kenyataannya kawasan konservasi pun banyak yang beralih fungsinya menjadi kawasan pembangunan.

Dengan demikian, adanya rencana tata ruang khusus untuk kawasan pesisir menjadi kebutuhan yang mendesak sehingga penyelenggaraan pembangunan di kawasan tersebut tidak lagi mengacu pada rencana tata ruang kota yang lebih bersifat umum.

Pada dasarnya bahwa tujuan utama dalam pengembangan dan pengelolaan di pesisir adalah memanfaatkan segenab sumber daya alam dan jasa-jasa lingkungan pesisir dan lautan secara berkelanjutan (Dahuri, 2001). Sedangkan dalam mengukur suatu keberlanjutan dalam pembangunan, terdapat beberapa indikator yang dapat dipergunakan, yaitu ekologi, ekonomi, dan sosial (Trzyna, 1995). Hal tersebut didukung pula oleh Haeruman (1997) yang mengatakan bahwa pembangunan yang berkelanjutan merupakan suatu tujuan yang dilatarbelakangi sebuah visi akan keseimbangan dalam keterkaitan antara ekonomi, sosial, dan lingkungan (ekologi) guna membangun masyarakat yang stabil, makmur, dan berkualitas.

Dalam studi ini digunakan indikator ekologis yang terkait dengan kepentingan ekonomi untuk mengukur keberlanjutan Kota Bandar Lampung, khususnya menyangkut kawasan pesisir yang menjadi bagian kota secara umum. Melihat perkembangan yang terjadi di kawasan pesisir saat ini yang membawa beberapa permasalahan lingkungan, dikhawatirkan akan berpengaruh buruk pada keberlanjutan Kota Bandar Lampung secara keseluruhan. Oleh karena itu, berbagai peluang perkembangan yang prospektif pada Kota Bandar Lampung membawa prasyarat, yaitu kehidupan kota yang diharapkan hanya dapat tercapai dengan merestrukturisasi tren perkembangan fisik yang terjadi. Pembangunan Kota Bandar Lampung yang berkelanjutan harus menjamin kehidupan yang lebih baik bagi warga kota pada waktu kini dan masa yang akan datang. Untuk itu diperlukan suatu upaya agar tercipta kondisi yang antara lain dapat menjamin warganya bebas dari banjir, dapat menikmati keindahan pantai, dan memperoleh hasil dari kekayaan laut.

BAB V

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1 Kesimpulan

1. Perkembangan Kota Bandar Lampung saat ini dan prospeknya dimasa mendatang sangat dipengaruhi oleh peran dan fungsinya sebagai simpul koleksi barang dan jasa dimana Pelabuhan Panjang berperan dalam mendukung fungsi dan peran tersebut
2. Perkembangan volume ekspor yang meningkat tiap tahunnya melalui Pelabuhan Panjang secara langsung mendorong perkembangan kota lebih lanjut dengan meningkatnya perkembangan industri-industri yang menyediakan bahan mentah dan jasa-jasa untuk industri-industri yang memproduksi barang ekspor
3. Perkembangan kota Bandar Lampung karena peran fungsionalnya tersebut menyebabkan munculnya perubahan yang bersifat menyeluruh, baik ekonomi, sosial-budaya, maupun fisik yang secara jelas dapat dilihat di kawasan pesisirnya sebagai suatu kawasan yang berperan penting dalam perekonomian Kota Bandar Lampung
4. Perubahan fungsi kawasan pesisir diikuti dengan perubahannya secara fisik seperti ketersediaan lahan yang luas menjadi terbatas, penggunaan ruang yang sedikit menjadi terglomerasi secara luas, serta adanya indikasi penurunan kualitas lingkungan seperti banjir, rusaknya habitat pesisir, dan sebagainya
5. Semakin baik prospek perkembangan ekonomi Kota Bandar Lampung maka semakin meningkat pula perkembangan di kawasan pesisirnya yang ditandai antara lain oleh tingginya intensitas kegiatan pembangunan sehingga potensi penurunan kualitas lingkungan kawasan pesisir juga semakin besar bila tidak ada upaya-upaya pengendaliannya

6. Kondisi tata ruang di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang tidak sesuai dengan arahan tata ruang terdiri dari: 1) kawasan terbangun yang terbangun tidak sesuai fungsinya, 2) kawasan konservasi (tidak terbangun) yang sudah terbangun, 3) Kawasan konservasi (tidak terbangun) yang belum terbangun tapi telah diperuntukkan bagi kegiatan tidak sesuai fungsinya
7. Arahan penggunaan ruang kawasan pesisir dalam kaitannya untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Kota Bandar Lampung sejauh ini berhasil namun arahan penggunaan ruang untuk melestarikan kawasan lindung dan penyangga di kawasan tersebut kurang mendapat perhatian sehingga berbeda antara rencana dengan kondisi yang ada di lapangan
8. Permasalahan lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung yang paling menonjol adalah kerusakan fisik habitat pesisir akibat aktivitas manusia untuk kepentingan pemukiman dan pembangunan infrastruktur yang akhirnya mengakibatkan penurunan kualitas ekosistem
9. Perkembangan di kawasan pesisir dengan fungsinya yang strategis tidak mungkin dihindari dan pada dasarnya merupakan potensi untuk pengembangan ekonomi kota dan wilayah sehingga yang diperlukan sebenarnya adalah suatu kemampuan untuk mengelola kawasan tersebut
10. Kecenderungan ekonomi pada kawasan pesisir Kota Bandar Lampung tetap dimanfaatkan namun implementasi penggunaan lahan bagi kawasan lindung dan penyangga juga harus dilakukan secara konsisten
11. Untuk saat ini kondisi lingkungan kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dinilai masih relatif baik namun perkembangan yang terus terjadi patut menjadi perhatian bagi usaha-usaha untuk menjaga kelestariannya

12. Oleh karena lingkungan di kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dinilai masih mampu mendukung kegiatan pembangunan di kawasan tersebut, maka untuk saat ini keuntungan ekonomi yang dihasilkan cukup seimbang dan relatif lebih besar dibandingkan dampak ekologi yang ditimbulkan

5.2 Rekomendasi

Dari studi yang telah dilakukan, beberapa rekomendasi yang dapat disampaikan adalah:

1. Kawasan konservasi yang telah diperuntukkan bagi kegiatan komersial tertentu namun belum terbangun segera dikembalikan pada fungsinya semula dengan mencabut izin penggunaan lahan bersangkutan
2. Kawasan konservasi berupa kawasan hijau yang telah digunakan bagi aktifitas lain diluar fungsinya seperti permukiman, di dalam perencanaan tata ruang yang baru mau tidak mau diakomodir namun bagi kawasan yang diarahkan sebagai kawasan terbuka di atas lahan reklamasi diperlukan tindakan tegas mengosongkannya.
3. Dalam rencana tata ruang kota yang baru, kawasan pelabuhan yang dijadikan permukiman oleh masyarakat dapat difungsikan bagi aktifitas-aktifitas pendukung pelabuhan sedangkan permukiman yang ada direlokasi ke bagian kota yang lain yang diperuntukkan bagi permukiman skala besar. Di sekitar pelabuhan cukup di sediakan fasilitas perumahan skala kecil bagi mereka yang aktifitasnya berkaitan dengan pelabuhan.
4. Salah satu alternatif upaya menyeimbangkan fungsi strategis kawasan pesisir Kota Bandar Lampung dalam aspek ekonomi dan lingkungan adalah optimalisasi peran kawasan pesisir dengan merelokasi beberapa fungsi dari kawasan pesisir yang terlalu ramai ke kawasan pesisir yang relatif kurang perkembangannya, misalnya fungsi

rekreasi dan olahraga bahari serta industri bukan orientasi ekspor direlokasi dari kawasan Panjang ke kawasan Teluk Betung Barat.

5. Rencana tata ruang yang ada dapat dijadikan acuan dalam membuat rencana tata ruang kota maupun pesisir yang baru dengan merevisi beberapa hal seperti relokasi beberapa fungsi seperti di atas serta mengoptimalkan kawasan pelabuhan yang sangat luas dan belum terpakai untuk fungsi-fungsi lain seperti perusahaan dan industri sehingga tidak mengambil lahan yang difungsikan bagi konservasi
6. Pemerintah kota hendaknya dalam mengeluarkan perijinan bagi kegiatan ekonomi mengoptimalkan kawasan-kawasan yang memang diarahkan untuk itu, karena sebenarnya masih banyak yang belum dimanfaatkan, serta mengembalikan kawasan yang berfungsi konservasi. Dengan demikian tren ekonomi yang terjadi dapat di jadikan potensi perkembangan dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan.
7. Diperlukan kekonsistenan dalam mengimplementasikan arahan penggunaan ruang kawasan pesisir pada masa berikutnya untuk memenuhi fungsi dan perannya dalam perekonomian sekaligus dalam pelestarian lingkungan karena hal ini merupakan langkah yang paling murah, dan efektif untuk mengatasi trend perkembangan yang ada.
8. Jika semua lahan yang diarahkan bagi pembangunan telah terbangun seluruhnya maka pertumbuhan ekonomi di kawasan pesisir lebih diarahkan pada kualitas dan menghentikan ekstensi penggunaan lahan serta diperlukan alternatif kawasan lain bagi pertumbuhan ekonomi kota
9. Isu eksistensi dari ekosistem pantai/pesisir perlu menjadi perhatian dan disosialisasikan terus-menerus pada masyarakat serta menggalakkan peran serta masyarakat dan kemitraan dengan swasta dalam memecahkan masalah tata ruang kawasan pesisir dan pengelolaan lingkungan hidup tanpa harus ada yang dirugikan

DAFTAR PUSTAKA

- Beatley, T dan Manning, K. 1997. *The Ecology Place Planning for Environment, Economy, and Community*. Washington: Island Press.
- Budiharjo, Eko. 1996. *Kota Berkelanjutan*. Bandung: Penerbit Alumni
- Budiharsono, Sugeng. 2001. *Teknik Analisis Pembangunan Wilayah Pesisir dan Laut*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Catanese, J. Anthony dan Snyder, C. James. 1989. *Perencanaan Kota*. Jakarta: Erlangga.
- Clark, J. 1974. *Coastal Ecosystem, Ecological Considerations for Management of the Coastal Zone*. Washington: The Conservation Foundation.
- _____. 1993. *Coastal Zone Management Integrated Policies*. Perancis: OECD.
- Dahuri, Rokhmin. 2001. *Pengelolaan Sumber Daya Wilayah Pesisir dan Lautan Secara Terpadu*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Daldjoeni, N. 1992. *Geografi Baru: Organisasi Keruangan dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Alumni
- Djoyodipuro, Marsudi. 1992. *Teori Lokasi*. Jakarta: Penerbit Fakultas Ekonomi UI.
- French, Peter W. 1998. *Coastal and Estuarine Management*. New York: Routledge
- Haeruman Js, Herman. 1997. *Instrumen-instrumen Penerapan Strategi Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: PT Gramedia.
- Hauhton, Graham and Colin Haunter. 1994. *Sustainable Cities*. London: Regional Studies Association.
- Hendro K, Raldi. 2001. *Dimensi Keruangan Kota, Teori dan Kasus*. Jakarta: UI Press.
- Ilhami. 1990. *Strategi Pembangunan Perkotaan di Indonesia*. Surabaya: Usaha Nasional.
- Jayadiningrat, Johara T. 1992. *Tata Guna Tanah dalam Perencanaan Pedesaan, Perkotaan, dan wilayah*. Bandung: Penerbit ITB
- Kay, Robert & Alder, Jacqueline. 1999. *Coastal Planning and Management*. New York: E & F Spon An Imprint of routledge.
- Marbun, BN. 1992. *Kota Indonesia Masa Depan*. Jakarta: Erlangga.

- M. Subana dan Sudrajat. 2001. *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia.
- Olsen, S.B., K. Lowry dan J. Tobey. 1999. *A Manual for Assessing Progress in Coastal Management*. Narragansett: The University of Rhode Island.
- The World Commission on Environment and Development. 1987. *Our Common Future*. New York: Oxford University Press.
- R Clark, Jhon. 1996. *Coastal Zone Management Handbook*.
- Sabari Yunus, Hadi. 2001. *Struktur Tata Ruang Kota*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Salim, Emil. 1997. *Pembangunan Berwawasan Lingkungan*. Jakarta: LP3ES.
- Sugandhy, Aca. 1999. *Penataan Ruang Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Supriharyono. 2000. *Pelestarian dan Pengelolaan Sumber daya Alam di Wilayah Pesisir Tropis*. Jakarta: Gramedia.
- Trzyna, C. Thaddeus. 1995. *A sustainable World*. California: IUCN.
- Tjahjati, Budhy dan BS. Kusbiantoro. 1997. *Bunga Rampai Perencanaan Pembangunan di Indonesia*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Winarsunu, Tulus. 1996. *Statistik Teori dan Aplikasinya Dalam Penelitian*. Malang: Pusat Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang.
- Yakin, Addinul. 1997. *Teori dan kebijaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Yudianto. 2001. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Penerbit M2S.

BUKU LAPORAN

- Atlas Sumberdaya Wilayah Pesisir Lampung*. Kerjasama Pemerintah Propinsi Lampung dengan Proyek Pesisir-PKSPL IPB, 2002.
- Kota Bandar Lampung Dalam Angka Tahun 2000*. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung, 2001
- Laporan Akhir Studi Bandar Lampung Tahun 2020*. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Bandar Lampung, 1997.
- Pendapatan Regional Kota Bandar Lampung Tahun 1996-2000*. Badan Pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Bandar Lampung. Bandar Lampung, 2001.

Revisi Rencana Induk Kota (RIK) Kota Bandar Lampung Tahun 1994/1995
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Bandar Lampung 1995/1996
Rencana Detail Tata Ruang Kota (RDTRK) Kota Bandar Lampung 1996/1997
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang

SURAT KABAR DAN TERBITAN LAIN

- Bengen, D.g. 13-18 November 2000. *Pengenalan dan Pengelolaan Ekosistem Sumber daya Pesisir dan Laut*. Bogor: Bahan Prosiding Pelatihan Untuk Pelatih Pengelolaan Wilayah Pesisir Terpadu. Pusat Kajian Sumberdaya Pesisir dan Lautan.
- Firman, Tommy. Mei 1996. *Jurnal PWK* No. 21 Th VII. Bandung.
- Hendarto, R. Mulyo. 1997. *Teori Perkembangan dan Pertumbuhan Kota*. Semarang: Makalah pada Diskusi Rutin Fakultas Ekonomi.
- “Kota Bandar Lampung”. Surat Kabar Harian Kompas Edisi 3 Juli 2001.
- _____. 2001. *Naskah Akademik dan RUU Pengelolaan Wilayah Pesisir*. Jakarta: Departemen Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia.
- Ma'arif, Samsul. 2002. *Bahan Kuliah Ekonomi Pembangunan Wilayah dan Kota*. Semarang: Magister Perencanaan Pembangunan Wilayah dan Kota Universitas Diponegoro.
- Widyaningsih, Niken S. *Relevansi Preferensi Penduduk terhadap Fasilitas Kota yang Mempengaruhi Faktor Perkembangan Kota*. *Plannit Journal* No. 2 Th I, Juli – Agustus 2001, hal 33.